

Laporan

KINERJA

Balai Besar POM di Palangka Raya

2025



**Interim
Triwulan III**





Ali Yudhi H., SE., Apt., MM
Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya dapat terselesaikan dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan pelayanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya evaluasi dan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya merupakan ikhtisar yang menjelaskan dan menggambarkan secara terperinci, lengkap dan sistematis capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur. Dalam laporan kinerja BBPOM Di Palangka Raya Triwulan III Tahun 2025 tertuang indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja serta evaluasi dan analisis yang memadai tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan yang dapat menggambarkan pengukuran kinerja serta realisasi anggaran serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi baik internal maupun eksternal untuk perbaikan kinerja selanjutnya.



Pengukuran kinerja merupakan salah satu wujud penerapan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi kegiatan terhadap target capaian kinerja, efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya dan anggaran disertai analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipahami mengenai kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dan sistematis berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja, untuk peningkatan kinerja BBPOM di Palangka Raya pada triwulan selanjutnya serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Palangka Raya, 20 Oktober 2025
Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya



Ali Yudhi H., S.F., Apt., M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dokumen Renstra BBPOM di Palangka Raya periode 2025-2029 telah ditetapkan tujuan strategis untuk periode 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi. Berikut adalah tujuan BBPOM di Palangka Raya untuk periode 2025-2029:

1. Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan, telah dirumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5. Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Layanan publik UPT yang prima
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 mengacu pada Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2025-2029 dengan melaksanakan 22 kegiatan untuk mencapai 8 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 di triwulan III ini capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Palangka Raya adalah **103.67** dengan Predikat NKO **Istimewa**. Dari 28 indikator kinerja, 20 indikator kinerja dapat diukur pada triwulan ini, dan 8 indikator kinerja diukur pada akhir tahun. Dua puluh indikator kinerja yang dapat diukur pada triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **109,29%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
2. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **104,38%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **100.00%** dengan kriteria **Baik**.
4. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **109,25%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
5. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder **berhasil tercapai** dengan capaian **94,39%** dengan kriteria **Baik**.
6. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **108,70%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
7. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **108,70%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

8. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **99,70%** dengan kriteria **Baik**.
9. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **107,44%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
10. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **105,71%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
11. Indikator Persentase Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar **berhasil tercapai** dengan capaian **101,01%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
12. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium **berhasil tercapai** dengan capaian **106,06%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
13. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.
14. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **106,73%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
15. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan **berhasil tercapai** dengan capaian **107,14%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
16. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.
17. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.
18. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan **berhasil tercapai** dengan capaian **105,22%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
19. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **100,94%** dengan kriteria **Sangat Baik**.
20. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar **berhasil tercapai** dengan capaian **100%** dengan kriteria **Baik**.

Enam indikator kinerja yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
4. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT.
5. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
6. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM.
7. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.
8. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Palangka Raya pada triwulan III tahun 2025, dari 8 sasaran kegiatan, 6 sasaran kegiatan dapat diukur, dan 2 sasaran kegiatan diukur pada akhir tahun. Enam sasaran kegiatan yang dapat diukur adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Pertama, Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai**, dengan capaian **104,48%** yang diukur dengan 15 indikator. 3 indikator diukur pada akhir tahun, 12 indikator

- dapat diukur. Dari 12 indikator yang dapat diukur, 9 indikator dapat dicapai dengan kriteria sangat baik, 3 indikator tercapai dengan kriteria Baik.
2. Sasaran Kegiatan Kedua, Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi **berhasil tercapai** dengan capaian **100.00%** yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.
 3. Sasaran Kegiatan Ketiga, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian **103,47%** yang diukur dengan 4 indikator. Dari 4 indikator, 2 indikator tercapai dengan kriteria sangat baik, 2 indikator tercapai dengan kriteria baik.
 4. Sasaran Kegiatan Keempat, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu **berhasil tercapai** dengan capaian **105,22%** yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
 5. Sasaran Kegiatan Kelima, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT tidak **berhasil tercapai** dengan capaian **100,94%** yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
 6. Sasaran Kegiatan Keenam, Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif **berhasil tercapai** dengan capaian **100.00%** yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik
- Dua Sasaran Kegiatan yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Layanan Publik UPT yang prima.
2. Sasaran Kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA-063.01.2.432872/2025 tanggal 02 Desember 2024 satuan kerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengelola anggaran sebesar Rp.22.128.308.000. (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025, pagu yang dikelola pada triwulan I Rp.22.128.308.000,- dengan blokir anggaran Rp 8.093.017.000,- sehingga pagu efektif yang dikelola menjadi Rp 14.035.291.000,-.

Pada tanggal 10 April 2025 usulan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025 BPOM disetujui oleh Ditjen Anggaran BBPOM Palangka Raya mendapat relaksasi blokir anggaran senilai Rp 3.194.209.000,- pada akhir triwulan II tahun 2025 pagu yang dikelola Rp.22.128.308.000,- dengan blokir anggaran Rp 4.898.808.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 17.229.500.000,-

Pada tanggal 08 Juli 2025 terdapat penyesuaian pagu anggaran pada Revisi kedelapan kewenangan DJA dalam rangka Revisi pengurangan belanja Pegawai senilai Rp 546.605.000,- dan Penambahan pagu Belanja Barang Keperluan Perkantoran CASN Rp 5.588.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya akhir triwulan III adalah senilai Rp 16.688.483.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 adalah Rp 13.194.594.030,- sebesar 61% dari pagu awal dan 79% dari pagu efektif yang dikelola BBPOM Palangka Raya, dengan realisasi pagu efektif paling rendah pada belanja barang 68% dan paling tinggi pada belanja modal yang telah direalisasikan 100%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi secara keseluruhan Capaian Efisiensi Sasaran Kegiatan BBPOM Palangka Raya adalah **1.82** dengan kriteria capaian **tidak efisien**, Pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan 8 sasaran kegiatan. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 sampai 10.

Untuk pengukuran efisiensi Kegiatan yang dihitung dari 22 Rincian Output (RO) berdasarkan hasil pengukuran 22 (dua puluh dua) RO telah melaksanakan kegiatannya, 16 (enam belas) RO telah masuk dalam kriteria efisien dan 6 (enam) RO lainnya masuk dalam kriteria tidak efisien dengan rentang capaian efisiensi -0.21 sampai dengan 10. Untuk pengukuran efisiensi output BBPOM

Palangka raya di Triwulan III ini berdasarkan hasil rata-rata dari capain efisiensi setiap RO didapat nilai **0,81 dan masuk dalam kriteria 88% efisien**,

Tahun 2025 sebagai tahun awal periode Renstra 2025-2029. Pada awal tahun 2025 dari sisi anggaran mengalami dinamika dimulai dengan terbitnya Surat Sekretaris Utama BPOM tentang Penyampaian Data Pembolokan dalam rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025 diikuti dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025 yang ditindaklanjuti dengan blokir belanja barang dan belanja modal. Mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada dalam rangka pencapaian program dan sasaran beberapa upaya yang dilakukan BBPOM di Palangka Raya antara lain efisiensi dalam pengelolaan operasional perkantoran, pengaturan ulang titik lokus pengawasan Obat dan Makanan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dikembangkan Inovasi Smart Laura di Mall Pelayanan Publik yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota, perubahan sistem kerja pegawai dengan penerapan *Flexible Working Arrangement* (FWA), pemanfaatan *co-working space*, serta digitalisasi dalam semua aspek operasional melalui penciptaan dokumen elektronik (*paperless*). Dalam pelaksanaannya upaya ini efektif dan efisien berhasil mengatasi kendala terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Pada triwulan III tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 103.67 dengan Predikat NKO Istimewa.

Palangka Raya 20 Oktober 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di
Palangka Raya



Ali Yudhi Hartanto

Highlight Kinerja

1. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Upaya

Penguatan Pengawasan & Integritas Pegawai

Dampak



Pencantuman Antigratifikasi pada footnote Surat Tugas



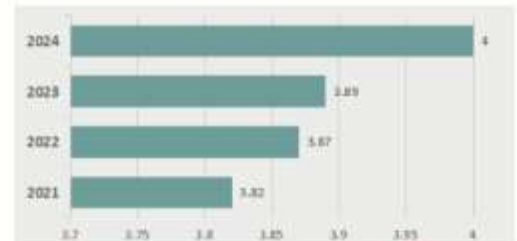
Sosialisasi Tolak Gratifikasi saat Apel Disiplin

Pencantuman Antigratifikasi pada footnote Surat Tugas	
No	Nama Pegawai
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...

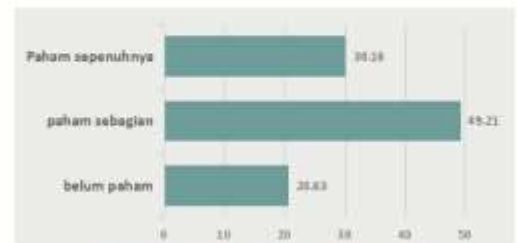
Pelanggaran disiplin pegawai nihil



Tolak! GRATIFIKASI!



Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meningkat



Penilaian RB Tematik 79,37% paham

Penguatan Integritas Pegawai

Melalui Inovasi **BRANTAS TAKTIK** (Branding Logo Zona Integritas & Tolak Gratifikasi)

Brantas Taktik

"From Good Branding to Good Governance: Bangun Zona Integritas dan Cegah Gratifikasi melalui Implementasi BRANTAS TAKTIK"



Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016

BBPOM di Palangka Raya telah meng-implementasikan SMAP dan tersertifikasi ISO 37001:2016 sejak 21 Desember 2023



CERTIFICATE

Memberi sertifikat ini kepada
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA**

di 1506 Rukun II, 52 No. 12 Palangka Raya Kalimantan Tengah

Has been issued by **PT SARUKA SERTIFIKASI** (SARUKA)

and has implemented anti-bribery Management System

SNI ISO 37001 : 2016

Scope of registration

Proses: Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Manajemen Mutu (SMK)

dan Pengawasan Obat dan Makanan (PODM) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya

dan Pengawasan Obat dan Makanan (PODM) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya

dan Pengawasan Obat dan Makanan (PODM) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya



RUANG LINGKUP ISO 37001 : 2016 BBPOM di Palangka Raya :

- Pelayanan Sertifikasi
- Layanan Informasi dan Pengaduan
- Pemeriksaan Sarana Rutin
- Sampling dan Pengujian Rutin
- Operasi Penindakan
- Pengujian Pihak Ketiga
- Serta Ketatausahaan

Highlight Kinerja

2a. Inovasi dalam Manajemen Kinerja

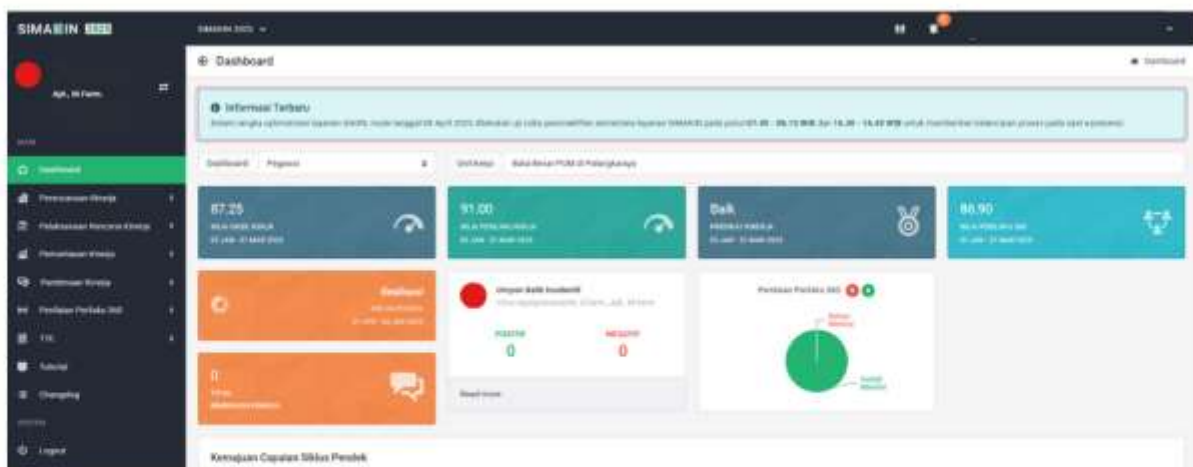


RINGKAS

Role Integration for Genuine inat Goal Achievement System

“RINGKAS” merupakan inovasi manajemen kinerja pada pokja penguatan SDM

- **Role Integration :**
 - Menyederhanakan dan menyatukan peran/tugas individu
- **Genuine :**
 - Fokus pada hasil nyata dan relevan
- **Neat Goal Achievement :**
 - Proses yang rapi, efisien, dan terarah pada pencapaian kinerja
- **System :**
 - Mengarah pada pendekatan/platform terstruktur, bisa manual/digital



Tujuan dibuatnya Inovasi “RINGKAS” :

- Menyederhanakan jumlah Rencana Hasil Kerja (RHK) pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja Kepala Unit dengan berfokus pada pengurangan jumlah RHK, penyederhanaan SKP, penguatan pengukuran berbasis kualitas pencapaian kinerja dengan tetap menjamin proses kegiatan pendukung terakomodir tertuang dalam kertas kerja SKP secara sistematis dan terukur



Highlight Kinerja

2b. Inovasi dalam Manajemen Kinerja

Inovasi



Evaluasi Rencana
Aksi Tindak Lanjut
Capaian Kinerja

- Analisa Capaian Target Kinerja
- Identifikasi Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan / Penurunan Kinerja
- Rekomendasi / Perbaikan
- Arahan Pimpinan
- Rencana Aksi



NKO

Nilai Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di triwulan 1 tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh NKO senilai 99,43% dari hasil rata-rata 16 Indikator kinerja yang dapat dinilai capaiannya di triwulan 1 tahun 2025 dengan predikat Baik.

MONELAKU menjadi inovasi penggerak / motor akuntabilitas, terhadap individu yang mendukung pencapaian kinerja organisasi diberikan apresiasi melalui **Inovasi BINTANG KINERJA**



**INOVASI
BINTANG KINERJA**



Pemberian
Reward and
Punishment
Kinerja
tingkat
individu

Highlight Kinerja

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

JULI - AGUSTUS 2025



BBPOM PALANGKA RAYA TINGKATKAN LAYANAN TANPA BATAS DENGAN LAUNCHING SMART LAURA DI KABUPATEN BARITO SELATAN



Palangka Raya – Senin, 14 Juli 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya kini hadir di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan melalui Launching SMART LAURA di Kabupaten Barito Selatan. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Ali Yudhi melakukan kunjungan dan audiensi kepada Kepala Dinas DPMPSTP Barito Selatan Ripatliha, SE., MM. melalui kunjungan ini Ali Yudhi memperkenalkan inovasi pelayanan publik Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu SMART Laura. Hadirnya SMART Laura ini sebagai komitmen BBPOM di Palangka Raya untuk selalu memberikan layanan tanpa jarak dan waktu.



KOLABORASI BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BERSAMA DISDAGPERIN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AWASI KEAMANAN PANGAN DAN EDUKASI MASYARAKAT



Palangka Raya – Dalam upaya memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, Balai Besar POM di Palangka Raya berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan terpadu. Kegiatan dilaksanakan pada 2 Agustus 2025 yang bertempat di Huma Betang Car Free Night Kota Palangka Raya.



ANAK CERDAS DENGAN KONSUMSI PANGAN AMAN, BBPOM PALANGKA RAYA DAN DPKP KOTA PALANGKA RAYA LAKUKAN SOSIALISASI PANGAN B2SA DI SDN 3 TANJUNG PINANG



Palangka Raya – BBPOM Palangka Raya bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palangka Raya melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan sebagai upaya meningkatkan kesadaran anak usia sekolah dalam cerdas memilih dan mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Generasi Emas melalui konsumsi pangan yang aman. Bertempat di SDN 3 Tanjung Pinang pada Selasa, 5 Agustus 2025. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SDN 3 Tanjung Pinang, Lilie Resin.

Highlight Kinerja

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor AGUSTUS 2025



BERSAMA PKK, BBPOM PALANGKA RAYA DORONG KADER JADI PELOPOR PANGAN AMAN DAN UMKM BERDAYA SAING



Palangka Raya – Sebagai hasil sinergi antara Balai Besar POM di Palangka Raya, Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya, dan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya yang berfokus pada dua sasaran utama, yaitu menjamin keamanan pangan masyarakat serta mendukung pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) telah sepakat dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Puluhan kader PKK Kota Palangka Raya resmi mengikuti rangkaian kegiatan (Bimtek) pada 7 Agustus 2025, bertempat di Aula Tjilik Riwut, Balai Besar POM di Palangka Raya.



KOLABORASI STRATEGIS BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, SERTA TP PKK KOTA PALANGKA RAYA DORONG KEAMANAN PANGAN DAN B2SA DI SEKOLAH



Palangka Raya – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), Balai Besar POM di Palangka Raya berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta TP PKK Kota Palangka Raya menggelar Sosialisasi Keamanan Pangan dan B2SA. Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 di SDN 1 Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya, dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi sekolah tersebut. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya beragam dan bergizi, tetapi juga aman dan bebas dari bahan berbahaya.



BPOM & PKK KOTA PALANGKA RAYA : SUKSES KADER PKK PALANGKA RAYA KANTONGI LEGALITAS PRODUK MELALUI BIMTEK PKP



Palangka Raya – Rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) bagi Kader PKK Kota Palangka Raya resmi ditutup pada Selasa (26/08/2025) di Aula Rumah Jabatan Walikota. Acara yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya yang bekerjasama dengan BBPOM di Palangka Raya ini berhasil mencetak output nyata berupa 6 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 3 Izin Edar PIRT (SPPIRT), serta pembuatan label untuk 37 peserta.

Highlight Kinerja

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

AGUSTUS - SEPTEMBER 2025



**PEMBAHASAN DRAFT SURAT EDARAN
PENGENDALIAN ANTIBIOTIK DENGAN
ORGANISASI PROFESI IAI, IDI, PAFI, IBI, & PPNI**



Palangka Raya – Sebagai langkah nyata pengendalian resistensi antimikroba, Balai Besar POM di Palangka Raya mendorong terbitnya surat edaran gubernur Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Peredaran Antibiotik. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah rapat pembahasan draft Surat Edaran tersebut. Untuk itu, pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2025 bertempat di aula Tjilik Riwut Kantor BBPOM di Palangka Raya, dilakukan rapat pembahasan bersama organisasi profesi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BBPOM di Palangka Raya Ali Yudhi Hartanto. Pada kesempatan ini, Ali Yudhi Hartanto menyampaikan bahwa jika AMR tidak dikendalikan secara nyata maka akan menjadi "silent killer" untuk penderita penyakit infeksi.



**BBPOM PALANGKA RAYA DAN POLTEKKES PALANGKA RAYA RESMIKAN
KERJASAMA STRATEGIS MELALUI PENANDATANGANAN MOU**



Palangka Raya, 27 Agustus 2025 — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Palangka Raya dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Palangkaraya secara resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di kampus Poltekkes Palangkaraya. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Balai Besar POM Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto, SF., Apt., M.M., dan Direktur Poltekkes Palangkaraya, H. Mars Khendra Kusrayadi, S.T.P., M.P.H.



**SINERGI BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BERSAMA DINAS KESEHATAN
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH KERJA
BBPOM DI PALANGKA RAYA SERTA PELAKU USAHA OBAT BAHAN ALAM JAMU**



Palangka Raya – Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkuatan Pengawasan Obat Bahan Alam mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) telah dilaksanakan pada Senin (01/09/2025) secara daring melalui zoom meeting. Acara yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya ini dihadiri oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam Jamu wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Highlight Kinerja

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

SEPTEMBER 2025



GANDENG DERMATOLOGIST DAN SKIN EXPERT DALAM WEBINAR KIE KOSMETIK, BBPOM DI PALANGKA RAYA TINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KOSMETIK



BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu UPT Badan POM yang bertanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk didalamnya Kosmetika, menyelenggarakan kegiatan Webinar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan (KIE) Kosmetik kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 03 September 2025 secara daring (online) melalui Zoom Meeting dan Streaming Youtube. Dengan mengangkat tema "Cerdas memilih Kosmetik: Kenali Kebutuhan Kulitmu, Pilih Kosmetik Aman", BBPOM di Palangka Raya menghadirkan 2 (dua) narasumber yakni, dari Dermatologist dan Skin Expert Dr. dr. Fitria Agustina, Sp.DVE, FINS DV, FAADV dan Direktur Pengawasan Kosmetik Badan POM RI, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.



SOFT LAUNCHING E-LEARNING BETANG AKZI, BBPOM PALANGKA RAYA LAKUKAN PELATIHAN KEAMANAN PANGAN SIAP SAJI BAGI SPPG PANARUNG



Palangka Raya - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), Balai Besar POM di Palangka Raya berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta TP PKK Kota Palangka Raya menggelar Sosialisasi Keamanan Pangan dan B2SA. Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 di SDN 1 Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya, dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi sekolah tersebut. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya beragam dan bergizi, tetapi juga aman dan bebas dari bahan berbahaya.



BBPOM DI PALANGKA RAYA MENERIMA VISITASI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI KALIMANTAN TENGAH



Palangka Raya - Bertempat di Aula BBPOM di Palangka Raya pada Selasa, 23 September 2025 BBPOM Palangka Raya menerima Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	15
DAFTAR TABEL	17
BAB I Pendahuluan	19
1.2 Gambaran Umum Organisasi	19
BAB II Perencanaan Kinerja	31
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	31
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	33
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	39
2.5 Metode Pengukuran	47
BAB III Akuntabilitas Kinerja	52
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	52
3.2 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi	192
3.3 Realisasi Anggaran	206
BAB IV Penutup	225
Lampiran	230



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum Organisasi	19
Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya	21
Gambar 3. Visi dan Misi Badan POM RI Tahun 2025-2029	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Beban Kerja	22
Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya	32
Tabel 3 Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2024	34
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2023	36
Tabel 5 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Tahun 2024 Triwulan III.....	223

BAB

1



Pendahuluan

- Latar Belakang
- Gambaran Umum Organisasi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I / Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu tujuan pembuatan Laporan Kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja memiliki manfaat diantaranya menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, objektif, akurat, dan transparan.

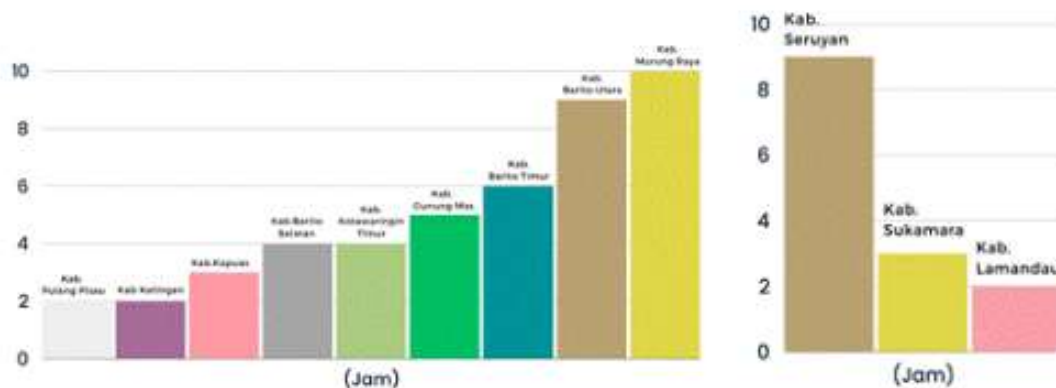
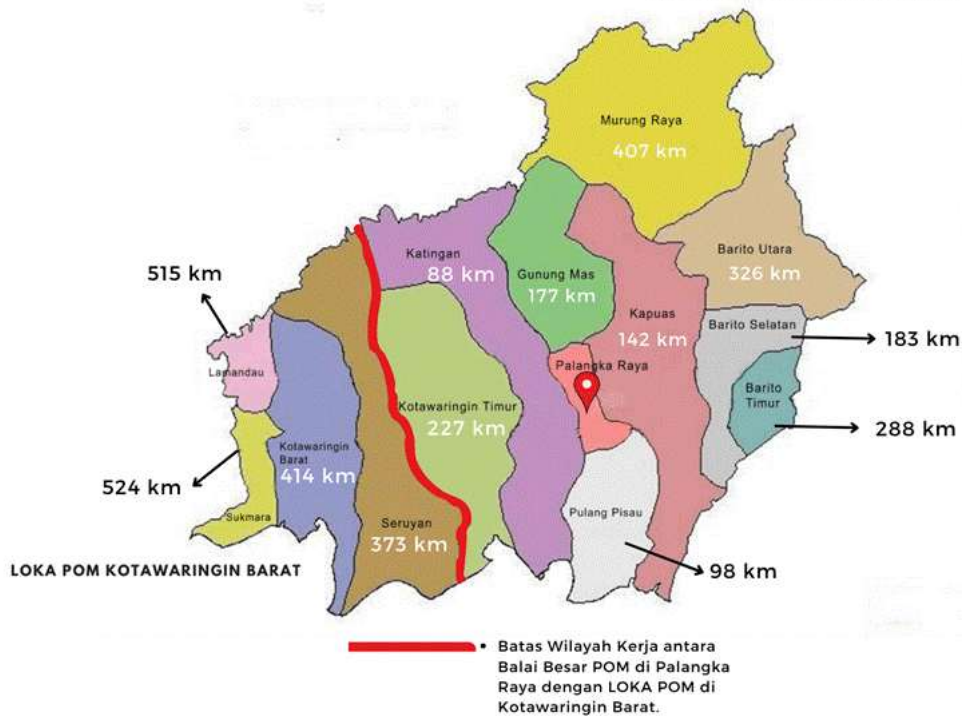
1.2 Gambaran Umum Organisasi

BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut jumlah UPT BPOM terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, dan 23 (dua puluh tiga) Loka POM.

Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

- a. BBPOM di Palangka raya dengan cakupan pengawasan 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur
- b. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan cakupan pengawasan 4 kabupaten/kota, yaitu

BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA



Sebagai UPT BPOM, BBPOM di Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan PerMenPAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PerMenPAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala BBPOM di Palangka Raya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 11 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Palangka Raya yang mengawal pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada kepala UPT.

1.4 Isu Strategis

I. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah SDM belum memadai

SDM Balai Besar POM di Palangka Raya sampai dengan September 2025 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang ASN yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang PNS dan 15 (tujuh) orang PPPK serta 15 (lima belas) orang PPNP untuk memenuhi beban kerja 93 orang yang baru terpenuhi sebesar 72.04% dengan proporsi 50.75% perempuan dan 49.25% laki-laki. Jumlah SDM tersebut tentunya belum memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

ABK BBPOM di Palangka Raya berdasarkan SIREN (September, 2025)					
No	Jabatan	Eksisting	ABK	GAP	Pemenuhan ABK
1	Struktural	2	2	0	100
2	Fungsional Ketatausahaan	9	31	-9	29.03
3	Fungsional PFM	42	60	-18	70.00
4	Fungsional Umum	13	0	-	-
5	Tubel (selesai Februari 2026)	1	0	-	-
		67	93	-26	72.04

Berdasarkan analisa beban kerja, untuk mendukung upaya penguatan tugas pokok dan fungsi, BBPOM di Palangka Raya memerlukan SDM sebanyak 93 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 26 orang. Perhitungan pemenuhan ABK 72.04% didapat dari pemenuhan ABK Struktural 100%, Fungsional Ketatausahaan 29.03% dan Fungsional PFM 70,00%. Selama 3 tahun ke depan, jumlah pegawai fungsi ketatausahaan akan berkurang sebanyak 5 orang. Pada tahun 2025, dari 67 orang pegawai, didukung 15 orang PPNP (22.39%). Dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh fungsi ketatausahaan banyak dirangkap oleh personil yang ada pada fungsi-fungsi diluar jabatan fungsionalnya. Hal ini menimbulkan masalah kesehatan mental pegawai akibat beban kinerja. Pada fungsi teknis pengawasan obat dan makanan, pemenuhan ABK rata-rata berkisar 48.78% sampai dengan 53.85%, terendah pada fungsi pengujian dan tertinggi pada fungsi Infokom.

Selain jumlah pegawai, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Tingkat Pendidikan sebagian besar pegawai BBPOM di Palangka Raya adalah S1 dan Profesi (apoteker). Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai organisasi yang scientific based perlu lebih banyak didukung SDM dengan Pendidikan S2 yang lebih banyak dari yang ada saat ini. Pemenuhan pendidikan S2 dapat dilakukan melalui tubel lepas jabatan atau ijin belajar sambil bekerja dengan pilihan perguruan tinggi yang sangat terbatas, hanya terdapat pilihan Universitas Terbuka. Secara umum capaian kompetensi mansoskul pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Palangka Raya 43.64% optimal, 36.36% kurang optimal dan 20.00% masih kurang optimal, capaian

kompetensi teknis fungsi PFM 26.32% optimal, 21.05% cukup optimal dan 52.63% kurang optimal. Dengan jumlah dan kompetensi SDM yang terbatas diperlukan upaya besar untuk mengisi baik dari sisi jumlah maupun kompetensi untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks. Dengan peningkatan SDM, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi diharapkan Balai Besar POM di Palangka Raya akan mampu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks dengan semakin berkembang dan beragamnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

II. Sumber Daya Anggaran

a. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai salah satu implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM melaksanakan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dimana telah memasuki tahun kelima sejak pengalokasian perdannya di tahun 2020. Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional dan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha pada sarana pelayanan kefarmasian serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman.

DAK NF BPOM tahun 2024 diberikan kepada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang pengawalannya dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Adapun anggaran DAK ini dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana.

b. DIPA Balai Besar POM di Palangka Raya

Anggaran BBPOM di Palangka Raya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 Nomor: SP.DIPA-063.01.2.432872/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp 22.128.308.000,- pada awal tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp 8.093.017.000,- Sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp 3.194.209.000,- sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp 4.898.808.000,- dan pada bulan Juli terdapat revisi pada pagu BBPOM Palangka Raya yaitu pengurangan belanja pegawai dan penambahan biaya operasional sehingga pagu anggaran yang dikelola menjadi 21.587.291.000,- dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu
1	51	4,984,129,000	0
2	52	10,699,694,000	3,513,340,000
3	53	5,903,468,000	1,385,468,000
TOTAL		21,587,291,000	4,898,808,000

Anggaran Responsif Gender (ARG merupakan anggaran yang memperhitungkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran Responsif Gender bukanlah suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, namun lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran, baik dalam proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan.

Bila sebelumnya telah dikenal istilah anggaran berbasis kinerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Anggaran berbasis kinerja memiliki tiga nilai inti yakni Efficiency, Effectiveness dan Economy. Anggaran Responsif Gender melengkapi satu nilai inti lagi, yakni Equity. Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi anggapan yang kurang tepat, jika: ARG adalah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; ARG berarti alokasi anggaran 50% laki-laki dan 50% perempuan; adanya ARG berarti adanya penambahan anggaran yang dikhususkan untuk perempuan dan ARG hanya untuk kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.

III. Mesin/Perlengkapan

a. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan obat dan makanan khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki peran yang sangat strategis terutama untuk menjamin mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat melalui pengujian secara kimia maupun mikrobiologi. Respon cepat dalam menindaklanjuti ditemukannya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat seperti dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang terkait lainnya sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas laboratorium dalam melakukan proses pengujian sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu (ilegal).

Balai Besar POM di Palangka Raya berupaya meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas pengujian baik dari sisi infrastruktur terkait pemenuhan standar peralatan laboratorium, standar kompetensi SDM penguji serta pengembangan metode analisa melalui pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan adanya upaya tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya jenis pengujian serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini Balai Besar POM di Palangka Raya telah didukung dengan instrumen laboratorium teknologi kompleks seperti, GCMS dan *real time* PCR serta secara berkelanjutan melaksanakan program pengembangan kompetensi personil dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan teknis pengujian baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selain itu perencanaan kegiatan verifikasi metode analisa yang

bertujuan untuk memastikan bahwa suatu metode analisis yang sudah divalidasi sebelumnya dapat digunakan dengan andal di laboratorium pengujian BBPOM di Palangka Raya telah rutin di jadwalkan setiap tahunnya untuk memenuhi standar Ruang Lingkup pengujian.

Dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan semakin pesatnya industri obat dan makanan, membawa perubahan yang cepat dan signifikan, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengatasi perubahan tersebut. Tantangan pengujian yang semakin kompleks berkaitan dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan digitalisasi perdagangan memerlukan adaptasi dengan lingkungan strategis terkait kompetensi, ruang lingkup pengawasan dan ketersediaan sarana dan prasarana dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas pengujian.

Keterbatasan dalam anggaran pengadaan alat laboratorium serta kebutuhan reagensia dan media yang diperlukan dalam proses pengujian menimbulkan gagasan konsep regionalisasi laboratorium. Regionalisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Laboratorium pengujian Badan POM. Melalui konsep regionalisasi BBPOM di Palangka Raya telah dilengkapi dengan instrumen mutakhir untuk mendukung pengujian parameter uji spesifik seperti LCMSMS dan GCMS, namun seiring dengan berubahnya konsep regionalisasi dengan penggolongan laboratorium menjadi beberapa tingkat atau tier berdampak pada pemindahan alat LCMSMS ke laboratorium balai unggulan yaitu BBPOM di Samarinda dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian.

IV. Metode

a. Konsep Regionalisasi Laboratorium

Fungsi pengujian dalam pengawasan obat dan makanan menjadi salah satu pilar utama BPOM dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan dimana hasil pengujian laboratorium menjadi landasan ilmiah bagi pengambilan keputusan atas produk dibawah pengawasannya. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan maka sejak tahun 2022 telah diterapkan sistem Regionalisasi Laboratorium yang kemudian disempurnakan pada tahun 2023 dengan konsep baru regionalisasi laboratorium.

Proses perubahan konsep regionalisasi dilakukan pada pertengahan pada tahun 2023 antara lain dengan pemindahan peralatan canggih yang selama ini tersebar ke Laboratorium Regional antara lain LCMSMS, DUSA, dan Isolator; peningkatan kompetensi dan jumlah analis sesuai beban kerjanya. Dengan perubahan menjadi Konsep baru Regionalisasi Laboratorium diharapkan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian dalam rangka pengawasan Obat dan makanan di seluruh pelosok negeri.

Pada konsep baru Regionalisasi ini dilakukan pemusatan pengujian unggul di salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional pada setiap region. Terdapat total 8 (delapan) Laboratorium Regional yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap menjadi laboratorium dengan peralatan yang canggih dan menjadi rujukan bagi laboratorium anggota dalam region tersebut. Laboratorium Regional tersebut adalah : Laboratorium di BBPOM Medan, BBPOM Pekanbaru, BBPOM Semarang, BBPOM

Samarinda, BBPOM Manado, BBPOM Makasar, BBPOM Surabaya dan terakhir adalah BBPOM di Jayapura. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya penyempurnaan konsep regionalisasi ini maka penajaman perencanaan pengujian dan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dapat dicapai.

V. Lingkungan

Green Laboratory atau Laboratorium Hijau merupakan sebuah konsep revolusioner dalam pengelolaan fasilitas laboratorium yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dengan praktik laboratorium modern. Konsep ini tidak sekadar tentang pengurangan dampak lingkungan, tetapi merupakan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aktivitas laboratorium. Dalam implementasinya, Laboratorium Hijau mengedepankan tiga pilar utama, yaitu: (1) efisiensi penggunaan sumber daya, (2) minimalisasi dampak lingkungan, dan (3) penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Laboratorium mengkonsumsi energi besar dan menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan, dengan jejak karbon lima kali lebih besar dibanding ruang kantor biasa. BPOM dalam upaya penerapan laboratorium hijau telah mengeluarkan pedoman berupa Buku Saku Pedoman Laboratorium Hijau yang disusun oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) pada tahun 2024. Pedoman ini mengatur upaya dalam melakukan pendekatan holistik, mencakup efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas udara. Selain mengurangi dampak lingkungan, konsep ini juga menghemat biaya operasional, meningkatkan kesehatan kerja, dan menciptakan lingkungan yang produktif.

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi pondasi utama dalam konsep Laboratorium Hijau dimulai dari manajemen energi yang cerdas, di mana setiap aspek penggunaan energi direncanakan dan dikelola secara optimal. Sistem pencahayaan ruangan dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami melalui desain arsitektur yang tepat, dan dikombinasikan dengan penggunaan lampu LED hemat energi yang dilengkapi sensor gerak. Zonasi pencahayaan diterapkan berdasarkan kebutuhan spesifik setiap area kerja, dengan sistem kontrol otomatis berbasis waktu dan okupansi yang memastikan energi hanya digunakan saat diperlukan.

Pengelolaan suhu ruangan menjadi aspek kritis lainnya dalam efisiensi energi. Laboratorium Hijau mengimplementasikan sistem HVAC dengan teknologi inverter yang dapat menyesuaikan penggunaan energi sesuai kebutuhan. Pengaturan suhu dilakukan secara optimal untuk berbagai area laboratorium, didukung oleh sistem insulasi yang efektif dan pemantauan suhu otomatis. Peralatan laboratorium dipilih dengan mempertimbangkan sertifikasi hemat energi, dan penggunaannya dijadwalkan untuk menghindari beban puncak. Program pemeliharaan preventif dilaksanakan secara rutin untuk menjaga efisiensi operasional peralatan.

Konservasi air menjadi fokus penting berikutnya dalam konsep Laboratorium Hijau. Implementasinya mencakup instalasi sistem daur ulang air, teknologi pengolahan air limbah yang efektif, dan sistem pemanenan air hujan. Praktik hemat air diterapkan dalam setiap aktivitas laboratorium, mulai dari prosedur pembersihan peralatan yang efisien hingga penggunaan air destilasi secara bijak. Program deteksi dan perbaikan kebocoran dilakukan secara rutin, didukung dengan pelatihan staf tentang pentingnya konservasi air.

Pengelolaan material dalam Laboratorium Hijau dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Sistem tracking digital untuk bahan kimia memungkinkan optimalisasi pemesanan dan penyimpanan, menghindari pemborosan akibat kadaluarsa atau kerusakan. Pemilihan bahan kimia ramah lingkungan menjadi prioritas, dengan prosedur penanganan material yang efisien untuk meminimalkan risiko pencemaran. Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diterapkan secara konsisten, didukung dengan sistem pemisahan dan pengolahan limbah yang terpadu.

Minimalisasi dampak lingkungan menjadi pilar kedua yang tak kalah pentingnya. Pengendalian polusi dilakukan melalui sistem ventilasi dengan filter efisiensi tinggi dan pemantauan kualitas udara secara berkala. Penggunaan bahan kimia dengan *Volatile Organic Compound* (VOC) rendah dan sistem penangkapan gas buang yang efektif memastikan kualitas udara tetap terjaga.

Pengurangan dampak lingkungan menjadi fokus utama dengan mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan dalam operasional laboratorium. Ini meliputi penggunaan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan, pengolahan limbah yang tepat, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penerapan sistem manajemen limbah yang efektif. Laboratorium juga menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan material dan menggunakan teknologi yang lebih bersih dalam proses pengujian.

Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui sistem pengolahan mandiri dengan pemisahan saluran berdasarkan karakteristik limbah. Program monitoring kualitas effluent dilaksanakan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Perlindungan ekosistem menjadi aspek integral dalam Laboratorium Hijau. Program penanaman vegetasi di area laboratorium tidak hanya berkontribusi pada estetika, tetapi juga mendukung biodiversitas lokal. Pemilihan tanaman adaptif dan penciptaan habitat mikro menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Optimalisasi penggunaan lahan dan pencegahan erosi dilakukan melalui manajemen air limpasan yang efektif dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Mitigasi perubahan iklim mendapat perhatian khusus melalui program pengurangan emisi gas rumah kaca. Perhitungan dan monitoring jejak karbon dilakukan secara sistematis, didukung dengan program efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Optimalisasi transportasi dan logistik turut berkontribusi pada pengurangan emisi. Adaptasi terhadap perubahan iklim diwujudkan melalui desain

bangunan yang tangguh, sistem drainase berkelanjutan, dan program tanggap darurat yang komprehensif.

Penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan menjadi pilar ketiga yang mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan produktivitas. Kualitas udara dalam ruangan dijaga melalui sistem ventilasi yang adequate dengan pemantauan parameter *Indoor Air Quality* (IAQ) secara rutin. Aspek ergonomi diperhatikan melalui desain stasiun kerja yang nyaman dan pencahayaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Sistem keselamatan kerja diterapkan secara komprehensif, meliputi deteksi bahaya, peralatan pelindung diri, dan prosedur tanggap darurat.

Produktivitas dan kenyamanan kerja ditingkatkan melalui desain ruang yang mendukung alur kerja efisien. Optimalisasi pencahayaan alami dan zonasi berdasarkan fungsi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kenyamanan termal dijaga melalui sistem pengkondisian udara yang optimal dan pemantauan kondisi ruangan secara berkala. Aksesibilitas menjadi perhatian penting, dengan sirkulasi yang efisien dan fasilitas yang ramah difabel. Keberlanjutan operasional didukung oleh sistem manajemen yang kuat, meliputi kebijakan laboratorium hijau, prosedur operasional standar, dan program audit internal.

Pengembangan SDM dilakukan secara berkelanjutan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan. Inovasi dan perbaikan terus didorong melalui program riset dan pengembangan, serta adopsi teknologi baru yang relevan. Integrasi dengan sistem yang lebih luas menjadi aspek penting dalam konsep Laboratorium Hijau. Keterlibatan pemangku kepentingan diwujudkan melalui program edukasi dan sosialisasi, serta kerjasama dengan institusi pendidikan. Dampak sosial diperhatikan melalui penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat lokal.

Aspek ekonomi dikelola melalui efisiensi biaya operasional dan optimalisasi penggunaan sumber daya, menciptakan nilai tambah bagi institusi. Implementasi konsep Laboratorium Hijau dilakukan secara terencana dan terukur. Tahap perencanaan meliputi penetapan target dan indikator, penyusunan roadmap, dan alokasi sumber daya yang tepat. Pelaksanaan program diawali dengan pilot project, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator kuantitatif seperti konsumsi energi dan air, serta indikator kualitatif seperti kepuasan pengguna dan kualitas lingkungan kerja.

Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan ditunjukkan melalui pengembangan dan implementasi kebijakan lingkungan yang komprehensif. Laboratorium mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk penggunaan energi terbarukan, konservasi air, pengurangan limbah, serta edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan bagi seluruh personel. Program-program inovatif untuk mendukung keberlanjutan terus dikembangkan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Penerapan konsep laboratorium hijau di BBPOM di Palangka Raya mengutamakan pembudayaan perilaku konservasi energi melalui penerapan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan *Green Life Promotion*. Penerapan ini diwujudkan melalui inovasi antara lain:

1. Inovasi CEKLIS yaitu inovasi yang dilatarbelakangi peningkatan tagihan pembayaran listrik sehingga dilakukan pemeliharaan jaringan listrik dan pengelolaan penggunaan listrik dengan pengecekan alat listrik maupun penerangan dan pendingin ruangan yang tidak digunakan.
2. Inovasi SINERGI (Senandung Hemat Energi dan e-Presensi) yaitu inovasi penghematan energi listrik dan air dengan menggunakan media audio berupa lagu, pantun dan narasi yang diperdengarkan sesaat sebelum jam kerja berakhir untuk mengingatkan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan alat listrik dan air.
3. Inovasi Bank Sampah yaitu inovasi pengumpulan sampah plastik berupa botol minum, plastik kemasan atau plastik bekas pada wadah yang telah disediakan.
4. Inovasi BE SMMILE UP yaitu inovasi digitalisasi laboratorium yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber daya kertas, tinta dan alat tulis kantor (ATK) melalui pembuatan dokumen secara online yang berdampak pada penghematan anggaran pembelian ATK.

Penerapan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*), diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut:

1. Reduce yaitu penghematan energi listrik dan air melalui
 - Penggunaan lampu hemat energi pada area laboratorium
 - Penggunaan alat elektronik hemat energi dengan penandaan stiker hemat energi seperti pada alat pendingin ruangan /air conditioner (AC) dan kulkas
2. Reuse yaitu pemanfaatan kembali material antara lain
 - Pemanfaatan air yang berasal dari pendingin ruangan yang dimanfaatkan untuk kegiatan kebersihan maupun perawatan tanaman
 - Pemanfaatan botol bekas reagen sebagai wadah penampungan limbah
 - Regenerasi kolom untuk memperbaiki kondisi kolom yang digunakan untuk pengujian menggunakan HPLC
3. Recycle
 - Pembuatan bak sampah yang berasal dari bekas map yang tidak terpakai diolah menjadi bak sampah
 - Pembuatan kantong silica gel dari jas laboratorium yang tidak terpakai

Penerapan konsep laboratorium hijau di BBPOM di Palangka Raya diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus memberikan dampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Perilaku hemat energi telah menjadi budaya yang melekat dalam diri seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya dan dapat terus diterapkan tidak hanya di lingkungan kerja namun juga di lingkungan sehari-hari.

BAB

2



Perencanaan Kinerja

- Uraian Singkat Renstra
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- Metode Pengukuran

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Visi & Misi Badan POM RI Tahun 2025-2029

“ Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ”

Visi

Misi

- “**
- Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa;
 - Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- ”**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, BBPOM di Palangka Raya menyusun Renstra 2025-2029 sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan.

Renstra BBPOM di Palangka Raya 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Palangka Raya bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Renstra 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari periode Renstra tahun 2020-2024, yang telah menjadi landasan bagi BBPOM di Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Renstra disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029, visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih dari itu, BBPOM di Palangka Raya berkomitmen untuk menyelaraskan perencanaan strategis ini dengan delapan misi utama (Asta Cita) yang dicanangkan oleh Presiden pada sektor kesehatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta akan dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. RKT tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya ditetapkan tanggal 20 September 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26 %
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 %
4	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	kerja UPT		
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96.02
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	87 %
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.18
		Nilai AKIP UPT BPOM	85.77
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91.30
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.4

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja sesuai Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025- 2029 serta alokasi anggaran sesuai DIPA BBPOM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 22.128.308.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang akan diwujudkan pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 12.026.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 10.102.234.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	03 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8
		03 - Jumlah desa pangan aman	3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82.8 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.87
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Sesuai Nota Dinas NOMOR : PR.07.2.08.25.451 dari Sekretaris Utama Badan POM perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 tanggal 14 Agustus 2025, sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Pada tanggal 29 Agustus 2025 revisi PK BBPOM Palangka Raya telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 12.026.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 9.561.217.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 Jumlah sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Jumlah desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah pasar

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.1 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.87 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Dalam revisi ini terdapat penambahan 3 Indikator baru yaitu:

- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Perubahan target untuk 8 Indikator kinerja yaitu:

- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Revisi target semula 87,25 menjadi 89,75.
- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Revisi target semula 85 menjadi 90.
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
Revisi target semula Akumulatif menjadi Flat di 84 sesuai perubahan manual indikator kinerjanya.
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Revisi target semula 87 menjadi 92.
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Revisi target semula 73,88 menjadi 96.88.
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Revisi target semula 80 menjadi 85.
- Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
Revisi target semula 88 menjadi 92.4.

- h) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
Revisi target tahunan semula 82,8 menjadi 14,1 akibat perubahan manual indikator kinerjanya.

Serta pengurangan 1 sasaran kegiatan yaitu Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT yang indiaktornya digabung ke sasaran kegiatan Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun berdasarkan PK dan memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-Performance dan Evaluasi Internal untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Berikut RAPK Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2025.

Pada tanggal 22 Mei 2025 dengan nomor surat B-PR.07.01.16A.05.25.368 perihal Usulan Revisi RAPK BBPOM di Palangka Raya mengusulkan revisi target RAPK untuk dua Indikator Kinerja yaitu, Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Dan telah disetujui ditanggapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM dengan surat no B-PR.07.21.06.25.179 tanggal 04 Juni 2025 sehingga per 12 Juni 2025 RAPK BBPOM di Palangka Raya menjadi sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	768.855.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41.950.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204.620.000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37.842.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204.620.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80	82	84	51.722.500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10.344.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10.344.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	163.552.750

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	163.552.750
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	23.290.000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.208.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69,5	69,5	69,5	71	71	71	72	72	72	72,5	7.479.574.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2	272.628.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	90	8	344.372.000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501.455.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137.071.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	8,5	19	31,7	47	61	73	78	87	91	92	82,8	43.762.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	28	33,3	33,3	38	51	61	71	85	96	358.335.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72.439.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	145.537.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,8	9.001.834.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83,9	83.990.550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.867.427.650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134.981.300
Total															22.128.308.000

Akibat perubahan Perjanjian Kinerja (PK) maka Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Palangka Raya pun mengalami revisi menjadi sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	87.25	87.25	87.25	87.25	87.25	87.25	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	718,855,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	216,978,900

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,837,800
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	216,978,900
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	84	84	84	84	84	6,117,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	92	92	92	92	92	7,285,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7,285,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	73.88	73.88	73.88	73.88	73.88	73.88	96.88	96.88	96.88	96.88	96.88	137,499,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	179,829,000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	21,230,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	21,230,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	42,329,250
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.5	69.5	69.5	71	71	71	72	72	72	72.5	7,479,574,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	25,286,400
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,208,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	272,628,000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	90	8	344,372,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501,455,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137,071,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	8.5	19	31.67	47	61	73	78	87	91	92	14.1	43,762,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	33.33	33.33	38	51	61	71	85	95	96	358,335,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72,439,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	145,537,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.83	5,960,126,550
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.87	562,111,700

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,420,530,350
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	604,448,400
Total															21,587,291,000

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai manual indikator kinerja, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM nomor: PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
 - 1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
 - 2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.
- b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Untuk mengukur capaian periodik dari Kinerja Organisasi dilakukan dengan menjumlahkan Indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi dan dibagi dengan Indikator kinerja yang terdapat target pada periode tersebut. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))						$\frac{518,41\%}{5}$ =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.

- b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e- Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - i. valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - ii. reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- e. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

BBPOM di Palangka Raya mengatur penanggung jawab pengumpulan data dalam rangka mendukung pengukuran dan pelaporan data yang akuntabel dalam Surat Keputusan Pembentukan TIM Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025 dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Susunan Tim SAKIP terdiri dari: Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua I (perencanaan dan pengukuran), Ketua II (evaluasi internal), Ketua III (Laporan Kinerja), Ketua IV (Laporan Tahunan), Sekretaris, Anggota I (perencana target dan penyusun analisis capaian kinerja), Anggota II (mereviu analisis capaian kinerja), Anggota III (operator RHPK), dan Anggota IV (sekretariat tim laporan).
2. Tugas Pengarah (Kepala Balai): memberikan arahan pelaksanaan SAKIP dan memimpin rapat SAKIP.
3. Tugas Penanggung Jawab: bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SAKIP dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai.
4. Tugas Ketua I (perencanaan dan pengukuran): mengkoordinir penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja sesuai pedoman, memastikan perencanaan kinerja menantang, dapat dicapai, dan realistis, mensosialisasikan manual IKU, memastikan data kinerja tertelusur dan andal, serta memastikan anggota tim mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP.
5. Tugas Ketua II (evaluasi internal): mengkoordinir pelaksanaan evaluasi internal program dan kegiatan serta rencana aksi tindak lanjut sesuai pedoman, dan memastikan laporan evaluasi internal disusun sesuai pedoman dan tepat waktu.
6. Tugas Ketua III (Laporan Kinerja): mengkoordinir penyusunan laporan kinerja sesuai pedoman dan memastikan pengiriman laporan kinerja interim dan tahunan tepat waktu.
7. Tugas Ketua IV (Laporan Tahunan): mengkoordinir penyusunan laporan tahunan sesuai pedoman dan memastikan pengirimannya tepat waktu.
8. Tugas Sekretaris: bertanggung jawab atas data kinerja, membuat format database, verifikasi dan mengolah data kinerja, menginput data kinerja dan analisis kendala pada aplikasi monev BPOM, serta menyediakan data kinerja untuk penyusunan laporan.
9. Tugas Anggota I (perencana target dan penyusun analisa capaian kinerja): verifikasi data output dan kinerja sebelum input RHPK, reviu capaian output dan indikator kinerja, menyusun rencana target indikator kinerja tahunan dan turunannya, melakukan evaluasi

- dan menyusun analisis (pelaksanaan kegiatan dan anggaran, capaian output dan indikator kinerja, identifikasi kendala, rekomendasi rencana aksi tindak lanjut) untuk berbagai laporan, serta menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut.
10. Tugas Anggota II (mereview analisis capaian kinerja): mereview dan menganalisis Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja, dan input data Simetris, serta mereview analisis Anggota I dalam Laporan Kinerja per Bab.
 11. Tugas Anggota III (operator RHPK): mengumpulkan dan mengolah data kinerja dari pelaksana kegiatan, melakukan input data pada RHPK, serta mengumpulkan dan mengkompilasi analisis untuk Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja.
 12. Tugas Anggota IV (sekretariat tim laporan): mengumpulkan dan mengkompilasi analisis capaian kinerja yang telah diverifikasi dan direview, memastikan kesesuaian data kinerja dan kriteria, menyunting, mengolah, dan menyusun laporan kinerja interim dan tahunan, membuat desain tampilan laporan yang mudah dimengerti dan menarik, mempublikasikan dokumen SAKIP pada subsite BBPOM Palangka Raya tepat waktu, dan mengirimkan laporan kinerja ke esr.menpan.go.id, subsite BBPOM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan tepat waktu.
 13. Data kinerja output dan indikator digunakan untuk mengisi data monev stakeholder dan membuat laporan: RHPK BPOM, Monev Capaian Output SAKTI Kemenkeu, RAPK, E-performance SIMETRIS BPOM, BAPPENAS, evaluasi internal bulanan dan triwulanan, laporan kinerja interim dan UPT BPOM (triwulan), dan laporan kinerja tahunan.
 14. Pengisian data kinerja, pembuatan evaluasi capaian kinerja, dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu sesuai jenis laporan.
 15. Tim SAKIP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya.

BAB

3



Akuntabilitas Kinerja

- Capaian Kinerja Organisasi
- Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis
- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya
- Pemanfaatan Informasi Kinerja
- Realisasi anggaran

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Balai Besar POM di Palangka Raya di triwulan III tahun 2025 memiliki 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja akan diukur capaian kinerjanya. Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan melakukan pengukuran capaian per sasaran kegiatan dengan menghitung rata-rata capaian dalam sasaran kegiatan, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut pengukuran Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya triwulan III tahun 2025.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	98,09	109,29	109,29
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	Belum ada target bulan ini	
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93,94	104,38	104,38
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	100,00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,86	109,25	109,25
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	79,29	94,39	94,39
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70	108,70
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86,96	108,70	108,70
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88	96,59	99,70	99,70

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91,32	107,44	107,44
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,4	97,68	105,71	105,71
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91,92	101,01	101,01
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	Belum ada target bulan ini	
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72	75,5	104,86	104,86
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	Belum ada target bulan ini	
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00
3	Meningkatnya efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	93,06	106,73	106,73
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70	75	107,14	107,14
		Jumlah desa pangan aman	70	70	100,00	100,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	87	91,54	105,22	105,22
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	71	71,67	100,94	100,94
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	4,96	Belum ada target bulan ini	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	88,19	Belum ada target bulan ini	
		Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	Belum ada target bulan ini	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	Belum ada target bulan ini	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	Belum ada target bulan ini	
	Total Capaian PK					2073,47
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)					103,67
	Predikat NKO					Istimewa

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh NKO senilai 103,67% dari hasil rata-rata 20 Indikator kinerja yang dapat dinilai capaiannya di triwulan III tahun 2025 dengan predikat **Istimewa**. Berikut pembahasan capaian setiap Sasaran Kegiatan di Balai Besar POM di Palangka Raya di Triwulan III tahun 2025. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palangka Raya, sebagai berikut.



Sasaran Kegiatan

*Meningkatnya Efektivitas Pengawasan
Produk Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan di Wilayah Kerja UPT*

Sasaran Kegiatan I yaitu Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW III		1 Tahun	TW III	1 Tahun	TW III
1.	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	89.75	89.75	98.09	109.29	109.29	 Tercapai	Sangat Baik
2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
3.	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90	90	93.94	104.38	104.38	 Tercapai	Sangat Baik
4.	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	 Akan Tercapai	Baik
5.	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	85	92.86	109.25	109.25	 Tercapai	Sangat Baik
6.	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	84	84	79.29	94.39	94.39	 Akan Tercapai	Baik
7.	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92	92	100	108.70	108.70	 Tercapai	Sangat Baik
8.	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80	86.96	108.70	108.70	 Tercapai	Sangat Baik

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW III		1 Tahun	TW III	1 Tahun	TW III
9.	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	96.88	96.88	96.59	99.70	99.70	 Akan Tercapai	Baik
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	85	85	91.32	107.44	107.44	 Tercapai	Sangat Baik
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	92.4	92.4	97.68	105.71	105.71	 Tercapai	Sangat Baik
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91	92.26	101.38	101.38	 Tercapai	Sangat Baik
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Belum ada target TW ini	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5	72	75.5	104.14	104.86	 Tercapai	Sangat Baik
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	-	-	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Belum ada target TW ini	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
Capaian Sasaran Kegiatan					104.42	104.48	Tercapai	Sangat Baik

Dalam menentukan capaian terhadap indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terdapat beberapa kriteria sebagai berikut :

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai kewajiban melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Berikut adalah perhitungan sehingga diperoleh persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	=	$\frac{A + B + C + D}{4}$
--	---	---------------------------

Unsur-unsur perhitungan :

- A** = Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
B = Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
C = Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
D = Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Komponen perhitungan “Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” untuk masing-masing komoditi berbeda, yaitu sebagai berikut:

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$

- Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
- Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
- Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)
- Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
- Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

- B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
- Pemenuhan target pengawasan
 - Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 - Kesesuaian parameter uji
 - Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
 - Tanggapan atas surat tindak lanjut
- C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
- Pemenuhan target pengawasan
 - Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 - Kesesuaian parameter uji
 - Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
 - Tanggapan atas surat tindak lanjut
- D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
- Pemenuhan target pengawasan
 - Kesesuaian pelaksanaan sampling
 - Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 - Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan
 - Tanggapan atas surat tindak lanjut

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75	98.09	109.29	Sangat Baik

Jumlah Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa sesuai standar merupakan faktor utama yang mendukung indikator kinerja ini. Pada triwulan III ini telah dilakukan sampling terhadap sediaan farmasi dengan total sejumlah 801 sampel adapun yang telah dilakukan pengujian sejumlah 623 sampel.

Perhitungan realisasi persentase sampling sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan tabel RHPK yang telah ditetapkan yang telah mengakomodir semua aspek penilaian masing-masing komoditas dari indikator ini, maka diperoleh realisasi persentase sampling sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,09%. Target indikator ini mengalami perubahan sebagaimana tertuang pada revisi PK-RAPK tahun 2025 yang ditetapkan pada bulan agustus dan digunakan dalam perhitungan capaian pada triwulan III dan IV, target semula 87,25% meningkat menjadi 89,75%. Perubahan target ini dimaksudkan untuk menjaga agar capaian kinerja pada kriteria sangat baik. Jika

realisasi triwulan III dibandingkan terhadap target triwulan III akan memperoleh angka capaian sebesar 109,29% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	100	116.41
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	87.25	90.38	103.59
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	89.75	98.09	109.29

Realisasi indikator kinerja pada triwulan III tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi di triwulan II sebesar 7,71%, dengan peningkatan capaian sebesar 5,7%. Realisasi capaian indikator kinerja di triwulan III lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi di triwulan II namun lebih rendah triwulan I. Jika dibandingkan dengan triwulan I, terlihat bahwa realisasi triwulan III mengalami penurunan sebesar 1,91% dengan penurunan capaian sebesar 7,12%. Namun demikian kriteria capaian di triwulan II sangat baik dibandingkan kriteria capaian di triwulan I. Hal ini disebabkan adanya perubahan target pada bulan Agustus yang semula 87,25% menjadi 89,75%.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75	98.09	109.29	 Tercapai/ Melampaui

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target kinerja tahunan menunjukkan capaian dengan kriteria tercapai/melampaui, yaitu sebesar 109,29%. Jika realisasi pelaksanaan sampling dan pengujian dapat terlaksana seperti yang direncanakan sebagaimana realisasi pada triwulan III, maka dapat dipastikan target tahunan akan tercapai/melampaui pada akhir tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pada triwulan III ini dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

- Adanya peningkatan target dari 87,25% menjadi 89,75% di triwulan III, hal ini menyebabkan capaian di triwulan III masih berada dalam rentang kriteria sangat baik (<110%).
- Telah dilakukan komunikasi dengan laboratorium terkait jumlah sampel yang tersedia di sarana yang bisa disampling sesuai dengan kategori sampling pada pedoman sampling.

- Telah dilakukan pengaturan tugas di tim sampling sehingga tidak terjadi overload pekerjaan dalam pelaksanaan sampling.
- Telah dilakukan komunikasi ke tim Pusdatin jika terdapat kendala SIPT.
- Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas sampling melalui pembelajaran mandiri IDEAS dan pendampingan oleh ketua tim kerja untuk memahami petunjuk teknis yang ada pada Pedoman Sampling terbaru supaya tidak salah kategori.
- Telah disusun perencanaan target jumlah dan kategori sampling setiap bulannya.
- Tidak ada keterlambatan dalam pengiriman sampel sehingga sampel yang sudah disampling bisa segera dilakukan pengujian.
- Telah dilakukan verifikasi metode terhadap metode analisa pengujian yang baru.
- Terhadap risiko utama di fungsi pengujian yaitu kesalahan dalam penarikan kesimpulan hasil uji, telah dilakukan pengendalian yang efektif melalui penerapan verifikasi berjenjang;

Rekomendasi penyempurnaan kinerja :

- Melaksanakan sampling di akhir bulan untuk target bulan berikutnya agar bisa masuk ke laboratorium di awal bulan.
- Melakukan pengujian sampel dan melaporkan melalui SIPT sesuai dengan timeline yang ditetapkan.
- Konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan yang telah disusun.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

1. Pelaksanaan sampling dilakukan pada saat melakukan inspeksi ke sarana.
2. Penetapan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian melibatkan seluruh pihak yang terkait. Rencana pelaksanaan sampling dan pengujian dibuat dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online oleh seluruh pihak terkait yang diberikan akses, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan.
3. Pengisian RHPK bersama sehingga dapat saling mengevaluasi antara petugas sampling dan petugas pengujian terhadap data yang disajikan. RHPK tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
4. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
5. Efektivitas dalam pencapaian target indikator kinerja sangat berpengaruh terhadap sasaran kegiatan, jika capaian indikator kinerja memenuhi target maka dapat disimpulkan jika efektivitas sasaran kegiatan meningkat.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,29	Rp. 538.424.000	Rp. 419.273.962	77,87	1,40	0,40	92% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien. Hal ini berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Dipengaruhi oleh realisasi anggaran dari kegiatan pengadaan sampel dan reagen yang ada pada RO QIA.002, belum mencapai target RPD yang ditetapkan.

Dalam pengawasan keamanan obat beredar, salah satu program yang dilaksanakan BPOM adalah farmakovigilans. Farmakovigilans merupakan ilmu dan aktivitas terkait deteksi dini, penilaian, pengkajian dan upaya pencegahan terhadap dampak risiko merugikan sehubungan dengan penggunaan obat. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ini melibatkan banyak key player penting, antara lain tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, industri farmasi selaku pemegang izin edar dan masyarakat sebagai pengguna akhir. Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPOM dalam program farmakovigilans, BPOM melakukan upaya penguatan regulasi dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans. Peraturan ini merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari regulasi yang telah ada, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pengawasan saat ini.

Indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya adalah sebesar 26% yang diukur pada akhir tahun 2025.

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk aktivitas farmakovigilans yang dapat dilakukan UPT BPOM adalah kegiatan KIE farmakovigilans. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing catchment area UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Indikator ini diukur dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM} \\ = (A / B) \times 100\%$$

Keterangan:

- A** : Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B** : Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	Belum ada target	N/A

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan target sebesar 26 % Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pelaporan KTD/ESO setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans. Pelaksanaan pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	Belum ada target
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	-	-	Belum ada target
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	-	-	Belum ada target

Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru BPOM yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025-2029, sehingga perbandingan capaian terhadap realisasi kinerja triwulan sebelumnya belum dapat dilaksanakan. Untuk mendapatkan gambaran kinerja indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan pada akhir tahun 2025.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	0	Belum dapat dinilai capaiannya	N/A

Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru BPOM yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025-2029. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan. BPOM terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* dari tenaga kesehatan/tenaga medis terkait pentingnya farmakovigilans, sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mengintensifkan peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis tersebut melalui kegiatan peningkatan kompetensi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) farmakovigilans. Mengingat luasnya cakupan wilayah dan sebaran sarana pelayanan kesehatan di Indonesia, maka diperlukan dukungan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak hanya dilakukan oleh Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional namun juga oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BPOM di daerah. Salah satu dukungan kegiatan peningkatan kompetensi melalui KIE farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM adalah berupa Bimbingan Teknis/KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Pada Triwulan III, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 48 sarana (target 45 sarana) dari 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans, berdasarkan pemantauan terhadap pelaporan KTD/ESO dari fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans, selama periode triwulan III terdapat 5 (tiga) fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelaporan KTD/ESO melalui pelaporan online : <https://e-meso.pom.go.id/ADR>.

Apabila capaian ini diukur terhadap realisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sampai triwulan III, dapat dihitung proyeksi capaian indikator sebagai berikut:

Realisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM (triwulan III) = $5/45 \times 100\% = 11,11\%$

Capaian *on progres* Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM terhadap target tahun 2025 sebesar 26% adalah sebagai berikut = $(11,11 / 26) \times 100\% = 42,73\%$ (realisasi s.d triwulan III).

Berdasarkan perhitungan di atas, maka perlu upaya lebih lanjut untuk mengawal capaian kinerja indikator ini agar dapat tercapai sesuai target di akhir tahun 2025. Adapun langkah yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja triwulan III ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pemantauan pelaporan e-MESO secara berkala oleh sarana kesehatan
2. Menyusun rencana aksi dalam rangka peningkatan pelaporan KTD/ESO oleh fasyankes, yaitu:
 - Membuat surat himbauan untuk pelaporan KTD/ESO dan apresiasi atas pelaporan oleh fasyankes yang sudah melaporkan secara rutin

- Melakukan refreshment pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes dan melakukan pendampingan/desk pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- KIE Farmakovigilans bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan perencanaan yaitu sebanyak 48 sarana (target 45 sarana), tanggal 24 April 2025. Kegiatan KIE Farmakovigilans bagi tenaga kesehatan ini menghadirkan pakar farmakovigilans yang berkompeten di bidangnya. Sebagai evaluasi, pengukuran tingkat pemahaman peserta dilakukan melalui *pre test* dan *post test* dengan persentase kelulusan peserta di atas nilai 70 sebanyak 95,16%.
- Berdasarkan monitoring, fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 5 (lima) sarana.
- Melakukan Monitoring Evaluasi Farmakovigilans Triwulan III pada poin kegiatan melakukan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut regulatori di lapangan berdasarkan hasil kajian keamanan obat beredar, seperti perubahan penandaan dan penarikan obat (recall obat) periode triwulan III tahun 2025.
- Rencana aksi dalam rangka peningkatan pelaporan KTD/ESO oleh fasyankes yang telah dilaksanakan pada triwulan III adalah telah disampaikan surat himbauan kepada Fasyankes yang telah mengikuti KIE untuk melakukan pelaporan KTD/ESO maupun KIPI di fasilitas masing-masing dan apresiasi kepada fasyankes yang telah melakukan pelaporan secara rutin dan melakukan perencanaan refreshment pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Belum ada target bulan ini	Rp. 4.294.280	Rp. 4.294.280	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Pengukuran Efisiensi belum dapat dilakukan pada Indikator ini, tetapi untuk progres RO pendukung telah selesai dilaksanakan. Pagu awal untuk yang dianggarkan untuk pencapaian target IKU ini adalah Rp41.950.000,- dan dilakukan Blokir mandiri senilai Rp37.650.000,- sehingga pagu yang dapat digunakan adalah Rp4.300.000,-. Per bulan April kegiatan KIE Farmakovigilans telah dilaksanakan dan anggaran yang digunakan Rp 4.294.280,- hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan kegiatan KIE yang awal luring menjadi daring seluruhnya,

sehingga pada IKU ini telah dilakukan efisiensi penghematan anggaran sebesar 89% dari pagu awal IKU.

3

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah salah satu indikator yang mengukur sejauh mana pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya berdasarkan kajian analisis risiko. Ruang lingkup pangan olahan dalam indikator ini ialah pangan olahan yang terdaftar dengan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM MD dan BPOM ML maupun pangan lainnya terkait kasus, pendampingan UMKM, emerging issues, termasuk pangan fortifikasi baik yang disampling di sarana produksi maupun di sarana peredaran. Dengan kata lain, ruang lingkup pangan olahan disini adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Pengertian pangan olahan itu sendiri adalah makanan atau minuman yang telah mengalami proses pengolahan tertentu. Proses ini bisa melibatkan berbagai metode, seperti pengeringan, pemanasan, pendinginan, fermentasi, penambahan bahan pengawet atau perasa, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk meningkatkan daya simpan, mengubah rasa dan tekstur, atau menciptakan produk baru yang lebih praktis dan beragam. Adapun pengertian sampel pangan olahan berisiko adalah sampel pangan yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Selanjutnya, pengertian “ditindaklanjuti sesuai ketentuan” adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Dengan demikian, pengertian “diperiksa dan diuji” sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi antara pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Capaian atau realisasi dari indikator kinerja “ Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan :

A	=	Kesesuaian target sampel Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}}{\text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling}} \times 100\%$
B	=	Kesesuaian parameter uji Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$
C	=	Ketepatan pengambilan keputusan Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$
D	=	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa}} \times 100\%$
E	=	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian, Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$
F	=	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya, Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} \times 100\%$

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93.94	104.38	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada TW III (93,94%) dibandingkan dengan target TW III (90%) menjadikan capaian sebesar 104,38% atau termasuk pada kriteria capaian **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel telah disampling dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan dan Kemasan Pangan maupun Rencana Pelaksanaan (Renlak) Tahun 2025. Pelaporan melalui SIPT sebagian besar telah dilakukan tepat waktu (*real time*). Tindak lanjut hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah dilakukan dengan mengirimkan laporan kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Hal yang menjadi catatan ialah dalam tindak lanjut hasil pengujian selanjutnya perlu dilakukan perubahan mekanisme yaitu langsung berkoordinasi dengan UPT setempat dimana produsen pangan TMS berasal.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98.69	116.11
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	85	98.24	115.58
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	90	93.94	104.38

Pada TW III, tepatnya pada bulan Agustus 2025 telah ditetapkan Revisi PK-RAPK BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025 dimana dalam revisi RAPK tersebut terdapat perubahan target pada indikator ini yaitu dari 85% menjadi 90%. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai capaian agar dapat lebih realistis mengingat tren capaian pada TW I maupun TW II masuk pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%). Dengan adanya perubahan target tersebut kategori capaian sebesar 104,38% atau kategori **Sangat Baik** (100-110%). Disisi lain, terdapat penurunan realisasi pada TW III dari sebelumnya pada rentang 98,24 dan 98,69% menjadi 93,94%. Hal ini perlu menjadi catatan agar segera dilakukan perbaikan sehingga realisasi kinerja pada TW berikutnya tetap dapat dijaga agar tidak terjadi penurunan nilai capaian.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93.94	104.38	 Tercapai/ Melampaui

Target realisasi Tahun 2025 mengalami perubahan dari sebelumnya 85% menjadi 90% setelah adanya usulan perubahan (penyesuaian) target. Meskipun terjadi perubahan (kenaikan) target akibat penyesuaian, dengan realisasi TW III sebesar 93,94% kriteria capaian terhadap target tahunan masih **Tercapai/Melampaui (104,38%)**. Namun demikian, mengingat adanya penurunan capaian dari TW sebelumnya, agar tetap perlu dijaga konsistensi kinerja yang telah dilakukan agar capaian hingga akhir Tahun 2025 tetap dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini disebabkan oleh kinerja sampling dan pengujian yang telah dilakukan sesuai pedoman baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sesuai rencana pelaksanaan. Pada sisi kualitas, penilaian dilakukan kesesuaian sampling sesuai kategori pangan, kesesuaian parameter uji sesuai pedoman, ketepatan pengambilan kesimpulan serta kesesuaian tindak lanjut terhadap pedoman tindak lanjut pengawasan. Pada sisi kuantitas,

penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian jumlah sampel serta ketepatan waktu pelaporan. Untuk mempertahankan keberhasilan capaian ini, maka perlu diperhatikan dua hal tersebut.

Dengan capaian tersebut masih terdapat penurunan kinerja pada TW III terutama pada laboratorium pengujian. Salah satunya disebabkan adanya kerusakan teknis peralatan AAS untuk pengujian cemaran logam berat yang berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan sehingga mengalami keterlambatan. Hal ini cukup berpengaruh terhadap penurunan capaian kinerja dari bulan sebelumnya meskipun proporsi ketepatan pelaporan hanya sebesar 10% dari enam parameter kinerja lainnya yaitu kesesuaian target sampel (20%), kesesuaian parameter uji (20%), ketepatan pengambilan keputusan (20%), tindak lanjut sesuai pedoman (20%) dan ketepatan waktu pengambilan sampel (10%). Untuk menjaga agar tidak terjadi lagi penurunan capaian pada TW berikutnya, maka perlu segera dilakukan perbaikan AAS agar pengujian logam berat tidak terkendala sehingga ketepatan waktu pelaporan dapat bertambah atau dipertahankan kembali nilainya.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dengan adanya perubahan (kenaikan) target sesuai revisi Renstra BBPOM di Palangka Raya, maka konsistensi kinerja yang telah dicapai perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kesiapan laboratorium dalam hal reagensia, peralatan yang rusak untuk segera diperbaiki maupun sumber daya lainnya agar pengujian dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu sehingga capaian kinerja dapat sesuai target yang telah ditetapkan. Kompetensi petugas sampling agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan jenis/kategori sampel maupun jumlahnya juga perlu diperhatikan agar pengujian dapat dilakukan sesuai pedoman sehingga capaian kinerja dapat dipertahankan.

Selain itu, dengan diadakannya rapat evaluasi internal yang rutin setiap bulan, mampu memberikan dampak positif terutama dalam hal identifikasi masalah dan hambatan serta penyusunan strategi untuk perbaikan selanjutnya.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104,38	Rp. 138.400.100	Rp. 75.384.172	54,47	1,92	0,92	88% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Dipengaruhi realisasi anggaran dari kegiatan pengadaan sampel pangan dan media mikrobiologi untuk pengujian pangan yang ada pada RO QIA.001 belum mencapai target RPD yang ditetapkan.

Persentase sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang diuji sesuai standar adalah salah satu indikator kinerja BBPOM di Palangka Raya yang bertujuan untuk memotret bagaimana penanganan KLB-KP di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya apakah telah sesuai dengan pedoman sehingga dapat diperoleh informasi terkait agen penyebab keracunan untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan pencegahan yang tepat berdasarkan kejadian tersebut.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan indikator yaitu persentase sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang diuji sesuai standar, dapat dijelaskan bahwa “sampel KLB-KP” yaitu sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan hasil investigasi ataupun analisis epidemiologi. Sampel KLB-KP yang diperiksa tidak terbatas pada Pangan Olahan Dalam Kemasan namun juga termasuk Pangan Olahan Siap Saji (POSS) dan tak menutup kemungkinan termasuk Pangan Segar, baik Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) maupun Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sampel KLB-KP dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Pengertian “sesuai standar” adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Tambahan khusus untuk sampel pangan jenis Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) yang menjadi tugas utama Badan POM perlu juga diperhatikan kesesuaian terhadap standar atau regulasi terkait seperti misalnya parameter uji lainnya sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Kesesuaian terhadap standar lainnya ialah dalam hal pengambilan sampling yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; serta dalam melakukan investigasi penyebab keracunan yaitu sesuai dengan Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan Tahun 2023.

Secara ringkas, pengukuran indikator ini dilakukan melalui perhitungan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = Total Sampel

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n , merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n .

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3) \times 100\%}$

- Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Sampai dengan akhir Triwulan III telah dilakukan pengujian terhadap sampel KLB-KP yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, yaitu berupa puding susu yang merupakan Pangan Olahan Siap Saji (POSS) dan diproduksi oleh salah satu pelaku usaha UMK Jasa Boga di Kasongan, Kabupaten Katingan. Sampel tersebut telah dilakukan pengujian secara mikrobiologi dengan 4 (empat) parameter yaitu *Bacillus cereus*, *Salmonella*, *E. coli* dan *Staphylococcus aureus*. Pengujian hanya dilakukan secara mikrobiologi dikarenakan berdasarkan kajian epidemiologi tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan pada penyebab keracunan disebabkan agen kimia.

Dari hasil pengujian diperoleh satu parameter yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu parameter uji *Salmonella*. Hasil tersebut telah sesuai dengan referensi etiologi meliputi gejala

yang dialami oleh korban, masa inkubasi, maupun kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan serta kesesuaian dengan permintaan parameter uji oleh dinas kesehatan berdasarkan kajian epidemiologi yang telah dilakukan. Pelaporan atas definisi kasus, kajian epidemiologi, hingga laporan hasil uji juga telah dilaporkan ke Badan POM melalui aplikasi SPIMKER KLB-KP. Dengan demikian capaian terhadap target Triwulan III sebesar 100.00% dengan kriteria capaian **Baik**.

Pada Triwulan III terdapat laporan keracunan yang terjadi pada salah satu sekolah di Kota Palangka Raya dengan jenis sampel kue sus (bukan menu MBG) yang disediakan oleh katering sekolah tersebut. Sampel dikirim dari Puskesmas Bukit Hindu, Kota Palangka Raya dan diterima oleh bagian laboratorium dengan permintaan parameter uji sebanyak 8 parameter, yaitu 4 kimia dan 4 mikrobiologi. Namun dikarenakan hasil uji baru selesai pada awal bulan Oktober, sehingga laporan KLB ini belum masuk pada capaian perhitungan Triwulan III dan akan masuk pada perhitungan Triwulan IV.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	-	-
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	100	100	100.00
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	100	100	100.00

Realisasi sampai akhir Triwulan III sebesar 100.00% dan realisasi kinerja sebesar 100.00% sehingga diperoleh persentase capaian 100.00%. Pada Triwulan I tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan hingga akhir Triwulan I belum selesai dilakukan pembahasan Definisi Operasional (DO) oleh unit pengampu maupun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu, pada Triwulan I tidak terdapat kasus KLB keracunan pangan sehingga tidak ada realisasi pada periode tersebut. Dengan perhitungan capaian yang bersifat akumulatif, maka capaian pada Triwulan II juga tetap dihitung pada Triwulan III.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan target tahunan yaitu sebesar 100.00% diharapkan dapat dipertahankan agar capaian tetap **Baik** sehingga perlu ditekankan kembali pentingnya penetapan parameter uji yang tepat agar hasil uji yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan yaitu dapat digunakan dalam menentukan agen penyebab KLB-KP.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- Koordinasi yang baik dan efektif secara internal BBPOM di Palangka Raya melalui TGC Balai serta secara eksternal dengan TGC Daerah atau Dinas Kesehatan setempat dalam penelusuran informasi/kasus, pengambilan sampel, penerimaan sampel dan penentuan parameter uji serta analisis epidemiologi penyebab keracunan.
- Kesiapan laboratorium dalam pengujian agen penyebab keracunan, meliputi ketersediaan reagensia dan peralatan serta sumber daya manusia petugas penguji agar pengujian dapat selesai tepat waktu dan hasil uji dapat mendukung kajian epidemiologi yang telah dilakukan.
- Pelaporan hasil pemantauan KLB-KP melalui aplikasi SPIMKER secara cepat dan tepat agar dapat segera dilakukan *monitoring* oleh Badan POM.
- Adanya jadwal *on call* pada hari Sabtu/Minggu/Libur sebagai petugas penerima laporan kejadian keracunan yang telah dibuat sebagai hasil rekomendasi evaluasi internal juga perlu dilaksanakan dengan baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun keterlambatan dalam penanganan laporan kasus.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Perlu upaya lebih berkesinambungan terutama dengan tim terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) agar sering mengingatkan kepada masyarakat dalam pemilihan, penyiapan dan penyimpanan pangan yang aman maupun dalam konsumsinya sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Untuk mendukung keberhasilan capaian indikator ini, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Koordinasi dan komunikasi yang jelas dan efektif dengan petugas dinas kesehatan setempat jika kejadian keracunan merupakan pangan olahan siap saji dan berasal dari kabupaten/kota (daerah) dalam pengambilan sampel maupun dalam penentuan parameter uji dikaitkan dengan analisis epidemiologi yang dilakukan oleh petugas dari dinas kesehatan.
- Koordinasi dan komunikasi yang cepat dan terarah dengan TGC Badan POM jika kejadian keracunan berasal dari Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) dalam menentukan parameter uji agar hasil pengujian dapat mendukung dalam penentuan agen penyebab keracunan.
- Koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam TGC Daerah agar berikutnya tetap siap dan waspada jika sewaktu-waktu terdapat laporan kejadian keracunan dari masyarakat.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	17.598.000	18.119.699	102,96	0,97	-0,03	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja yang sesuai target, namun realisasi anggaran lebih dari target RPD yang ditetapkan terkait dengan pengadaan reagen pangan yang ada pada RO QIA.001



Sampling Pangan Industri rumah Tangga (PIRT) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, yang dikemas dalam kemasan pangan, yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Sampling ini merupakan sampling yang dihitung sebagai capaian indikator untuk persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Kategori sampling PIRT yang disampling mengacu pada peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan.

Indikator kinerja Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 85% yang diukur berdasarkan pemenuhan beberapa poin penilaian dari 35 sampel yang diambil dan dilaporkan sampai dengan akhir Triwulan I. Pengambilan sampel dilakukan pada triwulan I tahun berjalan dengan tujuan agar tidak terjadi sampling berulang (double sampling/double counting) pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan yang melaksanakan menu post market dalam program Bantuan Operasional Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) TA 2025.

Keberhasilan kinerja untuk indikator ini dipengaruhi oleh jumlah produk PIRT yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dan ketersediaan reagen serta kesiapan alat untuk melakukan pengujian sampel PIRT. Selain itu kinerja pada indikator ini juga didukung oleh ketepatan perencanaan, kejelian petugas dalam mengambil kesimpulan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengujian dan evaluasi penandaan.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menggunakan Rumus :

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =
 $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

dimana :

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$(A1 + A2) / 2$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.86	109.25	Sangat Baik

Kinerja dalam menindaklanjuti sampel PIRT berisiko pada Triwulan III Tahun 2025 dinilai **Sangat Baik**. BBPOM di Palangka Raya tidak hanya memenuhi target yang ditentukan, tetapi juga melampaui target tersebut dengan selisih yang substansial. Hal ini mencerminkan efektivitas, kepatuhan, dan efisiensi yang tinggi dalam proses pengawasan dan penindakan terhadap produk PIRT yang berisiko.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.43	109.92
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	85	92.29	108.58
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	85	92.89	109.25

Tren kinerja pengawasan sampel PIRT berisiko menunjukkan fluktuasi minor dari Triwulan I ke Triwulan III, namun konsistensi yang kuat dalam melampaui target hal tersebut terlihat dari terjadinya penurunan realisasi sebesar 1.14 poin persentase (93.43% menjadi 92.29%) dari Triwulan I ke Triwulan II dan peningkatan realisasi sebesar 0.60 poin persentase (92.29% menjadi 92.89%) dari Triwulan II ke Triwulan III, namun realisasi selalu berada dalam rentang 92.29% hingga 93.43% menunjukkan komitmen yang kuat untuk melampaui target. Variabilitas yang rendah ini menunjukkan stabilitas operasional yang baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.89	109.25	 Tercapai/Melampaui

Kinerja dalam menindaklanjuti sampel PIRT berisiko hingga Triwulan III Tahun 2025 dinilai **Tercapai/Melampaui**. Pencapaian melebihi 100% terhadap target tahunan menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang luar biasa dalam proses pengawasan dan tindak lanjut. Ini mengindikasikan bahwa BBPOM di Palangka Raya tidak hanya memenuhi sasaran yang

ditetapkan, tetapi juga berhasil mempercepat pencapaian target dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dengan realisasi yang lebih besar dari yang direncanakan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dari *tools* penilaian mandiri untuk menghitung realisasi kinerja indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh realisasi sebesar 92.89% dan capaian sebesar 109.25% dengan kriteria sangat baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini antara lain disebabkan oleh :

1. Kejelasan Prosedur Tindak Lanjut dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai bentuk pengendalian terhadap ketidaktepatan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan.
2. Monitoring dan evaluasi berkala sehingga memungkinkan intervensi dan koreksi cepat sebelum terjadinya potensi risiko seperti ketidaktepatan pengambilan sampel sesuai perencanaan, jumlah sampel yang tidak mencukupi, keterlambatan pelaporan dan kesalahan pengambilan kesimpulan.
3. Petugas sampling dan pengujian memiliki kompetensi yang memadai dalam pengambilan keputusan hasil uji, penentuan tindak lanjut, dan pelaporan sesuai ketentuan.
4. Koordinasi yang efektif antara tim sampling dan pengujian guna memastikan waktu penyelesaian pengawasan dapat dipenuhi dengan cepat

Walaupun capaian indikator telah memenuhi kriteria sangat baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh :

1. Kapasitas dan Beban Kerja Laboratorium yang tinggi akibat penumpukan sampel dan jumlah SDM terbatas serta kendala peralatan laboratorium menyebabkan tekanan kerja tinggi dan potensi keterlambatan pelaporan hasil uji.
2. Kendala teknis pada sistem aplikasi pelaporan (*entry data*) yang digunakan, sehingga petugas harus membuat Laporan Hasil Uji secara manual, sehingga terjadi keterlambatan input ke dalam sistem.
3. Kurangnya respon cepat dari Stakeholder eksternal dalam hal ini pemerintah daerah (penerbit izin PIRT) atau pelaku usaha, memaksa petugas menghabiskan waktu lebih lama untuk *follow-up* hasil tindak lanjut yang telah dilakukan

Untuk mempertahankan kinerja tinggi sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

1. Mengkaji ulang target tahunan untuk tahun berikutnya. Mengingat capaian konsisten di atas 92%, target sebaiknya dinaikkan menjadi 90%-92% untuk menciptakan tantangan kinerja yang lebih tinggi
2. Melakukan pelatihan lanjutan, khususnya pada aspek hukum/regulasi terbaru terkait tindak lanjut hasil pengawasan PIRT, untuk memperkuat dasar pengambilan tindak lanjut yang tepat untuk dilakukan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

1. Program pengawalan BOK POM TA 2025 dengan bimtek penilaian mandiri SPPIRT oleh Dinas Kesehatan kabupaten/Kota yang meningkatkan pembinaan pelaku usaha PIRT untuk dapat memenuhi komitmen izin penerapan SPPIRT.
2. Program UMKM Berdikari yang bersinergi tidak hanya untuk pendampingan pelaku usaha pangan olahan BPOM MD namun juga mendampingi pelaku usaha PIRT
3. Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui Mall Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan produk PIRT
4. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan khususnya pelaku usaha PIRT.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti	109.25	Rp 138.400.100	Rp 75.384.172	54.47	2.01	1.01	86% (tidak efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, Berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja yang telah melampaui target namun realisasi anggaran lebih jauh lebih kecil dari target RPD yang ditetapkan. Dipengaruhi realisasi anggaran dari kegiatan pengadaan sampel pangan dan media mikrobiologi untuk pengujian pangan yang ada pada RO QIA.001 belum mencapai target RPD yang ditetapkan.



Indikator kinerja ini sama dengan indikator kinerja pada periode renstra sebelumnya dengan definisi yang sama, tidak ada perubahan Definisi Operasional.

Pada Triwulan III terdapat perubahan manual indikator pada bagian target yang semula kumulatif menjadi *flat*.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* diperoleh dengan rumus :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* $= \frac{A + B}{2}$

Keterangan :

$$A : \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

$$B : \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi obat dan makanan, mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi dan Pemeriksaan Sarana Pelayanan Farmasi (saryanfar) baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan obat dan makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	84	79.29	94.39	Baik

Berdasarkan manual indikator, penetapan target awalnya gradual dari 64% di bulan Januari 2025 dan 84% di bulan Desember 2025 meningkat 2 angka tiap bulannya berubah menjadi target *flat* sebesar 84%. Sampai dengan bulan September terdapat 140 surat tindak lanjut ke pelaku usaha, 82 surat telah diberikan *feedback* serta 1 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP yang dikirimkan kepada lintas sektor/Dinas Kesehatan Kabupaten dan telah diberikan *feedback*. Terdapat 6 surat tindak lanjut yang diterbitkan pada tahun 2025 yang belum mendapatkan *feedback* sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 94.39% termasuk dalam kriteria **Baik**. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Penetapan target awalnya gradual dari 64% di bulan Januari 2025 dan 84% di bulan Desember 2025 meningkat 2 angka tiap bulannya. Pada Triwulan II, berdasarkan surat Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor B-PR.04.02.16A.07.25.655 tanggal 17 Juli 2025 disampaikan permohonan revisi realisasi kinerja indikator ini periode Januari - Mei 2025 kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan karena adanya kesalahan input data. Data yang dilaporkan tidak sesuai karena termasuk rekomendasi tahun 2024 yang sudah ditindaklanjuti. Data yang dikoreksi adalah data realisasi Triwulan I dari 72.41% menjadi 18.37%.

Jika realisasi dibandingkan dengan target *flat* sebesar 84% dan koreksi data di atas, maka capaian dan kriteria capaian indikator ini mengalami perubahan sebagai berikut:

- Triwulan I : Realisasi sebesar 18.37% jika dibandingkan terhadap target 84% maka memberikan angka capaian sebesar 21.87% dengan kriteria kurang
- Triwulan II : Realisasi sebesar 72.22 jika dibandingkan terhadap target 84% maka memberikan angka capaian sebesar 85.95% dengan kriteria cukup

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Triwulan III dengan triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	84	18.37	21.87
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	84	72.22	85.95
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	84	79.29	94.39

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* Triwulan III jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I dan Triwulan II secara konsisten terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha dan atau lintas sektor yang memberikan *feedback* terhadap rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	84	79.29	94.39	 Akan Tercapai

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 84% maka akan memberikan angka capaian sebesar 94.39% dengan kategori **Akan Tercapai**. BBPOM di Palangka Raya akan melakukan perbaikan yang berkesinambungan dan monitoring dan evaluasi yang ketat agar dapat mencapai target pada akhir tahun 2025 seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku usaha untuk memberikan *feedback*.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampai dengan Triwulan III tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah memberikan keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan kepada *stakeholder* yaitu pelaku usaha dan lintas sektor sebanyak 141 rekomendasi termasuk rekomendasi *carry over* tahun 2024. Sampai dengan Triwulan III terdapat 82 rekomendasi yang mendapatkan *feedback* dari pelaku usaha, dan rekomendasi ke lintas sektor sebanyak 1 rekomendasi telah mendapatkan *feedback*. Rekomendasi perbaikan kinerja agar pelaku usaha/ lintas sektor memberikan *feedback* terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yaitu:

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat inspeksi, agar memberikan *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya dan pola tindak lanjut hasil pengawasan.

- Aktif berkoordinasi dengan IAI untuk melakukan sosialisasi tentang pembuatan CAPA dari hasil pemeriksaan BBPOM di Palangka Raya
- Petugas aktif melakukan konfirmasi sekaligus memberikan konsultasi secara terus menerus melalui telepon dan *whatsapp* ke pelaku usaha terkait *progress* CAPA yang harus dikirimkan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *timeline feedback* CAPA dari surat tindak lanjut yang telah diterbitkan.
- Menerapkan pola tindak lanjut sesuai dengan juknis masing-masing kedeputian/komoditi.
- Melakukan sosialisasi Pola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian kepada pelaku usaha/penanggung jawab sarana
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka sinergisme pengawasan obat dan makanan dan memaksimalkan SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan) masing-masing kabupaten/kota.
- Monitoring dan evaluasi penyampaian surat tindak lanjut kepada *stakeholder* untuk mencegah tidak tersampainya surat tersebut.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kepatuhan serta pemahaman pelaku usaha dan lintas sektor terhadap peraturan perundang-undangan. Di samping itu, koordinasi yang baik dengan lintas sektor juga menunjang keberhasilan dari indikator ini. Pola tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh BPOM mendorong pelaku usaha untuk secara aktif melakukan tindakan perbaikan melalui penyusunan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi *feedback* dari stakeholder yang ketat
- Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha/penanggung jawab
- Melaksanakan pola tindak lanjut sesuai dengan juknis pedoman Tindak Lanjut
- Monitoring dan evaluasi penyampaian surat tindak lanjut kepada stake holder untuk mencegah tidak tersampainya surat tersebut.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	94.39	Rp 3.246.000	Rp 3.246.000	100.00	0.94	-0.06	Tidak efisien

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja belum mencapai target namun capaian realisasi anggaran telah sesuai RPD yang ditetapkan.

7 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi salah satu Indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Ruang lingkup dari sarana produksi sediaan farmasi sendiri terdiri dari :

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Indikator ini merupakan indikator baru namun serupa dengan indikator tahun lalu yaitu persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dimana perbedaan mendasar ada pada ruang lingkup sarana produksi yang diperiksa dan juga cara pengukuran yang ditetapkan dalam manual IKU.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah: rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan

Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) $\times$ 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) $\times$ 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= rata-rata persentase sub aspek 1-6
 - 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) $\times$ 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) $\times$ 100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) $\times$ 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) $\times$ 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) $\times$ 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) $\times$ 100%
- C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) $\times$ 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) $\times$ 100%

Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 87%

yang diukur menggunakan Tools Assesment mandiri dengan rincian output sebanyak 3 sarana sesuai dengan cakupan sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108.70	Sangat Baik

Telah terjadi penyesuaian target indikator dari semula 87% menjadi 92%, yang mulai berlaku pada Triwulan III. Kenaikan target ini merupakan respons langsung terhadap kinerja luar biasa di Triwulan II, dimana realisasi mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 114.94% kriteria capaian “tidak dapat disimpulkan”.

Capaian tersebut bukan merupakan keberhasilan mutlak, melainkan sebagai indikasi bahwa penetapan target awal 87% kurang matang pada proses pengkajian definisi operasionalnya. Oleh karena itu, melalui mekanisme evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan pada bulan Agustus, target ditingkatkan menjadi 92% untuk menetapkan standar kinerja yang lebih tinggi, serta untuk menjaga momentum peningkatan yang telah dicapai.

Sampai dengan akhir Triwulan III telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sebanyak 1 sarana UMOT dan 1 sarana produksi kosmetik. Dari target realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III tahun 2025 yaitu 92% terealisasi 100% pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 108.70% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	87	100	114.94
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	92	100	108.70

Capaian kinerja indikator ini menunjukkan sebuah tren peningkatan yang dramatis dan stabil setelah mengalami kegagalan di periode awal yang disebabkan karena belum tuntasnya pembahasan manual IKU dan definisi operasional dari indikator kinerja.

Capaian kinerja Triwulan I mencerminkan adanya kendala yang menyebabkan program pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi tidak dapat dilaksanakan. Pada Triwulan II terjadi perubahan tren yang sangat tajam dan signifikan. Capaian kinerja melonjak dari 0% menjadi 114.94% (dengan realisasi 100% terhadap target 87%), hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dapat mencapai realisasi sesuai dengan yang direncanakan sebagai pemulihan capaian dan bentuk efisiensi kinerja.

Tren peningkatan kemudian berubah menjadi stabilitas kinerja dan berkelanjutan di Triwulan III, meskipun target telah dinaikkan menjadi 92% sebagai respons atas kinerja di Triwulan II, realisasi tetap dapat dipertahankan pada 100% dan menghasilkan capaian 108.70%. Tahap ini membuktikan bahwa capaian kinerja Triwulan II bukan merupakan kebetulan semata, melainkan bukti dari perbaikan sistem dan proses yang efektif.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW Tahun III 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108.70	 Tercapai/Melampaui

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan target kinerja tahunan menunjukkan capaian dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**, yaitu sebesar 108.70%. Jika realisasi pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat terlaksana seperti yang direncanakan sebagaimana realisasi pada Triwulan III, maka dapat dipastikan target tahunan akan Tercapai/Melampaui pada akhir tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan kinerja pada Triwulan III ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas sampling melalui pembelajaran mandiri IDEAS serta *coaching* dan *mentoring* oleh ketua tim kerja.
2. Telah melakukan pengendalian terhadap risiko ketidaksesuaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Telah dilakukan pengaturan tugas di tim inspeksi sehingga tidak terjadi *overload* pekerjaan dalam pelaksanaan inspeksi ke sarana produksi sediaan farmasi
4. Telah dilaksanakan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang Sangat Baik sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan :

1. Menjadikan realisasi Triwulan III sebagai baseline dan berfokus pada perencanaan yang baik di awal periode tahun berikutnya.
2. Pelatihan yang berkelanjutan kepada petugas untuk meningkatkan efisiensi dan keahlian teknis mereka, memastikan bahwa kenaikan target dapat didukung oleh kualitas dan kecepatan kerja yang lebih baik
3. Melaksanakan pengawasan ke sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan.

E Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

1. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.
2. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan dan pengawalan sarana produksi sediaan farmasi dalam tindak lanjut hasil pengawasan dan perizinan.
3. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian kinerja.
4. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Evaluasi/Bimtek/Pelatihan di Bidang Pemeriksaan.
5. Hasil monitoring dan evaluasi pusat setiap triwulan.
6. Pendampingan pelaku usaha sediaan farmasi melalui Inovasi UMKM Berdikari guna menumbuhkan pelaku usaha sediaan farmasi.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108.70	Rp 5.489.833	Rp 5.369.833	97.81	1.11	0.11	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, dimana capaian kinerja telah melampaui target dengan gap terhadap capaian realisasi anggarannya tidak besar.

8

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) dilakukan berdasarkan kajian analisis risiko sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu serta apakah tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Fasilitas produksi pangan olahan yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD maupun izin edar PIRT serta pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Ketentuan “diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” ialah dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut.

2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Cara perhitungan indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
 - a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
 - b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut (TL). TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
 - c. Kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level II maka *grading* sebagai A (MK);
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka *grading* sebagai B (TMK); dan
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka *grading* sebagai C (TMK).

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86.96	108.70	Sangat Baik

Target realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra BPOM yang telah ditetapkan adalah sebesar 80%. Persentase ini diukur menggunakan *tools assesment* mandiri sesuai dengan cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Dari target tersebut, sampai dengan Triwulan III telah terealisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman sebesar 86.96% sehingga diperoleh capaian kinerja 108.70% dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian ini diperoleh dari pembagian tiga parameter kinerja yaitu ketepatan waktu pelaporan (91.3%), kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan pangan (73.91%) dan kesesuaian grading penilaian berdasarkan pedoman yang berlaku (95.65%).

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	80	87.04	108.80
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	80	86.96	108.70

Pada Triwulan I berdasarkan pedoman penilaian kinerja dari unit pengampu Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Badan POM RI indikator ini masih dikecualikan dari perhitungan kinerja, sehingga pada Triwulan I realisasi dianggap 0%. Pada Triwulan II dilakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana, sedangkan pada Triwulan III bertambah 5 sarana sehingga total sarana yang telah diperiksa menjadi 23 sarana. Realisasi capaian kinerja pada Triwulan III terdapat sedikit penurunan dibandingkan realisasi kinerja Triwulan II yaitu sebesar 0.08%. Penurunan ini dinilai tidak signifikan karena capaian kinerja pada Triwulan II dan Triwulan III pada kategori Sangat Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW Tahun III 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	86.96	108.70	▲ Tercapai/ Melampaui

Target indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat sama (*flat*) sampai dengan akhir tahun. Pada indikator ini tidak terdapat perubahan target pada indikator ini dikarenakan target tahunan BBPOM di Palangka Raya merupakan baseline dari target capaian Renstra hingga tahun 2029, sehingga target pada tahun 2025 merupakan target paling realistis untuk dicapai disebabkan adanya metode pengukuran kinerja yang baru. Hal ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan jumlah petugas inspektur pangan yang tersedia, kompetensi dan kemampuan petugas, komposisi petugas dalam surat tugas serta pemahaman petugas terhadap pedoman tindak lanjut. Pengukuran kinerja hingga Triwulan III tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya memperoleh realisasi sebesar 86.96% dengan capaian 108.70% atau kriteria **Tercapai/Melampaui**.

Sampai dengan akhir Triwulan III telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan sebanyak 23 sarana. Dengan demikian, capaian kinerja pada Triwulan III ini dapat disamakan dengan capaian kinerja Tahun 2025. Hasil pemeriksaan dari 23 sarana produksi pangan yang telah diperiksa, diperoleh hasil penilaian 13 sarana Memenuhi Ketentuan (56.5%) dan 10 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (43.5%). Sepuluh sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) terdiri dari 3 sarana Industri Pangan Olahan (IPO) dan 7 sarana IRTP.

Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi TMK telah dilakukan untuk sarana MD dengan melakukan monitoring perbaikan CAPA, penutupan sarana yang telah berpindah lokasi atau berhenti produksi. Adapun untuk IRTP telah dilakukan pembinaan secara langsung terkait higiene dan sanitasi serta penyusunan label maupun dengan memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan agar mengikutsertakan pelaku usaha IRTP yang belum mengikuti pelatihan PKP agar dapat mengikuti PKP di Tahun 2026.

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi pangan sebesar 40% yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada 4 Kabupaten/Kota dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Rinciannya yaitu 4 sarana IPO dan 6 sarana IRTP di Kota Palangka Raya (43.5%), 3 sarana IPO dan 4 sarana IRTP di Kabupaten Kotawaringin Timur (30.4%), 5 sarana IRTP di Kabupaten Barito Selatan (21.7%) dan 1 sarana IPO di Kabupaten Pulang Pisau (4.3%).

G. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pada Triwulan III ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Ketepatan waktu pelaporan. Dari 23 sarana yang diperiksa 21 sarana (91.30%) dilaporkan tepat waktu.
2. Ketepatan grading penilaian. Dari 23 sarana yang diperiksa 22 sarana (95.65%) memiliki ketepatan dalam penilaian (*grading*).
3. Ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, terdapat 18 sarana (78.26%) yang diperiksa telah sesuai dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan mengikuti pedoman tindak lanjut hasil pengawasan pangan.
4. Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas melalui pembelajaran mandiri IDEAS dan pendampingan oleh ketua tim kerja
5. Telah dilakukan pembagian tugas kepada anggota tim sehingga tidak terjadi *overload* pekerjaan.
6. Dokumentasi yang lengkap dan akurat setiap melakukan pemeriksaan ke sarana produksi pangan olahan.

Adapun kendala dalam pengawasan sarana produksi pangan olahan yang diawasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

1. Keterlambatan pelaporan. Terdapat 2 sarana (8.70%) mengalami keterlambatan pelaporan yaitu 1 sarana pada bulan April dan 1 sarana pada bulan Juli.
2. Penentuan grading penilaian. Dari 23 sarana yang diperiksa 22 sarana (95.65%) memiliki ketepatan dalam penilaian (*grading*), dan terdapat 1 sarana (4.35%) yang tidak sesuai dalam penilaian (*grading*).
3. Penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Terdapat 5 sarana (21.74%) yaitu sarana IRTP yang memiliki penilaian pada level III dan IV maupun TMK label. Tindak lanjut tersebut harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan mekanisme tindak lanjut berupa rekomendasi yang dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota/Dinas Kesehatan setempat. Jika hasil pemeriksaan berupa ketidaksesuaian label, maka tindak lanjut mengacu pada tindak lanjut pemeriksaan TMK label bukan pemeriksaan sarana.

Rekomendasi penyempurnaan kinerja :

- Adanya kabupaten yang belum diperiksa, seperti Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur dan Kapuas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran serta tidak adanya sarana MD pada kabupaten tersebut sehingga pada tahun 2025 tidak menjadi target pemeriksaan. Namun demikian, pada tahun berikutnya perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (IRTP) di tiap kabupaten dengan melakukan kolaborasi dengan kegiatan pemeriksaan lainnya seperti sampling atau pemeriksaan sarana distribusi.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

- Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan menurunkan capaian kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam evaluasi.
- Telah dilakukannya Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 19 September 2025. Adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan petugas terkait mekanisme pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan.
- Pembagian tugas yang merata pada tim inspeksi sehingga tidak terjadi penumpukan (*overload*) penugasan yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108.70	Rp 5.489.833	Rp 5.369.833	97.81	1.11	0.11	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, dimana capaian kinerja telah melampaui target dengan gap terhadap capaian realisasi anggarannya tidak besar.



Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = \frac{A + B + C}{3}$$

Keterangan :

- A : Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.
- B : Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.
- C : Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Faktor yang mempengaruhi penilaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Sarana Distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian :

- Pemenuhan target pemeriksaan
- Kesesuaian timeline penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Hasil review kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh *independent supervisor*

Sarana distribusi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan :

- Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
- Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.88	96.59	99.70	Baik

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF, Instalasi Farmasi Provinsi dan Instalasi Farmasi Kabupaten), obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat dan fasilitas lain).

Berdasarkan hasil kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025 dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan surat Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor T-PW.03.04.16A.05.25.370 tanggal 20 Mei 2025 perihal Permohonan Revisi Target IKU Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, target semula 73.88% menjadi 96.88%. Hal ini terjadi karena belum terisinya kolom kesepakatan target sarana distribusi kosmetik pada kompilasi perhitungan target seluruh komoditi pada indikator ini.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, perhitungan indikator ini mengalami penyesuaian untuk aspek pemenuhan target di atas 100% disesuaikan menjadi 100%.

Target bulanan dari indikator ini bersifat *flat* sebesar 96.88%. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan sarana sebagai berikut:

- Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 112 sarana
- Sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 23 sarana
- Sarana distribusi kosmetik sebanyak 49 sarana
- Sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 9 sarana

Sampai dengan Triwulan III ini, diperoleh realisasi indikator sebagai berikut :

- Sarana distribusi obat 96.59%
- Sarana distribusi OBA 94.44%
- Sarana distribusi Suplemen Kesehatan 100%
- Sarana distribusi Kosmetik 95.31%

Rata-rata dari realisasi 4 jenis sarana tersebut adalah merupakan nilai realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 96.59%. Jika dibandingkan dengan target maka akan memberikan

angka capaian 99.70% dengan kriteria **“Baik”**. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	0	0
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	73.88	99.25	134.34
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	96.88	96.59	99.70

Realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan II dan terjadi penurunan, namun demikian masih dalam kategori **“Baik”** dan terukur (Triwulan II kategori “tidak dapat disimpulkan”. Hal ini karena terjadi perubahan target berdasarkan hasil kesepakatan *desk* pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025 dengan Biro Perencanaan dan Keuangan. Perubahan target disebabkan karena usulan BBPOM di Palangka Raya terkait belum terisinya kolom kesepakatan target sarana distribusi kosmetik pada kompilasi perhitungan target seluruh komoditi pada indikator ini.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.88	96.59	99.70	 Akan Tercapai

Realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan III sebesar 96.59 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 akan memberikan angka capaian sebesar 99.70% dengan kriteria **“Akan Tercapai”**. Realisasi sampai dengan Triwulan ini belum mencapai target yang ditetapkan karena persentase kesesuaian tindak lanjut pada semua jenis sarana distribusi di bawah 100% yang memberikan kontribusi terhadap penghitungan realisasi indikator ini. Di samping itu dengan adanya penyesuaian rumus RHPK untuk realisasi *output* yang melebihi 100% disesuaikan menjadi 100% juga berpengaruh terhadap hasil akhir perhitungan indikator ini.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Sampai dengan Triwulan III tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi meliputi sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetika, obat bahan alam dan suplemen kesehatan dengan total sebanyak 193 sarana. Seluruh tahapan dari kegiatan pemeriksaan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemberian tindak lanjut dan pelaporan mengikuti petunjuk teknis pemeriksaan dari masing-masing direktorat/kedeputan.

Analisis penyebab capaian indikator ini di bawah 100% :

- *Overload* pekerjaan petugas menyebabkan keterlambatan pelaporan
- Kompetensi dan pemahaman petugas tentang pedoman tindak lanjut belum memadai

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja :

- Supervisi dan monev ketepatan timeline pelaporan;
- Supervisi dan monev kesesuaian tindak lanjut;
- Sosialisasi/*refreshing* juknis/pedoman tindak lanjut;
- Supervisi indikator kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator tersebut.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan :

- Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan sarana pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai rencana.

- Optimalisasi kegiatan sertifikasi yaitu kegiatan sertifikasi sekaligus melakukan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan sarana pelayanan kefarmasian.
- Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan pada fungsi pemeriksaan.
- Revisi target pada RAPK menjadi 96.38%

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.70	Rp. 43.423.871	Rp. 54.927.414	126,49	0,79	-0,21	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja belum mencapai target namun capaian realisasi anggaran telah melampaui RPD yang ditetapkan.

10 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu serta apakah tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman.

Fasilitas sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya meliputi fasilitas distributor/gudang pangan olahan, sarana ritel baik modern maupun tradisional yang tersebar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Ketentuan “diperiksa sesuai ketentuan” ialah dilihat dari jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut. Dalam rumus perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan =

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91.32	107.44	Sangat Baik

Realisasi capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan pada Triwulan III (91.32%) dibandingkan dengan target pada Triwulan III (85%) sebesar 107.44% atau masuk pada kriteria capaian “**Sangat Baik**”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksaan sarana distribusi pangan telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan maupun pedoman tindak lanjut hasil pengawasan pangan yaitu Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan diperoleh dari 3 (tiga) komponen, yaitu ketepatan pemeriksaan sesuai pedoman, ketepatan tindak lanjut serta ketepatan waktu pelaporan. Dari tiga komponen tersebut, proporsi penilaian tertinggi terdapat pada ketepatan tindak lanjut (70%), ketepatan pemeriksaan (20%) dan ketepatan waktu pelaporan (10%). Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan selanjutnya perlu lebih menitikberatkan pada kesesuaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta evaluasi tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap temuan ketidaksesuaian hasil penilaian.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	88.57	110.71
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	80	90	112.50
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	85	91.32	107.44

Target Triwulan I dan Triwulan II tidak mengalami perubahan yaitu sesuai dengan Renstra awal BBPOM di Palangka Raya, sedangkan pada Triwulan III terdapat perubahan target menjadi 85% sesuai dengan revisi RAPK yang tertuang dalam Revisi Renstra BBPOM di Palangka Raya. Revisi ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap realisasi yang telah tercapai serta kesepakatan dengan unit pengampu yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan maupun Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Dilihat dari realisasi kinerja pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III terdapat tren kenaikan dari 88.57 %, 90 % dan 91.32%.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja sejalan dengan penambahan target yang telah diusulkan sebelumnya. Sebaliknya, capaian kinerja pada Triwulan III (107.44%) mengalami penurunan dari Triwulan II (112.5%) maupun Triwulan I (110.71%). Namun penurunan tersebut masih lebih baik dan terkendali sehingga capaian pada Triwulan III ini terjadi perubahan dari sebelumnya “Tidak Dapat Disimpulkan” menjadi **“Sangat Baik”** karena masih masuk pada *range* capaian 100-110%.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91.32	107.44	 Terpenuhi/ Melampaui

Realisasi kinerja pada Triwulan III dibandingkan dengan target pada Tahun 2025 masuk pada kriteria capaian **“Tercapai/Melampaui”**. Hal ini menjadi sinyal optimisme agar capaian kinerja hingga akhir tahun tetap sesuai harapan. Sampai dengan Triwulan III telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 51 sarana (61,45%) dari target 83 sarana pada akhir tahun. Dengan demikian, masih perlu adanya percepatan dalam hal kuantitas jumlah sarana yang diperiksa tanpa mengesampingkan kualitas pengawasan dengan tetap memperhatikan pedoman pemeriksaan. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai pedoman agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian maupun penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan hingga ketepatan waktu dalam pelaporan. Tiga aspek inilah yang harus selalu ditekankan kepada petugas pemeriksa (*food inspector*) agar target pengawasan hingga akhir tahun tetap tercapai sesuai harapan dan perencanaan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan atas tercapainya realisasi pada indikator ini, yaitu:

1. Sampai akhir Triwulan III telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan, baik distributor, ritel modern dan tradisional sebanyak 51 sarana (104%) dari capaian pada Triwulan II sebelumnya sebanyak 25 sarana yang diperiksa. Meskipun terjadi kenaikan jumlah sarana yang diperiksa, namun angka ini masih perlu ditingkatkan sehingga dilakukan penambahan jumlah sarana yang diperiksa setiap bulan. Hal ini sebagai upaya percepatan pencapaian target dan juga sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan target pada akhir tahun yang biasanya terdapat kegiatan Intensifikasi Pengawasan (Inwas) Pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, pada kegiatan Inwas tersebut dapat lebih fokus pada aspek pemeriksaan produk tanpa dibebani dengan penilaian sarana.
2. Telah dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 10 sarana (19.61%) yang Tidak Memenuhi Ketentuan atau memiliki rating penilaian C ataupun D dari 51 sarana yang telah diperiksa. Tindak lanjut ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Telah dilakukan pelaporan hasil pemeriksaan dengan tepat waktu sampai akhir Triwulan III sebanyak 43 sarana (84,31%) dari 51 sarana yang dilaporkan. Hal ini masih perlu ditingkatkan sehingga perlu diperhatikan oleh petugas untuk segera melaporkan hasil pemeriksaan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

- Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan menurunkan capaian kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk *spreadsheets* yang dapat diakses secara *online* bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam evaluasi.
- Telah dilakukannya Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 19 September 2025 dengan mengundang narasumber dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan petugas terkait mekanisme pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan.
- Pembagian tugas yang merata pada tim inspeksi sehingga tidak terjadi penumpukan (*overload*) penugasan yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan.
-

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107.44	Rp. 72.685.149	Rp. 88.248.042	121.41	0.88	-0.12	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja telah melampaui target namun capaian realisasi anggaran juga melebihi target dan lebih tinggi dari capaian target sebesar 13,97% meningkat dari triwulan lalu. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi menjadi kurang dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Untuk hal ini yang perlu kami perbaiki adalah perencanaan yang lebih baik lagi sehingga capaian anggarannya tidak lebih tinggi dari capaian kinerja indikator ini.



Persentase sarana Iklan sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan menjadi salah satu Indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Presentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi Sesuai Ketentuan adalah:

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen

kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

- Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4).
- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%.

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$

- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka *real*

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	97.68	105.71	Sangat Baik

Jumlah realisasi iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan faktor utama yang mendukung indikator kinerja ini. Pada Triwulan III ini telah dilakukan pengawasan iklan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan dengan total sejumlah 680 iklan dengan rincian *output* sebagai berikut:

- Iklan Obat 126
- Iklan Obat Bahan Alam 92
- Iklan Suplemen Kesehatan 46
- Iklan Kosmetik 260
- Iklan pangan 156

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan menggunakan *tools* penilaian mandiri sesuai dengan rumus perhitungan diatas pada Triwulan III realisasi 97.68%. Target indikator ini mengalami perubahan pada bulan Agustus 2025 dari 88% meningkat menjadi 92.4% dan berlaku sejak Triwulan III. Jika realisasi Triwulan III dibandingkan terhadap target Triwulan III akan memperoleh angka capaian sebesar 105.71% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99.21	112.74
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	88	99.92	113.55
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	92.4	97.68	105.71

Realisasi indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan II sebesar 2.24%, dengan penurunan capaian sebesar 7.84%. Realisasi capaian indikator kinerja di triwulan III lebih rendah dibandingkan dengan realisasi di Triwulan II dan Triwulan I. Jika dibandingkan dengan Triwulan I, terlihat bahwa realisasi Triwulan III mengalami penurunan sebesar 1.53% dengan penurunan capaian sebesar 7.03%. Namun demikian kriteria capaian di Triwulan III sangat baik dibandingkan kriteria capaian di Triwulan I dan Triwulan II tidak dapat disimpulkan.

Hal ini disebabkan adanya perubahan target pada bulan Agustus yang semula 88% menjadi 92.4%.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	97.68	105.71	 Terpenuhi/ Melampaui

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan target kinerja tahunan menunjukkan capaian dengan kriteria tercapai/melampaui, yaitu sebesar 105.71%. Jika realisasi pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dapat terlaksana seperti yang direncanakan sebagaimana realisasi pada Triwulan III, maka dapat dipastikan target tahunan akan tercapai/melampaui pada akhir tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pada Triwulan III ini dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Terealisasinya jumlah pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai target dan dilaporkan tepat waktu.
2. Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas sampling dan iklan melalui pembelajaran mandiri IDEAS dan pendampingan oleh ketua tim kerja.
3. Telah tercukupinya proporsi minimal media elektronik lokal.

4. Tidak ada kendala pelaporan di SIPT.
5. Telah disetujui usulan perubahan target bulan Agustus 2025 sehingga kriteria capaian sangat baik.

Adapun kendala dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi adalah:

- Tidak tercapainya target pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan di media penyiaran lokal (radio) pada bulan Mei dan Agustus masing - masing 1 iklan.
- Tidak tercapainya pemenuhan iklan pada media elektronik (televisi) dan iklan pada media *online* per kategori pangan (terutama kategori 13).

Rekomendasi penyempurnaan kinerja :

- Konsisten menjaga realisasi pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan setiap bulan sesuai dengan yang direncanakan.
- Melakukan koordinasi ke media penyiaran lokal (radio) terkait Iklan Suplemen Kesehatan.
- Mengajukan permohonan ke unit pengampu di pusat revisi target media iklan di Triwulan IV.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

- Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan menurunkan capaian kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk *spreadsheets* yang dapat diakses secara *online* bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam evaluasi.
- Evaluasi eksternal dari unit pengampu yang disampaikan setiap bulan.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	105.71	Rp. 5.907.500	Rp. 4.779.500	80.91	1.31	0.31	95% (Efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, dimana capaian kinerja telah melampaui target dengan *gap* terhadap capaian realisasi anggarannya tidak besar.

Pengawasan terhadap produk tembakau merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada produk tembakau dan rokok elektronik meliputi pengawasan pencantuman peringatan Kesehatan, pencantuman informasi lain pada kemasan, pengawasan kesesuaian batas maksimal kandungan kadar nikotin dan/atau tar, pengawasan bahan tambahan yang dilarang, dan pengawasan daftar kandungan rokok elektronik.

Pengawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung budaya hidup sehat di masyarakat, khususnya pada kelompok usia remaja dan dewasa muda yang rentan terpapar pengaruh promosi dan persepsi keliru terkait rokok. Dengan adanya label yang informatif dan peringatan yang tegas, konsumen diharapkan menjadi lebih sadar terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik. Informasi yang benar dan jelas pada kemasan dapat mencegah masyarakat, terutama generasi muda untuk mulai merokok atau menggunakan rokok elektronik.

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = \frac{A+B}{2}$$

Keterangan :

- A : Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
- B : Persentase ketepatan waktu pelaporan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan :

1. Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
2. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
3. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

4. Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92.26	101.38	Sangat Baik

Sarana Sampai dengan Triwulan III, jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi sebanyak 158 label dari target sebanyak 155 dengan persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label 101.94% (A). Sampai dengan Triwulan III, jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu sebanyak 128 label dari target sebanyak 155 label dengan persentase ketepatan waktu pelaporan label 82.58% (B).

Dari 2 (dua) aspek perhitungan, dapat dihitung persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{A+B}{2} \\
 &= \frac{101.94\%+82.58\%}{2} \\
 &= 92.26\%
 \end{aligned}$$

Rata-rata dari realisasi 2 (dua) aspek penilaian tersebut adalah merupakan nilai realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yaitu sebesar 92.26%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 91%, maka akan memberikan angka capaian 101.38% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	-	-	-
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	91	92.26	101.38

Realisasi kinerja Triwulan III tidak dapat dibandingkan karena pada periode Triwulan sebelumnya belum dilakukan penghitungan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92.26	101.38	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 91% maka akan memberikan angka capaian sebesar 101.38% dengan kategori **“Tercapai”**. BBPOM di Palangka Raya akan melakukan perbaikan yang berkesinambungan serta monitoring dan evaluasi yang ketat agar dapat mencapai target pada akhir tahun 2025 terutama aspek ketepatan pelaporan sesuai *timeline*.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah :

- Pemenuhan jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik
- Ketepatan waktu pelaporan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik

Rekomendasi perbaikan kinerja untuk Triwulan berikutnya adalah meningkatkan monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan. Terdapat 30 (Tiga Puluh) pelaporan pengawasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik tidak tepat waktu.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan :

- Pengambilan sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik masing-masing sebanyak 1 (satu) kemasan terkecil dengan dukungan anggaran yang tersedia, untuk keperluan pengawasan label.
- Peningkatan kompetensi petugas pengawas penandaan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sehingga pemahaman petugas terhadap teknis pengawasan, target, dan *timeline* pelaporan meningkat.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	101,01	Rp. 5.907.500	Rp. 4.779.500	80.91	1.25	0.25	95% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, dimana capaian kinerja telah melampaui target dengan gap terhadap capaian realisasi anggaran tidak besar.



Indikator ini muncul setelah proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu program prioritas Kepala Badan POM sebagaimana disampaikan pada Rapat Evaluasi Nasional (REN) di Surabaya, Desember Tahun 2024 mengingat pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian global. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan serta sebagai bentuk komitmen terhadap rencana aksi nasional pengendalian AMR, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) khusus terkait AMR yang dapat memantau efektivitas intervensi program pengendalian resistensi antimikroba secara terukur dan berkelanjutan.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1. 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
2. 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
3. 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.
4. 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

Formula:

$$\text{Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT} = 25\% \text{ A} + 25\% \text{ B} + 25\% \text{ C} + 25\% \text{ D}$$

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran Indikator Kinerja **Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT** dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan target sebesar 100%. Penilaian indikator kinerja level UPT dalam pengendalian AMR di wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata % capaian terhadap target yang ditetapkan dari kegiatan:

1. Pengawasan apotek dengan menggunakan tools pengawasan antibiotik. Penilaian mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (target 80%).
2. Bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (target 1 kali).
3. Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (target 1 kali).
4. Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (target 2 kali).

Indikator ini mulai dihitung pada triwulan III. Sampai dengan akhir triwulan III, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan apotek sebanyak 20 sarana, 16 apotek telah menggunakan tools pengawasan antibiotik sehingga diperoleh persentase penggunaan 80% dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam *tools* antibiotik sebesar 96,35% (dihitung

menggunakan kertas kerja kesesuaian). Berdasarkan capaian tersebut, diperoleh persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian *tools* antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A) sebesar 110,22% .

2. Bimbingan teknis akan dilaksanakan pada triwulan IV (B).
3. Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba telah dilakukan dan berhasil mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 500.5/589 tahun 2025 tertanggal 22 September 2025 (C). Jika dibandingkan dengan target sebanyak 1 kali maka akan memberikan capaian 100%.
4. Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter sebanyak 1 kali (D). Jika dibandingkan dengan target sebanyak 1 kali maka akan memberikan capaian 100%.

Untuk mendapatkan gambaran realisasi pada akhir tahun, maka sampai dengan akhir triwulan III dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT = $25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$

$$= \frac{110,22\% + 100\% + 100\%}{3}$$

= 103,41% (dihitung berdasarkan formulir penilaian IKU AMR setelah faktor koreksi)

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	-	-	-
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	-	-	Belum ada target bulan ini

Sesuai dengan manual indikator, target indikator ini sebesar 100% dan dihitung pada akhir triwulan IV tahun 2025.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu program prioritas Kepala Badan POM sebagaimana disampaikan pada Rapat Evaluasi Nasional (REN) di Surabaya, Desember Tahun 2024 mengingat pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan

salah satu isu strategis yang menjadi perhatian global. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan serta sebagai bentuk komitmen terhadap rencana aksi nasional pengendalian AMR, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) khusus terkait AMR yang dapat memantau efektivitas intervensi program pengendalian resistensi antimikroba secara terukur dan berkelanjutan. Melalui proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029, muncul indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025, seluruh unit kerja diminta untuk melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029 termasuk menambahkan indikator ini.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Bimbingan teknis belum dilaksanakan pada triwulan III karena menunggu surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah yang sekaligus akan disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis tersebut. Surat edaran yang dimaksud baru terbit pada tanggal 22 September 2025.
2. Penggunaan tools antibiotik telah dilakukan untuk semua pemeriksaan apotek, namun terdapat hasil pemeriksaan 4 apotek menggunakan tools antibiotik tidak dilaporkan pada SIPT.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan karena sampai dengan akhir triwulan III, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan apotek sebanyak 20 sarana, 16 apotek telah menggunakan tools pengawasan antibiotik sehingga diperoleh persentase penggunaan 80% dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik sebesar 96,35% (dihitung menggunakan kertas kerja kesesuaian). Dari capaian tersebut diperoleh persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A) sebesar 110,22% .
2. Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba telah dilakukan dan berhasil mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor 500.5/589 tahun 2025 tertanggal 22 September 2025 (C). Jika dibandingkan dengan target sebanyak 1 kali maka akan memberikan capaian 100%.
3. Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter sebanyak 1 kali (D). Jika dibandingkan dengan target sebanyak 1 kali maka akan memberikan capaian 100%.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Belum ada target bulan ini	Rp. 29,261,278	Rp. 33,320,628	113.87	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun. Jadi yang bisa analisis adalah capaian realisasi anggarannya, di triwulan ke-3 ini realisasinya telah melampaui target dengan capaian 113,87%. Perlu dilakukan perbaikan perencanaan dalam penetapan rencana penarikan dananya, agar di akhir tahun nanti capaiannya dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.

14

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan menjadi bagian penting dari sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. *Grand Design* penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan 2024-2025 menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM salah satunya melalui penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

Standar Kemampuan Laboratorium adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM pada 4 komponen penilaian antara lain pemenuhan Standar Ruang Lingkup, pemenuhan Standar Kompetensi, pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Metode Analisis Terverifikasi.

Pemenuhan SKL Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1 dengan pembagian dan fungsi sebagai berikut :

a. Tingkat 4 : Laboratorium Balai Regional

Terdiri dari 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya.

b. Tingkat 3 : Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat Provinsi

Terdiri dari sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang berada di tingkat provinsi. Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya. Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya termasuk dalam laboratorium tingkat 3.

c. **Tingkat 2 : Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota**

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Komponen dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT BPOM pada laboratorium tingkat 3 sebagai berikut :

- 1) Standar Ruang Lingkup (SRL);
- 2) Standar Peralatan;
- 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
- 4) Standar Metode Analisis yang terverifikasi.

$$\text{Cara perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3} = (50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL Biologi) / 2.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72	75.5	104.86	Sangat Baik

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dari nilai asesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Pada triwulan III tahun 2025 didapatkan hasil penilaian sebesar 75.5 dengan capaian sebesar 104.86% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 72 dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69.50	75.00	107.91
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	71	75.3	106.06
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	72	75.5	104.86

Terdapat peningkatan realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III jika dibandingkan dengan triwulan I dan II yaitu sebesar 0.3 dan 0.2, namun terjadi penurunan capaian pada triwulan III sebesar 1.20 disebabkan adanya peningkatan target dari triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5	75.5	104.14	 Tercapai/Melampaui

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah melebihi target tahunan sebesar 72.5 dengan capaian 104.14% dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan perhitungan, nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan mendapat realisasi sebesar 75.5 dan capaian sebesar 104.86% dengan kriteria capaian terhadap target **Sangat Baik**.

Komposisi penilaian pemenuhan standar kemampuan laboratorium yang diperoleh sebagai berikut :

- Nilai pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 78.4
- Nilai pemenuhan Peralatan sebesar 78.6
- Nilai pemenuhan Kompetensi sebesar 90
- Nilai pemenuhan Metode Analisis Terverifikasi 25.4

Pencapaian target kinerja didukung oleh perencanaan pemenuhan standar kemampuan Laboratorium yang disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian seperti tersedianya reagensia, media, baku pembanding, alat laboratorium, ketersediaan suku cadang, bahan habis pakai serta program pemeliharaan alat.

Perencanaan ini disusun dalam bentuk *Roadmap* pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang akan dilaksanakan setiap bulan dan dievaluasi setiap akhir triwulan. Selain perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi terhadap *roadmap* pemenuhan SKL yang disusun, pengendalian terhadap faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator telah dilakukan dengan baik. Pengendalian yang dilakukan antara lain meliputi:

1. Pengendalian risiko terhadap kerusakan alat
2. Tidak tersedianya reagensia, media, baku pembanding, suku cadang serta alat gelas
3. Tidak terlaksananya kalibrasi alat laboratorium
4. Tidak terpenuhinya kompetensi personel

Pengendalian-pengendalian tersebut telah diakomodir melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah terlaksana sesuai dengan perencanaan. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang mendukung pemenuhan SKL telah terlaksana pada triwulan III melalui kegiatan bimbingan teknis internal pengujian. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengendalikan faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator. Pada triwulan III terdapat verifikasi metode yang hasilnya belum memenuhi standar yang dipersyaratkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang untuk pelaksanaan verifikasi metode tersebut pada triwulan IV.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Terdapat beberapa kegiatan yang mempengaruhi realisasi pencapaian kinerja sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan antara lain terselenggaranya program uji verifikasi metode pada triwulan III 2025 sesuai dengan perencanaan pada *roadmap* pemenuhan standar kemampuan laboratorium, hal ini meningkatkan nilai pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup dan Standar Metode Analisis Terverifikasi.

Standar Kemampuan Laboratorium	Realisasi TW III 2025
Ruang Lingkup	OBA : penambahan 4 ruang lingkup
Peralatan	-
Kompetensi	-
Metode Analisis Terverifikasi	OBA : penambahan 1 metode analisis terverifikasi Mikrobiologi : penambahan 1 metode analisis terverifikasi

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	104.86	Rp. 5.463.628.298	Rp. 5.513.609.246	100.91	1.04	0.04	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, dimana capaian kinerja telah melampaui target dengan gap terhadap capaian realisasi anggarannya tidak besar. Untuk indikator ini terdapat blokir anggaran senilai Rp 1.504.068.000 pada belanja modal untuk peralatan laboratorium, dari pagu awal Rp 7.479.574.000 yang dapat digunakan adalah Rp 5.975.506.000 atau terdapat blokir anggaran 25% dari pagu awal.

15

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Dalam upaya mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta mendukung revitalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA), BPOM menginisiasi program Keamanan Pangan Terpadu di Kabupaten/Kota Pangan Aman dan telah menyusun *tools* penilaian mandiri untuk kabupaten/kota dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menyelenggarakan kegiatan terpadu tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini didasari pula terkait beberapa isu/kebijakan pemerintah maupun isu global yang menyatakan bahwa keamanan pangan sangat berkontribusi besar terhadap penurunan *stunting* (PerPres No. 72 Tahun 2021), *Sustainable Development Goals/SDGs*, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pencapaian Indonesia Emas 2045. Selain itu, pada bulan Juli 2025 indikator ini disepakati sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis BPOM, yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT.

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

- Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan keamanan pangan di daerah
- Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
- Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
- Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- Merupakan Kabupaten/Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- Jumlah target dihitung secara kumulatif
- Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan yang sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2025, kota Palangka Raya dan Kabupaten Barito Utara ditetapkan sebagai kabupaten/kota target pendampingan pengisian *tools* dan data dukung penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Penetapan pemilihan wilayah pada tahun 2025 ini berdasarkan pada hasil *desk monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya.

Pada triwulan III 2025, seluruh tahapan-tahapan kegiatan Pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman telah dilakukan terhadap 2 (dua) Kabupaten/Kota yang menjadi target tahun ini. Pelaksanaan Advokasi kepada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 Juli 2025. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengajak dan mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Tahapan selanjutnya adalah *Desk Pendampingan Monitoring* dan Evaluasi Pengisian Tools serta Data Dukung yang dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 26 Agustus 2025 dan 26 September 2026

Persentase realisasi tahapan program desa pangan aman pada triwulan III belum dapat dinilai capaiannya karena perhitungan capaian baru diperoleh pada akhir tahun 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	-	-	-
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	-	-	Belum ada target bulan ini

Realisasi kinerja triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena merupakan Indikator Kinerja Utama Baru yang mana pelaksanaannya mulai dilakukan pada bulan Juli 2025. Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	-	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Belum dapat dinilai capaiannya

Capaian kinerja triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi triwulan ini belum dapat dinilai dan hasil penilaian akan disampaikan pada akhir tahun oleh Kedeputian III (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha dan Pangan Olahan). Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2025. Akan tetapi, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan tahapan pendampingan oleh UPT. Dari hasil evaluasi dan analisis ini akan dapat disusun langkah-langkah strategis guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tahapan di periode waktu selanjutnya sehingga mampu memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan III ini, capaian BBPOM di Palangka Raya belum dapat dinilai. Namun, dari hasil pendampingan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya telah berhasil memenuhi penilaian tools dan data dukung kepada Kota Palangka Raya dan Barito Utara melebihi target minimum untuk penilaian pada Juknis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian pendampingan oleh BBPOM di Palangka Raya, hasil penilaian mandiri Kota Palangka Raya dan Barito Utara adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai Pengisian Tools KKPA						
		A	B	C	D	E	F	Total Nilai
		Penerapan NSPK oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Perencanaan Oleh Pemerintah Kab/Kota	Pelaksanaan oleh Pemerintah Kab/Kota	Pelaporan Pemerintah Kab/Kota pada Program Keamanan Pangan terkait POSS, PIRT dan PSAT	Inovasi dan Penghargaan Terkait Keamanan Pangan	Informasi Tambahan	
1	Palangka Raya	7	5	76.76	4	3.61	<i>Perbedaan skala penilaian</i>	96.37
2	Barito Utara	5.4	4.88	61.1	4	3.47	0	78.85

Adapun analisis penyebab keberhasilan sebagai bahan evaluasi terhadap penyempurnaan kinerja kedepannya antara lain:

1. Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait dalam pengisian tools dan data dukung penilaian kabupaten/kota pangan aman.
2. OPD dan *stakeholder* terkait memahami aspek-aspek dan data dukung yang harus dilengkapi dalam pengisian *tools* penilaian mandiri kabupaten/kota pangan aman.
3. Komunikasi dan koordinasi antara OPD terkait dengan petugas BBPOM di Palangka Raya berjalan dengan baik sehingga proses pelaksanaan pendampingan dan pengisian *tools* serta data dukung dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Atas capaian indikator Jumlah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Palangka Raya triwulan III tahun 2025 ini, untuk mempertahankan kinerja pada triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Melakukan evaluasi dan analisis hasil penilaian mandiri *tools* dan data dukung masing-masing kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya sehingga mampu memetakan potensi dan kelemahan dari masing-masing kabupaten/kota dalam upaya menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target *output* dan realisasi anggaran yang telah direncanakan di periode waktu selanjutnya.
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait guna menjalin kerjasama dan komitmen untuk pelaksanaan penilaian di periode selanjutnya.
3. *Monitoring* dan evaluasi secara berkala.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan III ini, seluruh tahapan kegiatan pendampingan pengisian tools dan data dukung penilaian kabupaten/kota pangan aman telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya antara lain:

1. Melaksanakan Advokasi ke 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya secara daring pada tanggal 23 Juli 2025 dalam upaya untuk mengajak dan mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2. Melaksanakan pendampingan pengisian tools dan data dukung secara hybrid (luring dan daring) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 dan 26 September 2025.
3. Pelaporan hasil pendampingan kepada Kedeputian III Direktorat pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada tanggal 2 Oktober 2025.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Belum ada target bulan ini	Rp. 18,672,600	Rp. 16,914,107	90.58	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun. Jadi yang bisa analisis adalah capaian realisasi anggarannya, di triwulan ke-3 ini realisasinya telah belum mencapai target dengan capaian 90,58. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam mencapai target realisasi anggaran yang ditetapkan, agar di akhir tahun nanti capaiannya dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi

Sasaran Kegiatan Kedua yaitu Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW III		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW III
16.	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	100.00	100.00	 Akan Tercapai	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					100.00	100.00	 Akan Tercapai	Baik

16 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang diukur berdasarkan pemenuhan beberapa poin penilaian yang telah ditetapkan dalam manual IKU.

Wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi minyak goreng sawit, maka cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi hanya dilakukan terhadap 1 sarana tersebut. Cara perhitungan indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan Rumus:

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

Tindak lanjut yang dilakukan merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan olahan.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100.00	Baik

Indikator ini menunjukkan kinerja Baik dan berhasil mencapai target secara sempurna, dimana realisasi mencapai 100% terhadap target 100%. Capaian sempurna ini dikategorikan Baik. BBPOM di Palangka Raya menunjukkan efisiensi waktu yang sangat tinggi dengan menyelesaikan seluruh target tahunan ini pada Triwulan I. Sarana produksi pangan fortifikasi sebagai target pada indikator kinerja ini hanya mencakup 1 sarana dan kegiatan telah selesai dilaksanakan di Triwulan I pada bulan Februari dan telah dilaporkan sebagai capaian pada triwulan I dan dipertahankan hingga pelaporan triwulan III ini.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100.00
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	100	100	100.00
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	100	100	100.00

Kinerja indikator ini mencapai hasil sempurna (100.00%) di setiap triwulan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau sarana yang ditargetkan untuk pengawasan pangan fortifikasi dan memastikan tindak lanjutnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Tidak ada fluktuasi dalam kinerja dan realisasi tetap stabil di 100% dari triwulan I hingga triwulan III. Hal ini disebabkan karena sarana produksi pangan fortifikasi sebagai target pada indikator kinerja ini hanya mencakup 1 sarana dan kegiatan telah selesai dilaksanakan di triwulan I pada bulan Februari dan telah dilaporkan sebagai capaian pada triwulan I dan dipertahankan hingga pelaporan triwulan III.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100.00	 Akan Tercapai

Realisasi hingga triwulan III telah mencapai 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa seluruh target sarana produksi pangan fortifikasi yang direncanakan untuk diperiksa dan ditindaklanjuti selama tahun 2025 telah berhasil dicakup dan diselesaikan sesuai ketentuan. Capaian 100% pada triwulan III menunjukkan efisiensi tinggi, dimana target tahunan telah terpenuhi lebih awal dari periode kerja tahunan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan kinerja pada indikator persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kejelasan Prosedur Tindak Lanjut dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai bentuk pengendalian terhadap potensi risiko ketidaktepatan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan;
2. *Monitoring* dan Evaluasi berkala sehingga memungkinkan intervensi dan koreksi cepat sebelum terjadinya potensi risiko seperti keterlambatan pelaporan akibat kendala teknis pada sistem aplikasi;
3. Alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan jumlah target sarana dan kompetensi petugas sehingga memungkinkan penyelesaian pemeriksaan sarana dengan tepat waktu;
4. Telah diantisipasi ketidaksesuaian dokumen pemeriksaan akibat dokumen yang tidak lengkap, dengan melakukan perencanaan dan pemetaan target yang jelas sejak awal tahun, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mempersiapkan dokumen dan pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.

Meski capaian indikator telah memenuhi kriteria Baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

1. Pemeriksaan sarana fortifikasi memerlukan pengetahuan teknis yang spesifik mengenai proses produksi, rantai pasok bahan baku fortifikan, dan sistem manajemen mutu. Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang ini membuat proses pemeriksaan memakan waktu lebih lama;
2. Proses penindaklanjutan (pembuatan berita acara, surat rekomendasi, surat sanksi, pelaporan ke pusat) seringkali memerlukan administrasi yang sangat detail dan berlapis. Kepatuhan pada prosedur administrasi ini dapat menjadi kendala yang memperlambat penyelesaian akhir, terutama jika sistem aplikasi pelaporan sedang terjadi kendala.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan:

1. Melakukan verifikasi lapangan cepat (surveilans pasca-tindak lanjut) terhadap sarana di triwulan IV untuk memastikan hasil tindak lanjut (pembinaan/sanksi) tetap efektif dan sarana tetap patuh;
2. Menganalisis anggaran yang dihemat karena penyelesaian cepat di triwulan I. Anggaran ini harus dialihkan untuk mendukung indikator yang masih di bawah target atau digunakan untuk pengembangan kompetensi tim.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Program UMKM Berdikari untuk pendampingan pelaku usaha pangan olahan;
2. Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui Mall Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan produk;
3. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan;
4. Kerjasama Lintas Sektor dalam pengawasan dan pengawalan sarana produksi pangan fortifikasi;
5. Program pengembangan kompetensi petugas pada bidang pemeriksaan terutama pengawasan pangan fortifikasi melalui Bimtek Nasional Pengawas Pangan mengenai Fortifikasi pangan yang diselenggarakan oleh Direktorat pengawasan produksi pangan olahan pada tanggal 19 sd 20 Februari 2025 sebagai upaya peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan agar dapat dilakukan dengan tepat sesuai pedoman.

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	Rp4,208,000	Rp4,208,000	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang sama dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Untuk indikator kinerja ini telah selesai dilakukan kegiatan pemeriksaannya karena hanya ada 1 sarana di wilayah BBPOM di Palangka Raya. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan anggaran telah sesuai dengan target yang ingin dicapai.



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan tersebut, diperoleh capaian sasaran kegiatan pada Triwulan III sebesar **103.47**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW III		1 Tahun	TW III	1 Tahun	TW III
17.	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	87.19	93.06	106.73	106.73	▲ Tercapai/ Melampaui	Sangat Baik
18.	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	8	70	75	N/A	107.14	N/A	Sangat Baik
19.	Jumlah Desa Pangan Aman	3	70	70	N/A	100	N/A	Baik
20.	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	100	100	N/A	100	N/A	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					N/A	103.47	N/A	Sangat Baik

17

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) kepada masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok sasaran KIE BPOM mewakili kumpulan individu atau komunitas seperti komunitas lokal/masyarakat adat, komunitas sekolah, komunitas profesi, organisasi masyarakat dan atau komunitas berbasis kepentingan tertentu lainnya.

Tujuan Pelaksanaan KIE di lingkungan BPOM, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan BPOM;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep dan pembagian peran dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan;

3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilih informasi Obat dan Makanan dari BPOM sebagai sumber informasi yang valid dan terpercaya;
4. Meningkatkan pengetahuan serta mendorong sikap dan perilaku positif masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.

Salah satu indikator keberhasilan KIE yang dilaksanakan oleh BPOM diukur melalui indikator kinerja Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT. Tingkat Efektivitas KIE adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan *audiens* KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE yang dilaksanakan meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Pengukuran Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE;
2. Konten atau Informasi KIE;
3. Pemahaman Audiens KIE;
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE.

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan/atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 (satu) bulan terakhir. Teknik survei berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan survei *online*. Jumlah responden dihitung berdasarkan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel *Krejcie Morgan* terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	93.06	106.73	Sangat Baik

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE pada Triwulan III tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya diperoleh nilai 93.06 dengan capaian sebesar 106.73% dengan kriteria Sangat Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	89.83	92.72
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	87.19	91.88	105.38
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	87.19	93.06	106.73

Apabila dilakukan perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi Triwulan I dan Triwulan II sebelumnya terlihat capaian Triwulan III Tahun 2025 meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai Indeks KIE Media yaitu 94.38.

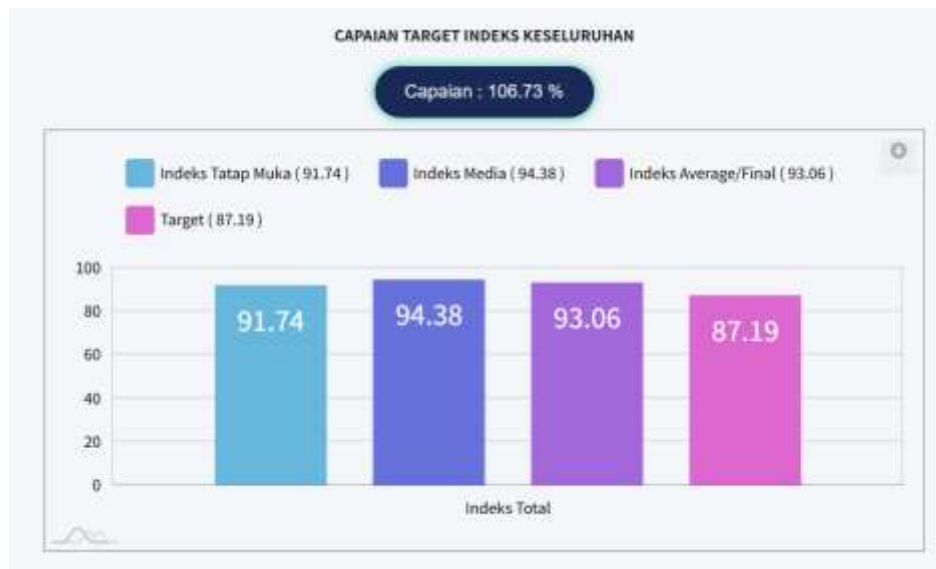
C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	93.06	106.73	 Tercapai/ Melampaui

Capaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Triwulan III Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahun 2025, telah tercapai sebesar 106.73% dengan kriteria Tercapai/Melampaui.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan III tahun 2025, tingkat efektivitas KIE diukur melalui survei pada 503 responden yang terdiri dari 293 responden survei KIE Tatap Muka dan 210 responden KIE Media. Tingkat efektivitas KIE Triwulan III diperoleh dengan capaian sebagai berikut:



Pengukuran kriteria penilaian pada masing-masing jenis KIE adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas, rata-rata responden menilai narasumber/petugas KIE/sumber informasi yang disajikan bagus sehingga audiens dapat memahami materi dengan baik dan merasakan manfaatnya. Responden juga menilai konten/materi yang disajikan sangat menarik, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi KIE merupakan kunci penting untuk menjangkau masyarakat luas dari berbagai generasi sesuai dengan media sosial yang digemari.

Materi KIE yang sangat diingat oleh responden adalah:

1. Tugas dan wewenang BPOM;
2. Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan;
3. Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM Mobile;
4. Tanya HALOBPOM/Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan;
5. Jangan asal percaya *hoaks*. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM;
6. Cegah Stunting dengan Keamanan Pangan;
7. Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

Responden juga memberikan masukan materi KIE yang dibutuhkan, antara lain:

1. Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman;
2. Penjelasan Berita/isu Obat dan Makanan yang beredar di Masyarakat;
3. Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

Atas capaian indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Palangka Raya tahun 2025, untuk perbaikan kinerja pada Triwulan IV direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Meningkatkan minat masyarakat terhadap KIE Obat dan Makanan melalui pengembangan ragam kegiatan sesuai dengan kebutuhan informasi per segmen target *audiens* dengan sentuhan kearifan lokal, melibatkan *influencer/public figure* serta mitra strategis BPOM lainnya;
2. Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda *Setting* Nasional Tahun 2025;
3. Memperhatikan ragam kegiatan KIE dengan merujuk pada Top 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat, yaitu KIE Penyuluhan Langsung (41.4%), media sosial (13.9%), dan webinar/daring (9.5%).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa agenda KIE dan pemberdayaan masyarakat yang sudah berlangsung dan dilaksanakan oleh BBPOM POM di Palangka Raya untuk meningkatkan efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan III Tahun 2025, antara lain:

1. Optimalisasi KIE melalui Media Sosial, kepatuhan terhadap agenda setting periode bulan Juli- September 2025 dan meningkatkan peran Tim Publikasi secara maksimal.
2. Melaksanakan KIE dan Laboratorium Keliling bersama Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah pada Kegiatan Huma Betang Night Festival, dengan jumlah pedagang yang diedukasi sebanyak 23 orang.

3. Melaksanakan Penguatan Peran Kader PKK melalui Bimtek Keamanan Pangan kepada 100 orang anggota TP PKK Kota Palangka Raya.
4. Melaksanakan KIE Daring Kosmetik Aman dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM dan Skin expert/dermatologist/influencer, dengan jumlah peserta 90 orang.
5. Melaksanakan KIE Stunting pada Kelurahan Bereng Bengkel yang merupakan lokus intervensi desa pada Program Prioritas nasional Desa Pangan Aman, dengan jumlah peserta 40 orang.
6. Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi SPPG dalam Program MBG melalui Inovasi Betang Akzi, dengan jumlah peserta 47 orang.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	106.73	Rp 69.142.100	Rp 61.237.078	88.57	1.21	0.21	95% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp 272.628.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp 170.411.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp 102.217.000.

18

Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	70	75	107.14	Sangat Baik

Jumlah sekolah dengan Pembudayaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota target kegiatan Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dalam program Prioritas Nasional. Penetapan pemilihan wilayah pada tahun 2025 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk dan sebaran sekolah yang banyak di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *stunting* sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Selain itu, penetapan wilayah target intervensi ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: B-PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap Triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Pada Triwulan III 2025 tahapan kegiatan Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman yang telah dilakukan adalah tahapan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Palangka Raya yang menjadi lokus intervensi tahun 2025 ini. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk membentuk sumberdaya yang kompeten terkait keamanan pangan melalui pembentukan kader/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam pelaksanaan intervensi pembudayaan PJAS aman disekolah. Tahapan ini dilaksanakan secara daring kepada 8 (delapan) sekolah yang menjadi target intervensi tahun 2025 pada tanggal 16 Juli 2025.

Persentase Realisasi tahapan program desa pangan aman pada Triwulan III ini sebesar 75% dari seluruh tahapan yang dilakukan dengan persentase capaian 107.14% dengan kriteria Sangat Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	5	5	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	35	50	142.86
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	70	75	107.14

Target kinerja Triwulan III (70%) mengalami peningkatan sebesar 50% apabila dibandingkan dengan target Triwulan II (35%) sedangkan realisasi Triwulan III (75%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 50% dibandingkan dengan realisasi Triwulan II (50%). Capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 sebesar 75% apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya (Triwulan II) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kriteria Sangat Baik. Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan Pembudayaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi triwulan III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	8	75	N/A	Tidak Bisa Disimpulkan

Capaian kinerja triwulan III tahun 2025 sebesar 75% belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi triwulan memiliki satuan berbeda dengan target tahunan. Target triwulan dihitung berdasarkan persentase tahapan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang telah selesai dilaksanakan sedangkan target tahunan dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang berhasil menjalankan program Sekolah dengan pembudayaan keamanan pangan secara keseluruhan. Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2025. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan III ini, capaian BBPOM di Palangka Raya melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun analisis penyebab keberhasilan dari peningkatan kinerja dan sebagai bahan evaluasi terhadap penyempurnaan kinerja kedepannya antara lain:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak tim keamanan pangan sekolah berjalan dengan baik sehingga proses persiapan dan pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Atas capaian indikator Jumlah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Palangka Raya Triwulan III tahun 2025 ini, untuk mempertahankan kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target output dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan tim keamanan pangan sekolah serta kader keamanan pangan sekolah dalam melaksanakan intervensi kegiatan pembudayaan PJAS aman di 8 (delapan) sekolah yang menjadi target intervensi;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan III 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Sekolah dengan Pembudayaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah: melaksanakan tahapan Bimbingan Teknis Kader yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 secara daring dalam upaya menciptakan sumber daya berkualitas melalui pembentukan kader/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan obat di daerah khususnya di sekolah-sekolah yang menjadi target intervensi.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	107.14	Rp 26.380.000	Rp 24.337.940	92.26	1.16	0.16	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp 344.372.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp 311.747.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp 32.625.000.



Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, untuk pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bergizi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program intervensi keamanan pangan dengan konsep pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pangan yang aman dan bergizi. Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh BPOM dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat desa di bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa melalui Program Keamanan Pangan Desa.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki Kader Keamanan Pangan Desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri, atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Dalam Program Desa Pangan Aman, desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) yang mana salah satu desa yang menjadi target adalah desa stunting. Tahapan Program Desa Pangan Aman meliputi kegiatan Advokasi, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis Komunitas Desa, Fasilitasi Keamanan Pangan, kegiatan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan, monitoring dan evaluasi serta lomba desa pangan aman.

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada Program Desa Pangan Aman Ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Desa Pangan Aman	70	70	100	Baik

Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Penetapan pemilihan wilayah/lokus intervensi pada tahun 2025 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *stunting* sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Selain itu, penetapan wilayah target intervensi ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: B-PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap Triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Pada Triwulan III 2025 tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang telah dilakukan adalah pelaksanaan tahapan fasilitasi praktek keamanan pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan di Kelurahan Tanjung Pinang, Bereng Bengkel dan Kelurahan Kameloh Baru. Kegiatan ini bertujuan untuk memotret praktek keamanan pangan yang dilakukan oleh komunitas sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi oleh Kader Keamanan Pangan. Persentase Realisasi tahapan program desa pangan aman pada Triwulan III ini sebesar 70% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 100% dengan kriteria Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah Desa Pangan Aman	5	5	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	70	70	100
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	70	70	100

Target kinerja Triwulan III (70%) masih sama dengan target Triwulan II (70%) begitu pula dengan realisasi Triwulan III (70%) masih sama dengan realisasi Triwulan III (70%) dengan kriteria Baik.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan evaluasi dan analisis keberhasilan guna menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi triwulan III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Desa Pangan Aman	3	70	N/A	Tidak Bisa Disimpulkan

Capaian kinerja triwulan III tahun 2025 sebesar 70% belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi triwulan memiliki satuan berbeda dengan target tahunan. Target triwulan dihitung berdasarkan persentase tahapan program Desa Pangan Aman yang telah selesai dilaksanakan sedangkan target tahunan dihitung berdasarkan jumlah desa yang berhasil menjalankan program Desa Pangan Aman secara keseluruhan. Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2025. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan III, capaian BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun analisis penyebab keberhasilan dari peningkatan kinerja dan sebagai bahan evaluasi terhadap penyempurnaan kinerja kedepannya antara lain:

1. Pada Triwulan III hanya dilaksanakan tahapan Fasilitasi Praktik Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan di tiga (3) Kelurahan yang menjadi target intervensi. Sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, tahapan fasilitasi tidak dimasukkan ke dalam pembobotan penilaian pencapaian progress program Desa Pangan Aman yang telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan BPOM terkait efisiensi anggaran;
2. Komunikasi dan koordinasi dengan kader keamanan pangan di tiga (3) kelurahan tersebut berjalan cukup baik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam teknis pelaksanaan di lapangan yang harus dievaluasi dan dianalisis lebih mendalam untuk penyempurnaan di periode waktu selanjutnya.

Atas capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Palangka Raya Triwulan III tahun 2025 ini, untuk penyempurnaan kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

- a. Melakukan evaluasi dan analisis terkait efektivitas dan kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Pelaksanaan tahapan program yang terkendala anggaran akibat efisiensi anggaran mengakibatkan berkurangnya komunikasi langsung kepada desa/kelurahan yang diintervensi. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring dirasakan kurang efektif dilakukan kepada masyarakat desa/kelurahan karena kondisi geografis, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana menjadi kendala utama dalam efektivitas pelaksanaan program.
- b. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target output dan realisasi anggaran yang telah direncanakan.
- c. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan tim keamanan pangan dan kader keamanan pangan desa/kelurahan.

Meskipun telah berhasil mencapai target yang ditetapkan di Triwulan III, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program Desa Pangan Aman di Triwulan III ini antara lain:

1. Dampak efisiensi anggaran dirasakan cukup signifikan terhadap pelaksanaan Program Desa Pangan Aman dimana petugas BBPOM di Palangka Raya mendapatkan kesulitan untuk melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan secara mandiri. Hal ini karena tingkat pemahaman yang

masih dirasa kurang untuk melakukan tahapan kegiatan secara mandiri;

2. Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi praktek keamanan pangan secara mandiri masih belum dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh terkait dokumentasi kegiatan;
3. Koordinasi dan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya secara daring dengan Desa/Kelurahan dirasa kurang efektif.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan III 2025 ini, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Desa Pangan Aman antara lain: melaksanakan tahapan Fasilitasi

Praktek Keamanan Pangan secara mandiri oleh Kader Keamanan Pangan dalam upaya mendapatkan gambaran terkait praktek keamanan pangan komunitas oleh Kader Keamanan Pangan secara mandiri sebelum dan sesudah diintervensi dari sisi perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku.

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	100	Rp 33.609.389	Rp 9.553.389	28.42	3.52	2.52	75% (tidak efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja yang sesuai target namun, realisasi anggaran yang tidak tercapai, dengan capaian hanya 28.42%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp 501.455.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp 461.650.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp 39.805.000.

20

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Sedangkan komunitas pasar adalah kelompok yang meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar dan anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) oleh pedagang pasar di Pasar Rakyat.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Jumlah pasar aman berbasis komunitas adalah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	100	100	Sangat Baik

Pada Triwulan III Tahun 2025 seluruh tahapan kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas yang telah sesuai target yang telah ditetapkan yang meliputi tahapan advokasi komitmen lintas sektor, Bimtek & Penyuluhan Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar serta Pengawasan Pasar yang telah diintervensi tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 2 Juli 2025. Persentase Realisasi tahapan program pasar aman berbasis komunitas pada Triwulan III ini sebesar 100% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 100% dengan kriteria Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	5	5	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	70	80	114.29
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	100	100	100

Target kinerja Triwulan III (100%) mengalami peningkatan sebesar 30% apabila dibandingkan dengan target Triwulan II (70%) sedangkan realisasi Triwulan III (100%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 30% dibandingkan dengan realisasi Triwulan II (70%). Capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan sebelumnya (TW II) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kriteria Baik.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029. Pelaksanaan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini telah dilaksanakan pada Triwulan III dengan kriteria “Baik” sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini kedepannya akan dijadikan bahan evaluasi dan analisis dalam menetapkan target tahapan dan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di tahun selanjutnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	100	N/A	Tidak Bisa Disimpulkan

Capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 sebesar 100% belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi Triwulan memiliki satuan berbeda dengan target tahunan. Target triwulan dihitung berdasarkan persentase tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah selesai dilaksanakan sedangkan target tahunan dihitung berdasarkan jumlah pasar yang berhasil menjalankan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas secara keseluruhan. Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2025-2029.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan III ini, capaian BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Ketepatan perencanaan yang mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi lapangan;
2. Komunikasi, kolaborasi dan kerja sama yang baik antara petugas BBPOM di Palangka Raya, Fasilitator Pasar Pangan Aman serta komunitas pasar;
3. *Team work* dan koordinasi internal dalam pelaksanaan rencana kerja;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan;
5. Pemilihan lokasi target pasar yang akan diintervensi sangat tepat karena terletak dekat dengan kantor BBPOM di Palangka Raya sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan dan monitoring seluruh program walaupun mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran.

Atas capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas BBPOM di Palangka Raya Triwulan III tahun 2025 ini, untuk penyempurnaan kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan tepat waktu;
2. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan kegiatan agar dapat menyusun langkah-langkah strategis terkait penetapan target dan pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas secara menyeluruh;

Walaupun pencapaian realisasi pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini telah dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan, akan tetapi masih terdapat kendala-kendala di lapangan, antara lain:

1. Masih ada Pedagang pasar lebih memilih berjualan dibanding mengikuti kegiatan yang dilaksanakan baik oleh petugas BBPOM di Palangka Raya maupun Fasilitator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas;
2. Rencana aksi yang disusun oleh petugas fasilitator pasar yang telah diintervensi dirasakan masih kurang maksimal;
3. Petugas BBPOM di Palangka Raya kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kasi yang telah disusun oleh Fasilitator Pasar yang telah diintervensi tahun sebelumnya secara mandiri, yang mana kegiatan monitoring dan evaluasi hanya dilakukan secara daring sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan III 2025 ini, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Pasar Aman Berbasis Komunitas antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan tahap 2 pada tanggal 25 Juli 2025 dalam upaya untuk memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar melalui penyebaran informasi dan sosialisasi keamanan pangan kepada pedagang pasar.
2. Pengawasan Pasar yang telah diintervensi tahun sebelumnya, yaitu Pasar Rakyat Pelita Hulu, Pasar Lama dan baru Kuala Kurun pada tanggal 2 Juli 2025 untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan keberlanjutan program secara mandiri oleh Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait demi mewujudkan kemandirian pangan.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	Rp 23.735.000	Rp 19.984.703	84.20	1.19	0.19	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp 137.071.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp 110.536.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp 26.535.000.



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya pendampingan
UMKM dalam pemenuhan standar
keamanan dan mutu

Keberhasilan sasaran kegiatan Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu diukur dari 1 (satu) indikator kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat terlihat dalam tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW III		1 Tahun	TW III	1 Tahun	TW III
21.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14.1	87	91.54	Tidak dapat dibanding -kan karena satuan berbeda	105.22	Tidak dapat dibanding -kan karena satuan berbeda	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					N/A	105,22	N/A	Sangat Baik



Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Selaku institusi pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai salah satu misi dalam memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Badan POM berperan penting dalam pendampingan pelaku usaha untuk memenuhi aspek keamanan, mutu dan khasiat/manfaat sehingga dapat memenuhi ketentuan izin edar. Dalam menjalankan misi tersebut maka ditetapkanlah pengukuran indikator kinerja terhadap Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan atau IP CPPOB Pangan Olahan.

Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM telah melaksanakan kegiatan pendampingan UMKM guna mendukung indikator tersebut dengan realisasi sebesar 62.33%. Indikator ini merupakan indikator yang sama dengan indikator yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya (2024) namun dengan definisi operasional yang berbeda sesuai dengan Petunjuk Teknis pendampingan yang telah ditetapkan.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	87	91.54	105.22	Sangat Baik

Realisasi pendampingan UMKM hingga akhir TW III mencapai 91.54%. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 91% dari target UMKM yang direncanakan telah berhasil didampingi dan mencapai tahap akhir, yaitu memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Kinerja dalam pendampingan UMKM untuk memperoleh rekomendasi sertifikat/izin hingga Triwulan III Tahun 2025 dinilai Sangat Baik. Capaian melebihi 100% menunjukkan efektivitas tinggi dari program pendampingan UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa proses coaching, verifikasi, dan pemberian rekomendasi berjalan lebih baik dengan tingkat kelulusan UMKM lebih tinggi dari yang direncanakan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19	21.67	114.05
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	61	62.33	102.18
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	87	91.54	105.22

Capaian di atas 100% pada setiap triwulan menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan pendampingan (mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis, hingga audit awal) berjalan sangat efisien dan cepat, melebihi ekspektasi yang ditetapkan dalam target per triwulan

Kinerja TW I yang sangat tinggi (114.05%) menunjukkan keberhasilan BBPOM di Palangka Raya dalam mengidentifikasi dan memproses UMKM yang sudah hampir siap serta penyelesaian *carry over* hasil pendampingan tahun sebelumnya.

Kinerja kembali meningkat di TW III (105.22%) dibandingkan TW II (102.18%). Peningkatan ini menunjukkan adanya akselerasi terencana percepatan pendampingan di paruh kedua tahun berjalan untuk memastikan target tahunan akan tercapai atau terlampaui.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14.1	91.54	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda

Terdapat perbedaan kriteria perhitungan atas capaian antara target tahunan dan target tiap triwulan. Realisasi sebesar 91.54% pada tabel di atas tidak merujuk pada 91.54% sarana yang didampingi, melainkan persentase atas tahapan pendampingan UMKM yang telah diselesaikan.

Sementara target Tahun 2025 adalah 14.1% diukur atas persentase jumlah UMKM yang harus didampingi hingga memperoleh rekomendasi sertifikat/izin dari jumlah total UMKM yang didampingi dalam 1 periode Renstra.

Sehingga capaian kinerja TW III tidak dapat dibandingkan dengan target tahunannya. Dapat disampaikan di sini bahwa hasil capaian tahapan sebesar 91.54% pada TW III (yang merupakan nilai kumulatif proses) telah memenuhi target jumlah sarana sebesar 14.1% dimana BBPOM di Palangka Raya telah berhasil merekomendasikan sertifikat/izin terhadap 11 sarana UMKM dari 78 sarana UMKM yang menjadi target 1 periode renstra.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian yang secara konsisten melampaui target menunjukkan bahwa program pendampingan telah dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Telah mengantisipasi kualitas pendampingan yang kurang optimal dengan melaksanakan tahapan pendampingan dan *coaching* sesuai dengan juknis pendampingan pelaku usaha serta fokus pada poin-poin krusial dalam pemenuhan persyaratan GMP serta pengembangan kompetensi fasilitator agar fasilitator yang telah dilatih memiliki komitmen tinggi dan kompeten, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan UMKM, sehingga meningkatkan motivasi dan kepatuhan UMKM;
2. Telah mengantisipasi adanya GAP dimana terdapat UMKM dengan komitmen dan partisipasi aktif UMKM dinilai masih rendah dengan melakukan grading terhadap UMKM. Grading dilakukan dengan memilih UMKM yang memiliki komitmen tinggi dan infrastruktur dasar yang memadai berdasarkan GAP persyaratan sarana sehingga potensi kelulusan dan percepatan proses rekomendasi lebih besar;

3. Telah mengantisipasi putusnya kemitraan dengan Perguruan tinggi dalam melanjutkan inovasi UMKM BERDIKARI dengan mengubah skema fasilitator mahasiswa dari mahasiswa dengan mata kuliah kewirausahaan menjadi mahasiswa magang;
4. Telah mengantisipasi adanya hubungan keluarga antara pelaku usaha dan petugas fasilitator dengan mengendalikan integritas petugas melalui surat pernyataan benturan kepentingan;
5. Telah mengantisipasi adanya praktik pemberian gratifikasi dan pemerasan dengan mengendalikan integritas petugas fasilitator melalui surat pernyataan benturan kepentingan dan mencantumkan "Petugas Tidak Diperkenankan Menerima Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun" pada surat tugas.

Meski capaian indikator Sangat Baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

1. Pelaku UMKM memiliki keterbatasan waktu, SDM, dan dana. Meskipun sudah didampingi, banyak yang lambat dalam mengimplementasikan rekomendasi atau menunda investasi perbaikan sarana;
2. Proses pendampingan UMKM OBA/Kos/Pangan memerlukan pengujian sampel produk untuk proses registrasi. Kendala muncul jika antrian pengujian di laboratorium padat dan hasil uji tidak keluar tepat waktu hal ini belum terecantum dalam daftar risiko tahun berjalan, sehingga perlu diusulkan untuk dapat masuk kedalam daftar risiko tahun depan;
3. Anggaran pendampingan yang terbatas sehingga pendampingan lebih banyak dilakukan di ibukota provinsi dan lebih berfokus pada pra-sertifikasi sampai terbit rekomendasi hal ini belum terecantum dalam daftar risiko tahun berjalan, sehingga perlu diusulkan untuk dapat masuk kedalam daftar risiko tahun depan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sekaligus mengatasi potensi risiko, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan:

1. Mendorong UMKM yang telah lulus untuk menjadi mentor bagi UMKM lain (pendekatan *peer-to-peer*), sehingga beban kerja pendamping formal dapat berkurang;
2. Formalisasi pelaksanaan pendampingan dan *coaching* yang lebih ringan melalui telepon atau chat oleh tim pendamping, sehingga beban kerja di lapangan berkurang tetapi kualitas tetap terjaga;
3. Libatkan lintas sektor yang memiliki program serupa guna peningkatan kinerja dan efisiensi kegiatan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan antara lain:

1. Program UMKM Berdikari untuk pendampingan pelaku usaha UMKM;
2. Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui Mall Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan pendaftaran produk;

3. Kegiatan pengawasan sarana distribusi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dibidang obat dan makanan khususnya dalam pemenuhan legalitas usaha;
4. Kegiatan koordinasi Lintas sektor terutama dalam pembentukan Fasilitator eksternal (fasilitator Mahasiswa) guna pendampingan pelaku usaha secara mandiri.

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	105.22	Rp 6.700.000	Rp 6.500.000	97.01	1.08	0.08	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp 43.762.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp 36.162.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp 7.600.000.



Sasaran Kegiatan

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan Kelima yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja UPT. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW III		1 Tahun	TW III	1 Tahun	TW III
22.	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	96	71	71.67	74.66	100.94	▲ Akan tercapai	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					74.66	100.94	▲ Akan tercapai	Sangat Baik

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$(Jumlah\ perkara\ SPDP \times 0.15 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ I \times 0.55 + Jumlah\ perkara\ P21 \times 0.85 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ II \times 1) / Jumlah\ Target\ Perkara \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut termasuk di dalamnya tahapan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	71	71.67	100.94	Sangat Baik

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan III sebesar 71.67%. Jika dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar 71% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan III tahun 2025 sebesar 100.94% dengan kriteria Sangat Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	18	33.33	185.17
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	38	33.33	87.71
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	71	71.67	100.94

Pada Triwulan I Tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya mencatat Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar 33,33%. Realisasi yang sama juga tercatat pada Triwulan II Tahun 2025, yakni sebesar 33,33% belum adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Dan pada Triwulan III Tahun 2025 terjadi peningkatan Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan III sebesar 71,67%. Jika dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar 71% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan III tahun 2025 sebesar 100,94% dengan kriteria Sangat Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	96	71.67	74.66	 Akan tercapai

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan III sebesar 71.67%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 96% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan III tahun 2025 sebesar 74.66% dengan kriteria Akan Tercapai. Indikator kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya merupakan gambaran *progress* penanganan perkara sekaligus pencapaian output perkara. Target sebesar 96% pada akhir tahun tercapai jika target sebanyak 3 (tiga) perkara dapat diselesaikan seluruhnya sampai dengan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada pihak kejaksaan).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan periode triwulan III tahun 2025 dengan nilai capaian 100,94% dan kriteria Sangat Baik.

Pencapaian ini didukung oleh target penanganan perkara sebanyak 3 (tiga) perkara dalam tahun 2025 dengan rincian progres penanganan perkara sebagai berikut:

- 1 (satu) perkara dalam triwulan I tahun 2025, telah mencapai tahap 2 dan terdakwa telah dinyatakan bersalah serta mendapatkan vonis pengadilan dengan kekuatan hukum tetap;
- 1 (satu) perkara dalam triwulan III tahun 2025, telah mencapai tahap 2 dan sedang dalam proses persidangan;
- 1 (satu) perkara dalam tahap awal penyidikan yakni penyerahan SPDP ke kejaksaan.

Analisis penyebab capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Besar POM di Palangka Raya periode TW III tahun 2025 dengan kategori Sangat Baik, antara lain:

1. Pendalaman informasi terkait dugaan pelanggaran dan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan secara berkelanjutan
2. Pertukaran informasi yang baik dari lintas sektor terkait dugaan pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan
3. Efisiensi penanganan perkara, selama periode pelaporan pada Triwulan III tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya menangani 2 (dua) perkara sekaligus, dimana penanganan pada 1 (satu) perkara dari tahap SPDP sampai dengan Tahap 2 bisa diselesaikan dalam satu triwulan dan 1 (satu) perkara masih dalam tahap SPDP dikarenakan perkara ini didapatkan pada akhir Triwulan III tahun 2025.

4. Komitmen dan dukungan pimpinan BBPOM di Palangka Raya terhadap keberhasilan penyidikan dengan memberikan dukungan penuh baik secara kebijakan, sumber daya, maupun fasilitasi koordinasi lintas sektor.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) fungsi penindakan BBPOM di Palangka Raya secara aktif membangun dan menjalankan strategi koordinasi yang efektif dengan unsur *Criminal Justice System (CJS)*, meliputi: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan jajaran wilayah serta Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota.
6. Dukungan dan kerja sama internal yang baik antara fungsi penindakan dan fungsi terkait lainnya di BBPOM di Palangka Raya (laboratorium, pemeriksaan, anggaran, SDM dll), sinergi antar fungsi ini menciptakan ekosistem kerja yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung penyelesaian perkara secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan *Criminal Justice System* guna percepatan penyelesaian pemberkasan perkara
2. Monev laporan Kemajuan Penyidikan
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan jaringan intelijen yang telah terbentuk guna memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas penindakan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan kelima, yaitu "*Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya*", BBPOM di Palangka Raya melaksanakan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui satu kegiatan utama yang tertuang dalam POK tahun 2025, yaitu: Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Palangka Raya)

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi BBPOM di Palangka Raya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021, yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021. Peraturan tersebut mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, termasuk pelaksanaan kegiatan intelijen serta penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dalam rangka penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, selama bulan pelaporan pada triwulan III tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya melaksanakan berbagai kegiatan intelijen dan penyidikan serta pendampingan proses hukum, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan/Operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan;
Kegiatan/operasi intelijen sebagai bagian dari upaya penindakan terhadap dugaan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan berbagai sumber informasi, antara lain: sumber pengaduan masyarakat

yang mencerminkan partisipasi publik dalam pengawasan keamanan produk, hasil patroli siber yang dilakukan secara berkala untuk memantau aktivitas daring terkait potensi pelanggaran dan tindak pidana; dan hasil kegiatan intelijen rutin yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan aktif terhadap produk ilegal dan yang tidak memenuhi syarat.

Setiap informasi yang diterima ditindaklanjuti melalui proses pendalaman informasi intelijen dengan pendekatan analisis berbasis 5W1H (What, Who, When, Where, Why, dan How) untuk mendapatkan data akurat terkait bentuk pelanggaran itu sendiri, menentukan pelaku kejahatan, menetapkan waktu dan lokasi kejadian, menemukan motif dan modus operandi serta menyusun langkah tindak lanjut atas rekomendasi intelijen yang dituangkan dalam laporan intelijen dan siap digunakan sebagai dasar penyidikan.

2. Operasi Penindakan terhadap dugaan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan;

Operasi penindakan merupakan tahapan akhir dalam rangkaian proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Sebagai bentuk *ultimum remedium*, penindakan dilakukan setelah seluruh upaya pembinaan, pengawasan, dan intelijen tidak lagi efektif dalam menghentikan atau mencegah terjadinya pelanggaran.

Pada Triwulan III Tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya menindaklanjuti hasil kegiatan/operasi intelijen dan pengawasan yang telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana serta tercukupinya alat bukti yang sah dengan operasi penindakan. Berdasarkan hasil operasi penindakan yang dianalisis dan verifikasi, dilakukan peningkatan status penanganan kasus menjadi perkara *Pro Justitia* melalui mekanisme Gelar perkara sebagai dasar dalam penetapan Tersangka. Dengan rincian perkara hasil operasi penindakan sbb:

- a. Operasi penindakan terhadap peredaran sediaan farmasi yang *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan/atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian* yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2025 dengan hasil 1 (satu) perkara *Pro Justitia*. Dari operasi tersebut, didapatkan barang bukti dengan total keekonomian yang berhasil diamankan mencapai Rp. 2.200.000,-. Adapun jenis komoditi yang melanggar Undang-Undang Kesehatan meliputi Obat Keras Golongan Obat-obat Tertentu (OOT) jenis Tramadol tablet Tanpa Izin Edar yang *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan/atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian* yang melanggar UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemberkasan Perkara Penyidikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Kalteng dan pelimpahan di Kejaksaan Negeri di Kabupaten Barito Selatan (*Tahap 2*) dan sedang dalam Pelaksanaan Persidangan;
- b. Operasi penindakan terhadap peredaran sediaan farmasi yang *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu DAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian* yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025 dengan hasil 1 (satu) perkara *Pro Justitia*. Dari operasi tersebut, didapatkan barang bukti dengan total keekonomian yang berhasil diamankan mencapai Rp. 105.715.398,-. Adapun jenis komoditi yang melanggar Undang-Undang Kesehatan meliputi Sediaan farmasi berupa: Obat

Tradisional Tanpa izin edar 48 (empat puluh delapan) macam; Obat Tanpa Izin Edar 2 (dua) macam; Obat Keras 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) macam; Obat Keras Kedaluwarsa 14 (empat belas) macam; Suplemen Kesehatan Kedaluwarsa 2 (dua) macam; Obat Bebas Terbatas dengan kandungan Golongan OOT (Obat-Obat Tertentu) 4 (empat) macam; Obat Bebas Terbatas 3 (tiga) macam;

Obat Bebas 2 (dua) macam yang *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu DAN dilakukan oleh perorangan tanpa adanya izin berusaha yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian* yang melanggar UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemberkasan Perkara Penyidikan baru memasuki tahap awal penyidikan yaitu hingga tahap penyerahan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Korwas PPNS Polda Kalimantan Tengah. Penanganan terhadap tersangka dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan penyidikan, yaitu: Penahanan Tersangka di rutan Tahti Polda Kalteng.

Proses penyidikan dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan pemenuhan syarat formil dan materiil perkara. Penanganan terhadap tersangka dilakukan melalui dua mekanisme sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan penyidikan, yaitu: Penahanan Tersangka di rutan Tahti Polda Kalteng dan mekanisme wajib lapor untuk tersangka yang tidak dilakukan penahanan. Seluruh rangkaian kegiatan penindakan ini memberikan gambaran bahwa penanganan perkara sebagai bentuk penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan menjunjung tinggi asas legalitas, akuntabilitas, dan profesionalisme guna perlindungan masyarakat dari risiko penggunaan produk farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan.

3. Pemberian Layanan Keterangan Ahli, yang diberikan atas permintaan Aparat Penegak Hukum di wilayah hukum Kalimantan Tengah guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	100.94	Rp 258.201.000	Rp 200.428.748	77.63	1.30	0.30	95% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja telah melampaui target namun capaian realisasi anggaran



belum mencapai target dengan capaian 77.63%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi menjadi kurang dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien.



Sasaran Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran Kegiatan Keenam yaitu Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW III		1 Tahun	TW III	1 Tahun	TW III
23.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	55.56	100.00	▼ Perlu upaya keras	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					55.56	100.00	▼ Perlu upaya keras	Baik

23

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (*Profiling Siber*) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara perhitungan dan Formula:

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	Baik

Realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan III sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 yaitu sebesar 50% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dengan kriteria Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	50	50	100.00
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	50	50	100.00

Realisasi indikator kinerja pada triwulan III tahun 2025 ini adalah 50% jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja triwulan sebelumnya yaitu triwulan I dan triwulan II tahun 2025 akan memberikan gambaran nilai yang tetap, hal ini dikarenakan indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan di tahun 2025 dan target yang diukur sampai dengan B-11 adalah terpenuhinya Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%).

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu (dihitung 1 Laporan jika telah melaporkan tepat waktu, yaitu maksimal tanggal 25 di bulan pelaporan) dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun (tiap bulan target pelaporannya adalah 1 laporan).

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55.56	 Perlu upaya keras

Realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan III sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 90% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan III tahun 2025 sebesar 55.56% dengan kriteria Perlu Upaya Keras. Indikator kinerja persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan gambaran *progress* pembuatan laporan Analisis Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan sekaligus pencapaian output Laporan Analisis.

Target sebesar 50% pada akhir triwulan III didapatkan jika terpenuhinya laporan analisis penelusuran siber yaitu Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan setiap bulan berjalan dan dilaporkan. Target sebesar 90% pada akhir tahun tercapai jika terselesaikannya laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di ranah siber dan cegah tangkal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai Besar POM di Palangka Raya periode triwulan III tahun 2025 dengan nilai capaian 100% dan kriteria Baik.

Analisis pendukung penyebab capaian persentase keberhasilan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai

Besar POM di Palangka Raya periode triwulan III tahun 2025 dengan kategori Baik, antara lain:

1. Capaian Target Laporan Analisis Triwulan III tahun 2025;

Pada Triwulan III Tahun 2025, target penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ditetapkan sebesar 50%.

Target ini dihitung berdasarkan persentase ketepatan waktu pelaporan hasil Analisis Penelusuran Siber yang dilakukan selama periode Juli hingga September 2025. Ketepatan waktu pelaporan menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja dan efektivitas proses analisis siber yang dilaksanakan.

2. Komitmen dan dukungan pimpinan;

Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kegiatan Analisis Penelusuran Siber (meliputi Patroli Siber dan Penjejak Digital/Profiling Siber) berjalan dengan baik berkat komitmen dan dukungan yang tinggi dari pimpinan. Dukungan tersebut tercermin dalam arahan strategis, fasilitasi sumber daya, serta penguatan koordinasi lintas fungsi dalam bentuk SK Tim Patroli Siber lintas fungsi, yang secara signifikan berkontribusi terhadap kualitas dan ketuntasan laporan yang disusun.

3. Dukungan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI;

Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan patroli siber dan *profiling* kejahatan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaporkan oleh BBPOM di Palangka Raya. Dukungan ini memperkuat tindak lanjut rekomendasi *takedown* terhadap konten ilegal melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan *Indonesian E Commerce Association* (IdEA) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing, sehingga mempercepat proses penanganan pelanggaran di platform digital dan dukungan dalam Analisa Digital Forensik terhadap dugaan pelanggaran pidana bidang Kesehatan melalui Laboratorium Digital Forensik Siber Obat dan Makanan Badan POM RI.

4. Dukungan dan Kerja Sama Internal di BBPOM di Palangka Raya.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan di media daring, BBPOM di Palangka Raya membentuk Tim Patroli Siber (Patroli Siber) lintas fungsi. Tim ini dibentuk atas inisiatif Kepala BBPOM di Palangka Raya dan melibatkan berbagai unit kerja di luar fungsi penindakan, seperti Tata Usaha, Infokom, Pemeriksaan, dan Pengujian. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat antara fungsi penindakan dan fungsi-fungsi lainnya, mempercepat pengumpulan informasi, serta memperkaya basis data pengawasan. Melalui kerja sama ini, pengawasan daring dapat dilakukan secara lebih optimal, akurat, dan responsif terhadap ancaman kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Pembentukan Patroli Siber menjadi contoh nyata bagaimana koordinasi lintas fungsi mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan menegaskan komitmen BBPOM di Palangka Raya dalam melindungi masyarakat dari produk ilegal dan berbahaya.

Rekomendasi yang diberikan adalah :

- Monitoring dan reviu secara berkala terhadap hasil patroli siber
- Monitoring dan reviu secara berkelanjutan meningkatkan efektivitas pengawasan serta memastikan tindak lanjut yang optimal terhadap temuan pelanggaran di media daring

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan ketujuh, yaitu *"Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif"*, BBPOM di Palangka Raya melaksanakan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui satu kegiatan utama yang tertuang dalam POK tahun 2025, yaitu: Koordinasi (Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Palangka Raya Mata Anggaran AEA)

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi BBPOM di Palangka Raya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021, yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021. Peraturan tersebut mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, termasuk pelaksanaan cegah tangkal,

dan analisis penelusuran siber terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dalam rangka Penyusunan laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Palangka Raya pada TW III tahun 2025 melaksanakan berbagai kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Patroli Siber* terhadap pelanggaran atau kejahatan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan di media daring merupakan salah satu upaya strategis yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh Tim Patroli Siber BBPOM di Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau, mendeteksi, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum di dunia maya yang berkaitan dengan peredaran produk obat dan makanan. Hasil dari patroli ini kemudian dilaporkan dalam bentuk link atau tautan melalui Aplikasi *Dashboard Crawler* (ADC) yang direkomendasikan untuk dilakukan tindakan *takedown* kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI, sebagai bagian dari langkah perlindungan masyarakat terhadap produk ilegal atau berisiko.
2. *Profiling* kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di media daring merupakan langkah lanjutan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Tim Patroli Siber BBPOM di Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk menelusuri secara lebih mendalam berbagai bentuk pelanggaran yang ditemukan di dunia maya, serta menggali informasi yang lebih komprehensif. Melalui *profiling* ini, akan dianalisis apakah pelanggaran yang terjadi memenuhi unsur pasal dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat ditentukan langkah tindak lanjut yang tepat, baik berupa tindakan *Pro Justitia* (penegakan hukum melalui jalur pidana) maupun *Non Pro Justitia* (penanganan administratif atau lainnya). *Profiling* menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kasus mendapatkan respons yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
3. Pelaksanaan penyusunan Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui analisis penelusuran Siber TW III tahun 2025 yang telah dilakukan tindak lanjut oleh Direktorat Siber Obat dan makanan berdasarkan hasil monev bulanan, dengan data sbb:

No.	Bulan	Jumlah Link yang dilaporkan	Rekomendasi Pengajuan		Keterangan
			Takedown	Profiling	
1	Januari	18	18	3	Link/akun/tautan
2	Februari	18	18	3	Link/akun/tautan
3	Maret	29	29	4	Link/akun/tautan
4	April	30	30	6	Link/akun/tautan
5	Mei	19	19	5	Link/akun/tautan
6	Juni	26	26	8	Link/akun/tautan
7	Juli	29	29	4	Link/akun/tautan
8	Agustus	13	13	6	Link/akun/tautan
9	September	17	17	10	Link/akun/tautan

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	Rp 1.100.000	Rp 100.000	9.09	11.00	10.00	75% (tidak efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja telah sesuai target namun realisasi anggaran yang tidak mencapai target, dengan capaian hanya 9.09%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 72.439.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 71.339.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 1.100.000. Yang perlu diperbaiki adalah perencanaan dalam penetapan rencana penarikan dana yang menjadi target realisasi anggaran di triwulan III ini.

Sasaran Kegiatan **Layanan Publik UPT** **yang prima**

Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu Layanan Publik UPT yang prima. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW III		1 Tahun	TW III	1 Tahun	TW III
24.	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	Belum ada target bulan ini	4.96	105.53	N/A	▲ Tercapai/ Melampaui	N/A
Capaian Sasaran Kegiatan					105.53	N/A	▲ Tercapai/ Melampaui	N/A

Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) di instansi pemerintah merupakan alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari berbagai aspek. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Untuk memantau kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan BPOM dilaksanakan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Implementasi PEKPPP, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023, memiliki peran krusial sebagai bagian integral dari indikator kinerja bagi UPT BPOM dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Mengukur Efektivitas dan Akuntabilitas Pelayanan:** PEKPPP menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengukur sejauh mana UPT BPOM telah berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator-indikator yang diukur dalam PEKPPP, seperti kepuasan pengguna layanan, waktu penyelesaian layanan, dan penanganan pengaduan, secara langsung mencerminkan efektivitas operasional dan akuntabilitas UPT BPOM kepada masyarakat.

2. **Identifikasi Area Peningkatan:** Melalui proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, UPT BPOM dapat mengidentifikasi area-area dalam penyelenggaraan pelayanan yang masih memerlukan perbaikan. Hasil PEKPPP menjadi *feedback* berharga untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyempurnakan infrastruktur pelayanan. Dengan demikian, PEKPPP bukan hanya sekadar penilaian, tetapi juga alat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
3. **Transparansi dan Kepercayaan Publik:** Informasi mengenai kinerja pelayanan publik yang dihasilkan melalui PEKPPP dapat menjadi dasar untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap data kinerja pelayanan, mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh UPT BPOM. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.
5. **Keselarasan dengan Tujuan Strategis Nasional:** Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan mengimplementasikan PEKPPP secara efektif, UPT BPOM turut berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
6. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Data dan informasi yang dihasilkan dari PEKPPP menjadi landasan yang kuat bagi pimpinan UPT BPOM dalam mengambil keputusan strategis terkait peningkatan kualitas pelayanan. Keputusan yang didasarkan pada data kinerja yang valid akan lebih terukur dampaknya dan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan kepada seluruh unit pelayanan publik di Lingkungan BPOM dan diukur berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada target bulan ini	4.96	N/A	N/A

Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya dilakukan pada triwulan III s.d IV tahun 2025 dengan mengacu target indeks tahunan sebesar 4.7. Pada triwulan III hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik melalui PEKPPP Tahun 2025 telah diterima, dengan nilai 4.96 dengan predikat Pelayanan Prima.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada target bulan ini	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	Belum ada target bulan ini	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	Belum ada target bulan ini	4.96	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya diperoleh setelah mengikuti PEKPPP Tahun 2025, sehingga capaian terhadap realisasi kinerja triwulan sebelumnya belum dapat dilaksanakan. Untuk mendapatkan gambaran kinerja yang berkesinambungan, capaiannya dapat dilihat melalui program/kinerja yang menunjang capaian kinerja. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik yang akan diperhitungkan pada triwulan IV tahun 2025 sebagai capaian kinerja tahunan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.96	105.53	▲ Tercapai/ Melampaui

Pada Triwulan III hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik melalui PEKPPP Tahun 2025 telah diterima, dengan nilai 4.96 dengan predikat layanan Pelayanan Prima sehingga pengukuran indikator tahunan telah dapat dihitung pada triwulan III. Capaian indikator kinerja ini sebesar 105.53% dengan kriteria Tercapai/Melampaui.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dimana tercapai melebihi target yang ditetapkan, yaitu 4.96 (kategori pelayanan prima). Pencapaian ini merupakan bukti dari komitmen kuat seluruh jajaran dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pedoman evaluasi kinerja terkait.

Adapun poin penting yang menjadi faktor keberhasilan capaian adalah sebagai berikut:

1. **Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan:** Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan meningkat tajam, ditandai dengan ketersediaan dan keteraksesan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang informatif dan dipublikasikan secara luas. Maklumat Pelayanan juga dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten;
2. **Pengelolaan Pengaduan:** Terdapat peningkatan signifikan dalam kecepatan dan ketuntasan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Pemanfaatan sistem pengaduan yang terintegrasi berjalan efektif, meningkatkan kepercayaan publik;
3. **Inovasi Pelayanan Publik:** Adopsi teknologi dan inovasi, seperti layanan digital terpadu melalui layanan pengujian sampel pihak ketiga melalui SIPT Terintegrasi, mekanisme pengaduan melalui kanal pengaduan resmi (SP4N Lapor, Halo Infokom, akun media sosial BBPOM di Palangka Raya, Lapor Kabalai), dan Implementasi Inovasi SMART LAURA telah berhasil meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan, yang menjadi faktor pendorong utama kenaikan skor;
4. **Profesionalisme SDM:** Program peningkatan kompetensi aparatur yang berfokus pada *service excellent* dan etika pelayanan terbukti efektif dalam meningkatkan sikap dan perilaku petugas layanan, yang tercermin dari tingginya hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mandiri yang dikumpulkan setiap bulannya;
5. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik kelompok rentan.

Atas capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya, untuk perbaikan kinerja pada triwulan III direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan publik;
2. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik;
3. Mengawal implementasi Inovasi Layanan Publik SMART LAURA secara berkesinambungan;
4. Mengembangkan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang Layanan Publik sampai dengan triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan Review Standar Layanan Publik dan ditetapkan melalui SK Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor: OT.03.04.16A.01.25.26 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Publik di BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025 serta telah dipublikasikan pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya;
- Telah dilakukan review Maklumat Pelayanan dan ditetapkan melalui SK Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor: OT.03.04.16A.01.25.27 Tahun 2025 dengan menambahkan komitmen dalam memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui serta anak-anak) serta telah dipublikasikan pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya;
- Telah membuat publikasi hasil SKM Mandiri bulan Januari-September tahun 2025 pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya;
- Telah memperhatikan kebijakan jam pelayanan/kerja bagi pelanggan dan aturan pemberian penghargaan kepada pelaksana layanan;
- Telah menerapkan aturan terkait penerapan 5S di area layanan publik;

- Telah melaksanakan sosialisasi terkait konsultasi dan pengaduan menggunakan SP4N-LAPOR kepada masyarakat/publik;
- Melaksanakan pelaporan layanan melalui www.simpellpk.pom.go.id;
- Menyusun Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagai PPID Pelaksana BBPOM di Palangka Raya;
- Melakukan publikasi Keamanan Obat dan Makanan pada media luar ruang (Baliho) pada jalan protokol dengan materi: Cek Produk Kosmetik Aman, BPOM Mobile, SKM 2024 & Maklumat Pelayanan;
- Melaksanakan Bimtek Penyediaan Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan kepada seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya, tenaga kontrak, sekuriti dan resepsionis pada bulan Mei 2025;
- Melaksanakan Forum Konsultasi Publik yang dihadiri oleh stakeholder pelayanan publik, pengguna layanan, pakar, dan perwakilan organisasi masyarakat pada bulan Juni 2025;
- Melaksanakan perbaikan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya dalam memenuhi standar layanan publik bagi kelompok rentan;
- Melaksanakan dan memantau Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kab/Kota melalui Inovasi SMART LAURA di kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Kapuas dan Kota Palangka Raya (layanan tatap muka sesuai jadwal);
- Telah selesai pelaksanaan SKM Tahun 2025 (terpusat);
- Telah mengikuti Desk Monev PEKPPP Tahun 2025;
- Mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Badan Publik dan PPID Pelaksana yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan BPOM;
- Telah dikembangkan Inovasi Pelayanan Publik yang dikembangkan melalui rencana aksi AoC BBPOM di Palangka Raya, yaitu Inovasi Jendela Kinerja, BALANGA (buku informasi standar layanan publik dengan huruf *Braille*) dan SIKAP GASPOL (sosialisasi kanal pengaduan resmi BBPOM di Palangka Raya bagi masyarakat).

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW III	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW III	Capaian Realisasi Anggaran TW III	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Belum ada target bulan ini	Rp 17.165.000	Rp 15.994.991	93.18	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun. Namun hasil penilaian telah diterima dengan capaian 105.53 jadi berdasarkan pengukuran efisiensi capaian untuk indikator ini telah efisien.

Sasaran Kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran Kegiatan Kedelapan yaitu Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW III		1 Tahun	TW III	1 Tahun	TW III
25.	Nilai Pembangunan ZI UPT	87.83	88.19	0	100.41	Belum ada target bulan ini	 Tercapai/ Melampaui	Belum dapat dinilai capaiannya
26.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83.87	0	0	Penilaian dilakukan diakhir tahun	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
27.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	0	0	Penilaian dilakukan diakhir tahun	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
28.	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	3	0	0	Penilaian dilakukan diakhir tahun	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
Capaian Sasaran Kegiatan					N/A	N/A	N/A	N/A

25 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang mencakup berbagai aspek, seperti organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bersih, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi melibatkan perubahan fundamental dalam cara pemerintah beroperasi, termasuk struktur organisasi, prosedur kerja, dan peraturan perundang-undangan.

Reformasi birokrasi mencakup berbagai aspek penting, seperti:

- **Organisasi:** Memastikan kelembagaan pemerintah efisien dan terstruktur;
- **Tata Laksana:** Menyederhanakan prosedur kerja dan meningkatkan efisiensi;
- **Peraturan Perundang-undangan:** Memastikan adanya dasar hukum yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
- **Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur negara;
- **Pengawasan:** Memperkuat mekanisme kontrol untuk mencegah penyimpangan;
- **Akuntabilitas:** Menegakkan prinsip pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- **Pelayanan Publik:** Meningkatkan kualitas dan menjangkau masyarakat;
- **Pola Pikir dan Budaya Kerja:** Mengubah mindset dan perilaku aparatur negara menuju yang lebih positif dan berintegritas;

Tujuannya adalah:

- **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel:** Melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- **Birokrasi yang Efektif dan Efisien:** Meningkatkan produktivitas dan hasil kerja;
- **Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas:** Menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan;
- 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan review oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22.5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17.5 %

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Pembangunan ZI UPT	0	88.19	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya

Realisasi kinerja pada Triwulan III dibandingkan dengan target pada Triwulan berjalan masuk pada kriteria capaian Belum dapat dinilai capaiannya dikarenakan Indikator Kinerja ini memiliki target yang bersifat tahunan yang capaiannya akan diketahui pada Triwulan III - Triwulan IV. Terdapat perubahan kriteria dari pengukuran sebelumnya dimana kriteria Tidak Dapat Disimpulkan mulai pada capaian di atas 120% diturunkan menjadi di atas 110% disesuaikan dengan SE terbaru untuk Pengukuran dan pelaporan Kinerja 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai Pembangunan ZI UPT	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	0	88.19	Belum dapat dinilai capaiannya

Realisasi kinerja pada Triwulan III dibandingkan dengan target pada Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 Tidak Dapat Dilakukan (N/A) karena penetapan target pada Triwulan III maupun Triwulan II tidak dilakukan. Meskipun berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.08.25.277 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada BBPOM di Palangka Raya diperoleh hasil sebesar 88.19.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Pembangunan ZI UPT	87.83	88.19	100.41	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja pada Triwulan III dibandingkan dengan target pada Tahun 2025 masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui sebesar 88.9 atau capaian 100.41% dari target 87,83 berdasarkan berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.08.25.277 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada BBPOM di Palangka Raya.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hasil capaian target pada Triwulan III sebesar 88,9 atau capaian 100,41% dari target 87,83 berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.08.25.277 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada BBPOM di Palangka Raya dapat disampaikan bahwa pembangunan ZI telah dilaksanakan dengan baik oleh setiap Pokja. Faktor penyebab keberhasilan atas Pembangunan ZI dilihat pada penilaian, sebagai berikut :

- BBPOM di Palangka Raya berhasil mempertahankan konsistensi pembangunan ZI dengan memotret adanya progres pembangunan ZI (before/after)
- pengisian LKE ZI dan data dukung LKE melalui link yang telah disediakan Badan POM telah sesuai dan memenuhi syarat
- pelaksanaan rencana kerja prioritas telah dijalankan dengan baik oleh setiap Pokja
- implementasi, monitoring dan evaluasi inovasi telah dilakukan dengan baik dan konsisten
- kegiatan pendukung yang diinisiasi *Agent of Change* (AoC) bisa menjadi katalisator atas pembangunan ZI BBPOM di Palangka Raya

BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2024 berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pada Surat Inspektur Utama Badan POM No: B-PI.06.06.7.11.24.657 tanggal 28 November 2024, Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada BBPOM di Palangka Raya

yang memuat saran perbaikan/rekomendasi untuk dibuat rencana dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Belum seluruh rencana kerja pembangunan ZI dilakukan dan hasil pemantauan secara berkala belum dilengkapi dengan kendala serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan tindak lanjut atas RATL tersebut;	Melakukan pemantauan seluruh rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan memadai dengan disertai kendala serta RATL dan tindak lanjut atas RATL yang telah disusun tersebut	Menyusun ulang rencana kerja (Renja) Pembangunan ZI sesuai yang memuat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk tahun 2025. Akan disusun format pemantauan Renja yang baru versi tahun 2025, yang lebih lengkap dengan menambahkan kolom berisikan kendala serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan tindak lanjut atas RATL.
2	Belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;	Menyusun peta kompetensi dan gap kompetensi kebutuhan organisasi dan existing sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi Pemenuhan SDM pengelola pengembangan kompetensi dimana pada tahun 2024, pengembangan kompetensi belum optimal dikelola karena ketidaktersediaan Analis SDM Aparatur
3	Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat belum dilakukan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat secara berkala	Refreshment terhadap SOP Monitoring dan Evaluasi pengaduan masyarakat agar dapat dilaporkan secara konsisten. Melakukan monitoring berkala elamahamen dan bajakah oke
4	Belum terdapat reviu standar pelayanan terhadap standar pelayanan berdasarkan FKP Tahun 2023	Melakukan reviu standar pelayanan berdasarkan hasil FKP	Melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan berdasarkan rekomendasi hasil Forum Konsultasi Publik. Telah dilakukan reviu terhadap standar Pelayanan Publik berdasarkan hasil FKP tanggal 25 September 2024 yang menghasilkan SK Standar Pelayanan Publik No OT.03.04.16A.01.25.26 tanggal 02 Januari 2025
5	Belum seluruhnya	Melaksanakan	<i>Continuous improvement</i> dilaksanakan

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Inovasi yang dikembangkan didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran atas dampak dari penerapan inovasi tersebut	continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	antara lain dengan melakukan : 1. Penyempurnaan tampilan inovasi Kahayan Tutu Bahalap untuk pemberian informasi terkait jenis parameter uji, tarif layanan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan PMK No. 73 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan pengawas Obat dan Makanan, 2. Melakukan identifikasi penambahan parameter uji dengan timeline 1x24 jam 3. Penyempurnaan tampilan Learning Center Inovasi Elamahamen (E-Commerce dan pelaku Usaha Nakal Masyarakat Harap Melaporkan) terus dipertahankan dengan terus dilakukannya publikasi pada media daring milik BBPOM di Palangka Raya dan pada kegiatan-kegiatan <i>offline</i> yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya. Dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada kemanfaatan dan keefektifan inovasi Elamahamen itu sendiri.

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			Inovasi Elamahamen pada bulan November 2024 dikembangkan oleh tim AoC dengan mekanisme “jemput bola” yakni menempelkan poster Elamahamen di Sarana Distribusi diawali dengan Sarana Distribusi Kosmetik untuk semakin membumikan Elamahamen pada masyarakat di Kalimantan Tengah agar berani melaporkan jika ada pelanggaran di bidang Obat dan Makanan Latar belakang dan <i>Continuous improvement</i> dalam inovasi Monelaku dilakukan upaya peningkatan ketelusuran data terkait pelaporan kinerja dan output yang dihasilkan dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. dengan cara sheet kertas kerja akan dibuatkan tautan yang terkoneksi dengan laporan kertas kerja sehingga data

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			tertelusur dengan jelas 11 Inovasi yang dikembangkan oleh AOC telah didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran atas dampak dari penerapan inovasi tersebut yang tertuang dalam Laporan Akhir Pelaksanaan Rencana Aksi (Inovasi) AOC Tahun 2024
6	Telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat namun belum direplikasi.	Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan serta mendokumentasikan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain serta melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan inovasi tersebut	1. Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, telah mulai diluncurkan inovasi unggulan yang baru yaitu inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat namun belum direplikasi, inovasi tersebut adalah SMART LAURA (Sistem Manajemen Layanan Publik yang Akurat, Responsif, Transparan, Lengkap, Aman dan User-Friendly). 2. Dengan berkolaborasi bersama AOC akan diciptakan inovasi-inovasi pada seluruh area perubahan serta mendokumentasikan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi tersebut. 3. Inovasi-inovasi tiap area perubahan yang akan disusun kedepannya bersama AoC, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain serta melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan inovasi tersebut.

Pembangunan ZI diperoleh nilai sebesar 88.90 atau capaian 100.41% dari target 87.83. Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat capaian nilainya masih bisa ditingkatkan untuk masing-masing Pokja dan 1 bagian di aspek pengungkit (Capaian Kinerja lebih baik) dinilai tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun peningkatan pembangunan ZI, Inspektorat memberikan saran atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI, yaitu:

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (POKJA)
1	Telah terdapat prosedur/mechanisme dalam pembentukan tim kerja ZI namun belum terdapat kriteria penentuan tim untuk setiap area pembangunan ZI	Menetapkan kriteria penentuan tim untuk setiap area pembangunan ZI	Manajemen Perubahan
2.	Pemantauan dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI telah	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja	Manajemen

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (POKJA)
	dilakukan. Namun, tidak terdapat kendala/hambatan yang dihadapi serta tindak lanjut yang dilakukan untuk rencana kerja yang belum terlaksana	pembangunan ZI yang dilengkapi dengan kendala/hambatan serta tindak lanjut yang dilakukan secara berkala	Perubahan
3.	Belum terdapat SOP Mikro yang mengatur pelaksanaan inovasi	Menyusun SOP untuk pelaksanaan inovasi	Tata Laksana
4.	Belum terdapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE, termasuk dampak implementasi SPBE pada pelayanan publik	Tata Laksana
5.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi hanya dilaksanakan pada inovasi terkait fungsi penyidikan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh penggunaan teknologi informasi	Tata Laksana
6.	Unit kerja telah menyusun laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan transformasi digital melalui inovasi sistem internal secara berkala namun hasil monitoring dan evaluasi tidak menunjukkan adanya perubahan kondisi dari periode sebelum dan setelahnya	Menyusun analisis perbandingan kondisi sebelum dan sesudah transformasi digital untuk menunjukkan efektivitas dan perubahannya	Tata Laksana
7.	Belum terdapat bukti bahwa pelaksanaan mutasi internal telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan berdasarkan hasil assessment pegawai.	Menyusun mekanisme movev mutasi/rotasi dan mendokumentasikan seluruh proses untuk memastikan mutasi/rotasi telah dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan berdasarkan hasil assessment pegawai	Sistem Manajemen SDM Aparatur
8.	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi hanya berisi monitoring ketercapaian Jumlah Pelajaran (JP) dari masing-masing pegawai belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja	Melakukan dan menyusun monitoring dan evaluasi kinerja pasca pelatihan dikaitkan dengan peningkatan kinerja	Sistem Manajemen SDM Aparatur
9.	Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja namun belum terdapat data dukung bahwa implementasi tersebut telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan	Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan aturan disiplin/kode etik serta mendokumentasikan hasilnya untuk menjamin konsistensi pelaksanaan aturan disiplin	Sistem Manajemen SDM Aparatur
10.	Keterlibatan pimpinan secara langsung pada perencanaan maupun	Melibatkan pimpinan secara langsung pada proses	Sistem Manajemen SDM

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (POKJA)
	pemantauan kinerja belum terdokumentasi dengan baik	perencanaan dan pemantauan kinerja dan mendokumentasikan arahan pimpinan dengan baik	Aparatur
11.	Belum seluruh personel/SDM pengelola akuntabilitas telah mengikuti pelatihan terkait akuntabilitas kinerja	Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait akuntabilitas kinerja kepada seluruh SDM pengelola akuntabilitas	Sistem Manajemen SDM Aparatur
12.	Sebagian besar capaian kinerja utama tercapai 100% dari target yang ditetapkan, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya.	Melakukan identifikasi penyebab penurunan kinerja dan menyusun strategi pemulihan berbasis data serta target capaian yang realistis	Akuntabilitas
13.	Unit kerja telah melakukan upaya dalam pengendalian gratifikasi dengan melakukan public campaign terkait gratifikasi, namun tidak terdapat pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi selama tiga tahun terakhir	Meningkatkan upaya internalisasi terkait pengelolaan gratifikasi pada unit kerja dan mendorong seluruh pegawai untuk aktif dalam pelaporan penerimaan ataupun penolakan gratifikasi	Pengawasan
14.	Telah terdapat inovasi terkait pengendalian dan pengawasan pada unit kerja, namun belum terdapat laporan implementasi inovasi tersebut	Menyusun laporan pelaksanaan inovasi pengendalian dan pengawasan untuk menunjukkan progres dan dampaknya secara nyata	Pengawasan
15.	Monitoring pengaduan telah dilakukan secara berkala, namun belum terdapat analisis atas hasil monitoring pengaduan yang nihil	Melakukan monitoring pengaduan secara berkala disertai dengan kendala yang dihadapi dan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, termasuk analisis jika hasil monitoring pengaduan nihil	Pengawasan
16.	Belum terdapat reviu standar pelayanan terhadap standar pelayanan berdasarkan masukan stakeholder	Melakukan reviu standar pelayanan dengan mengacu pada masukan stakeholder dan hasil SKM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
17.	Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan telah menyusun laporan monitoring dan evaluasi, namun belum terlihat bukti pelaksanaan tindak lanjut telah selesai dilaksanakan	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat dengan RATL yang berkelanjutan dan tuntas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (POKJA)
18.		Melaksanakan <i>continuous improvement</i> dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta	Semua Pokja

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (POKJA)
		pelayanan publik yang prima	

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil penilaian atas Pembangunan ZI sebesar 88.19 masih di atas target sebesar 87.83, namun jika dicermati lebih dalam, masih terdapat capaian nilainya masih bisa ditingkatkan untuk masing-masing Pokja dan 1 bagian di aspek pengungkit (Capaian Kinerja lebih baik) dinilai tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga masih ada peluang perbaikan agar pembangunan ZI di masa mendatang semakin baik lagi, yaitu:

1. Pokja Manajemen Perubahan masih ditemukan: belum terdapat kriteria penentuan tim untuk setiap area pembangunan ZI, pemantauan dan evaluasi tidak terdapat kendala/hambatan yang dihadapi serta tindak lanjut yang dilakukan untuk rencana kerja yang belum terlaksana
2. Pokja Penataan Tatalaksana masih ditemukan: belum terdapat SOP Mikro yang mengatur pelaksanaan inovasi, belum terdapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi hanya dilaksanakan pada inovasi terkait fungsi penyidikan, hasil monitoring pemanfaatan transformasi digital tidak menunjukkan adanya perubahan kondisi dari periode sebelum dan setelahnya.
3. Pada Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur masih ditemukan: belum terdapat bukti bahwa pelaksanaan mutasi internal telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan berdasarkan hasil *assessment* pegawai, laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi hanya berisi monitoring ketercapaian Jumlah Pelajaran (JP) dari masing-masing pegawai belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja, belum terdapat data dukung bahwa implementasi inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukti keterlibatan pimpinan secara langsung pada perencanaan maupun pemantauan kinerja belum terdokumentasi dengan baik, belum seluruh personel/SDM pengelola akuntabilitas telah mengikuti pelatihan terkait akuntabilitas kinerja.
4. Pokja Akuntabilitas masih ditemukan: sebagian besar capaian kinerja utama tercapai 100% dari target yang ditetapkan, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya.
5. Pokja Peningkatan Pengawasan masih ditemukan: tidak terdapat pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi selama tiga tahun terakhir, belum terdapat laporan implementasi inovasi pengendalian dan pengawasan, belum terdapat analisis atas hasil monitoring pengaduan yang nihil.
6. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik masih ditemukan: belum terdapat reviu standar pelayanan terhadap standar pelayanan berdasarkan masukan stakeholder, survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terdapat laporan monitoring dan evaluasi, namun belum terlihat bukti pelaksanaan tindak lanjut telah selesai dilaksanakan

Pada Triwulan III ini sebagai bukti keberlangsungan pembangunan ZI, telah dilaksanakan berbagai kegiatan/program kerja, yaitu:

- Sharing session yang dilakukan AoC BBPOM di Palangka Raya bersama dengan AoC BPOM di Pangkal Pinang pada 25 Juli 2025;
- Hal yang menggembirakan adalah apresiasi terhadap Inovasi Smart Laura dimana inovasi tersebut telah dilakukan ATM oleh UPT: BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Kupang dan BPOM di Jember;
- Pelaksanaan berbagai kegiatan semarak yang diinisiasi oleh AoC dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, diantaranya: bazaar, jalan sehat dan lomba atraktif lainnya yang bertujuan meningkatkan kembali komitmen dan refreshment terhadap dinamika kerja yang dijalani;
- Pelaksanaan rencana kerja tiap kelompok kerja yang dijadwalkan dilaksanakan pada Triwulan III sesuai target yang direncanakan.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW III Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW III Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW III 2025	Capaian Indikator Kinerja TW III Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai Pembangunan Zona Integritas	Belum ada target bulan ini	Rp 4.311.754.257	Rp 4.393.436.578	101.89	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun. Namun hasil penilaian telah diterima dengan capaian 100.41 jadi berdasarkan pengukuran efisiensi capaian untuk indikator ini belum efisien.

26

Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang memiliki kapabilitas, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Palangka Raya merupakan nilai yang didapatkan dari hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya yang mencakup :

- a. Perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Evaluasi internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Pencapaian kinerja atas output maupun outcome.

Dengan rentang nilai pemenuhan sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 s.d 90	A	Memuaskan
> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
> 60 s.d 70	B	Baik
> 50 s.d 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 s.d 50	C	Kurang
0 s.d 30	D	Sangat Kurang

Penilaian AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2025 dilaksanakan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi penilaian AKIP yang dilakukan penilaiannya pada akhir tahun.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menilai terhadap rangkaian pelaksanaan kegiatan SAKIP berupa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada semester I tahun 2025 telah terlaksana melalui kegiatan evaluasi pada tanggal 26 Agustus 2025. Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Nilai AKIP ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga akan diukur realisasinya pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Nilai AKIP digunakan untuk mengukur mewujudkan tata kelola pemerintah BBPOM di Palangka Raya secara optimal bersama dengan tiga indikator lainnya yaitu, Nilai Pembangunan ZI, Nilai Kinerja Anggaran dan Nilai Maturitas Risiko pada Renstra 2025-2029. Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Nilai AKIP ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai AKIP UPT BPOM	83.87	0	Penilaian dilakukan di akhir tahun	 Perlu Upaya Keras

Pengukuran indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menilai terhadap rangkaian pelaksanaan kegiatan SAKIP berupa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada semester II tahun 2025 dengan pelaksanaan evaluasi pada awal triwulan III. Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Nilai AKIP ditetapkan diukur pada bulan duabelas tahun 2025, sehingga akan diukur realisasinya pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Komitmen dan keterlibatan pimpinan beserta seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya menjadi dasar dan landasan yang kuat dalam pelaksanaan SAKIP. Berdasarkan evaluasi capaian Nilai AKIP tahun 2024, BBPOM di Palangka Raya belum berhasil mencapai target, namun terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Penilaian tahun 2024 terhadap masing-masing komponen SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Dokumen revisi RAPK tanggal 8 Mei 2024 dan laporan evaluasi paruh waktu Renstra belum dipublikasikan pada subsite BBPOM di Palangka Raya;
- Terdapat perubahan Kepala BBPOM di Palangka Raya pada bulan September 2024 namun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 belum dilakukan proses perubahan.

2. Pengukuran Kinerja

Pemenuhan kriteria komponen pengukuran kinerja berupa tersedianya manual IKU dan SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja dan dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja. Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- SOP Mikro Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja serta Penyusunan Laporan telah mencantumkan tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan data, namun belum mencantumkan tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan setelah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan;
- Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) / kertas kerja capaian indikator tidak dapat ditelusur / berbeda dengan dokumen monev (sumber data);
- Perbedaan realisasi indikator kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;

- d. Belum tertib dalam mengisi kolom kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS tahun 2024;
 - e. Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS belum optimal yaitu belum mencantumkan kendala yang memadai atas kegagalan pencapaian target.
3. Pelaporan Kinerja
- Perbandingan realisasi kinerja pada laporan kinerja telah disajikan, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
- a. Belum disajikan perbandingan realisasi kinerja yang bersangkutan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya pada laporan kinerja triwulan II dan III tahun 2023 dan 2024.
 - b. Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja pada SKP pimpinan, SIMETRIS, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja
 - c. Laporan kinerja tahun 2023 tidak menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.
 - d. Terdapat realisasi indikator kinerja periode berjalan dengan capaian menurun terus menerus namun belum disusun rencana aksi secara memadai.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Laporan evaluasi internal telah disusun setiap triwulan, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
- a. Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP
 - b. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I dan III tahun 2024 belum menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya
 - c. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I s.d III tahun 2024 belum menyajikan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan
 - d. Laporan Evaluasi Internal Triwulan III tahun 2024 belum menyajikan identifikasi kendala dan/atau rencana tindak lanjutnya per indikator kinerja
 - e. Perbedaan penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut pada SIMETRIS B09 tahun 2024, Laporan Evaluasi Internal Triwulan III tahun 2024 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2024
 - f. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan identifikasi kendala untuk indikator yang belum mencapai target dan/atau kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target.
 - g. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan rencana aksi yang spesifik/relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi

Atas capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2024, untuk perbaikan kinerja pada tahun 2025, direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada subsite satuan kerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat;
 - b. Melakukan pemutakhiran Perjanjian Kinerja saat terjadi perubahan pimpinan unit kerja.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Menyempurnakan SOP Mikro pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan mencantumkan tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan saat terjadi kesalahan/perubahan data;

- b. Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monitoring dan evaluasi (sumber data);
 - c. Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
 - d. Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib;
 - e. Menyusun identifikasi kendala pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.
3. Pelaporan Kinerja
- a. Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya;
 - b. Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja antara SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
 - c. Menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran;
 - d. Menyusun rencana aksi yang memadai terhadap realisasi indikator kinerja yang menurun terus menerus tiap triwulannya.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Merencanakan pengembangan kompetensi personel Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja terkait implementasi SAKIP;
 - b. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:
 - 1. Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya
 - 2. Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan
 - 3. Identifikasi kendala dan/atau rencana tindak lanjut per indikator kinerja secara memadai
 - c. Memastikan keselarasan penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut pada SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2025-2029. Pada Renstra 2025-2029 terdapat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan serta indikator kinerjanya, jika pada Renstra 2020-2024 menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) dengan tiga perspektif yaitu stakeholder, internal process dan *learning and growth*. Pada Renstra 2025-2029 menggunakan pendekatan *logical frame*. Pada triwulan II terdapat kebijakan pemerintah dengan terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga mempengaruhi agenda perencanaan kegiatan dengan dilakukannya beberapa kali reviu target yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan III, kegiatan SAKIP yang telah dilaksanakan dari setiap komponen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Penyusunan rancangan awal Renstra 2025-2029;
 - b. Sosialisasi manual IKU 17 Januari 2025;
 - c. Desk penetapan target Renstra 2025-2029 pada tanggal 22-24 Januari 2025;
 - d. Penetapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 10 Februari 2025
 - e. Reviu target rincian output tahun 2025 pasca Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - f. Desk pra rakernas pembahasan usulan target rancangan awal rencana kerja tahun 2026 3-5 Maret 2025;
 - g. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP terkait perencanaan kinerja, berupa publikasi dokumen perencanaan SAKIP pada subsite satuan kerja (dokumen PK, RAPK 2025);
 - h. Bimtek penyusunan Renstra 2025-2029 dan reviu target beberapa indikator kinerja tanggal 24-26 Juni 2025;
 - i. Penyelarasan dan Sinkronisasi Manual IKU baru 9 Juli 2025;
 - j. Penyusunan Draft Renstra 2025-2029 24 Juli 2025;
 - k. Revisi PK RAPK penambahan 3 IKU baru 29 Agustus 2025;
 - l. Penyusunan RKT 2026 26 September 2025.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pengukuran kinerja tahunan 2024;
 - b. Penerbitan surat edaran pengukuran dan pelaporan kinerja tahun 2025, 12 Maret 2025;
 - c. Sosialisasi pengisian RHPK 2025, 10 April 2025;
 - d. Sosialisasi RHPK UPT sesuai Finalisasi Rancangan Renstra BPOM 2025-2029 9 September 2025;
 - e. Pengisian RHPK dan E-performance kinerja tahun 2024 dan triwulan III 2025;
 - f. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP terkait pengukuran kinerja, berupa pengendalian perhitungan capaian kinerja pada RHPK; penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja; pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan pengisian identifikasi kendala pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Bimtek Sakip dan penyusunan laporan kinerja tahun 2024, 10-12 Februari 2025;
 - b. Penyusunan laporan kinerja tahun 2024. 26 Februari 2025, laporan kinerja interim triwulan I dan II 2025;
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP terkait pelaporan kinerja berupa, pengendalian keselarasan penyajian realisasi kinerja antara SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Pelaksanaan evaluasi internal tahunan 2024, 14 Januari 2025;
 - b. Pelaksanaan evaluasi internal triwulan III tahun 2025 dilaksanakan setiap bulan;
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP terkait evaluasi akuntabilitas kinerja berupa, pengembangan kompetensi personel Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja terkait implementasi SAKIP, penyusunan laporan evaluasi internal dengan

menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya, evaluasi atas RAPK terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan dan menuangkan identifikasi kendala dan/atau rencana tindak lanjut per indikator kinerja secara memadai.

- d. Menindaklanjuti rekomendasi penilaian pembangunan zona integritas pada pokja penguatan akuntabilitas yaitu:
 - Melibatkan pimpinan secara langsung pada proses perencanaan dan pemantauan kinerja dan mendokumentasikan arahan pimpinan dengan baik, ditindaklanjuti dengan perbaikan format notulen evaluasi internal sebagai dokumentasi arahan pimpinan
 - Melakukan identifikasi penyebab penurunan kinerja dan menyusun strategi pemulihan berbasis data serta target capaian yang realistis, ditindaklanjuti dengan tabel evaluasi capaian indikator berdasarkan capaian RAPK triwulanan yang mengalami penurunan menjadi di bawah 100%.

Keberhasilan penerapan SAKIP BBPOM di Palangka Raya didukung antara lain:

1. Penetapan dan pembagian peran dalam tim SAKIP yang mengawal pelaksanaan SAKIP secara menyeluruh dari mulai perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja, dan laporan kinerja sampai dengan terbitnya laporan kinerja tahunan dikirimkan.
2. Komitmen Kepala Unit, ketua tim kerja dan seluruh anggota tim SAKIP dalam melaksanakan tugas sesuai peran dalam tim SAKIP dan mengawal ketepatan waktu penyelesaiannya.
3. Menyediakan form-form melalui inovasi Monelaku yang dapat diakses secara online.

Penyusunan perencanaan strategis BPOM tahun 2025-2029 sampai dengan triwulan III tahun 2025 sangat dinamis dengan adanya penambahan 3 IKU baru yaitu :

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
3. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota Pangan Aman

Selain penambahan IKU baru juga diikuti dengan perubahan beberapa manual IKU baik dari sisi pengukuran maupun sifat targetnya, selain itu pada perkembangan terbaru pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 terdapat penambahan muatan indikasi risiko sasaran kegiatan untuk mendorong integrasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dalam rangka pencapaian sasaran. Hal ini menyebabkan dokumen perencanaan berupa Renstra 2025-2029 BBPOM di Palangka Raya belum dapat ditetapkan sampai dengan triwulan III tahun 2025.

Dengan penerapan SAKIP BBPOM di Palangka Raya memberikan efektivitas yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SAKIP membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. SAKIP mendorong pemerintah dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sehingga dapat mencegah inefisiensi anggaran dan meningkatkan kinerja.

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW III Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW III Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW III 2025	Capaian Indikator Kinerja TW III Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai AKIP UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	Rp 366.831.649	Rp 365.025.630	99.51	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

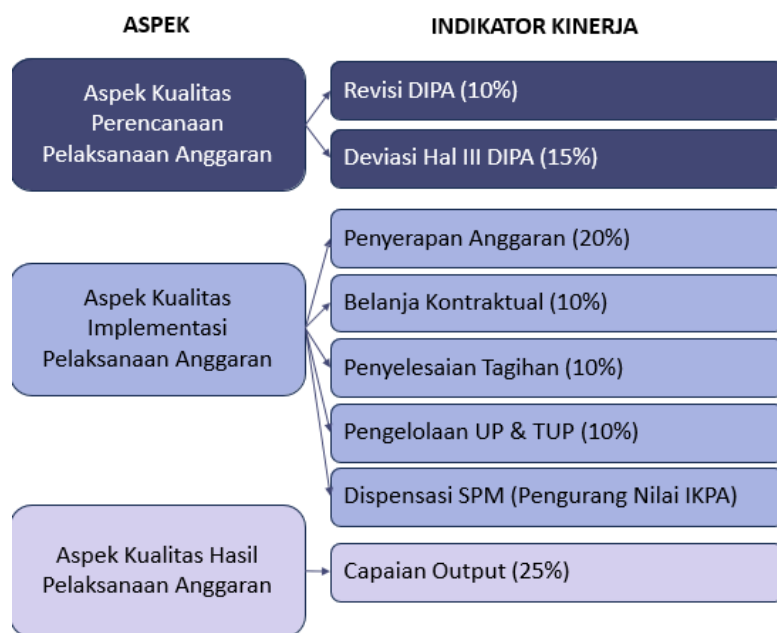
Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun. Jadi yang bisa analisis adalah capaian realisasi anggaran, di triwulan 3 ini realisasinya telah belum mencapai target dengan capaian 99.51%. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp 562.111.7000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp 84.673.400 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp 477.438.300.

27

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian EKA pada tingkat satuan kerja dilakukan terhadap aspek kinerja perencanaan anggaran diukur dengan 2 komponen yaitu “efektivitas perencanaan anggaran” (capaian RO) dan “efisiensi perencanaan anggaran” (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), dimana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran.

Penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Penilaian IKPA dilakukan terhadap 3 aspek yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran (25%), aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran (50%) dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%), sebagai berikut:



Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

$$(Nilai EKA \times 50\%) + (Nilai IKPA \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran ini kemudian dikonversikan sebagai berikut:

Nilai NKA	Kategori	Konversi indeks
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50.01 s.d 60	Kurang	2
60.01 s.d 80	Cukup	3
80.01 s.d 90	Baik	4
90.01 s.d 1000	Sangat Baik	5

Pada tahun 2025 terdapat perubahan frekuensi pengukuran dan satuan penilaian pada indikator Nilai Kinerja Anggaran, dimana pada tahun-tahun sebelumnya, dilakukan penilaian setiap bulan dan berupa persentase, pada tahun 2025, pengukuran indikator Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pada akhir tahun dan dalam bentuk indeks.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan target yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan target yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	5	0	Penilaian dilakukan diakhir tahun	 Perlu Upaya Keras

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan target yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur pada akhir tahun 2025. Pagu alokasi anggaran efektif BBPOM di Palangka Raya setelah dilakukan revisi pada triwulan II tahun 2025 menjadi Rp 16.688.483.000,- dari alokasi Rp 21.587.291.000,- yang mengalami penurunan terhadap DIPA awal yaitu Rp22.128.308.000,-.

Sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dengan dilakukannya efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga yang mempengaruhi penilaian indikator kinerja EKA dan IKPA.

Penilaian EKA pada tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 tahun 2023 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran yang terbit pada tanggal 28 Agustus 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap Rincian Output (RO) Satker yang alokasi anggarannya diblokir karena kebijakan efisiensi anggaran belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RO Satker yang seluruh alokasi anggarannya diblokir (blokir 100%) dikecualikan dari perhitungan variabel Efektivitas dan variabel Efisiensi (RO tersebut tidak diperhitungkan sebagai faktor pembagi); dan
- b. RO Satker yang menggunakan indeks Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) dan sebagai alokasi anggarannya diblokir (blokir < 100%), dalam hal hasil perhitungan pada variabel Efisiensi bernilai lebih dari 20%, maka nilai Efisiensi SBK tetap diperhitungkan dengan nilai maksimal sebesar 20%.

Penilaian IKPA pada tahun 2025 mengacu surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Penyesuaian Data dan perhitungan Indikator IKPA TA 2025, sebagai berikut:

No	Indikator	Ketentuan Penyesuaian
1	Penyerapan anggaran	Pemberian ambang batas toleransi (<i>threshold</i>) realisasi pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal
2	Belanja kontraktual	• Penyesuaian nilai dan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan pada komponen distribusi akselerasi kontrak • Penyesuaian nilai yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian/kontrak belanja modal pada komponen akselerasi belanja modal
3	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai kinerja komponen UP dan TUP Tunai pada periode Januari, Februari, Maret dan April 2025 sebesar 100
4	Capaian output	RO dengan seluruh alokasi RO diblokir (blokir 100%) tidak menjadi objek penilaian Indikator Capaian Output

Penilaian IKPA BBPOM di Palangka Raya pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Suber	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruksi	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	043	063	432072	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	Nilai	100.00	94.29	98.49	100.00	100.00	100.00	100.00	98.84	100%	0.00	98.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.14	19.70	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.15		99.62				100.00				

Indikator yang belum berhasil tercapai adalah pada indikator deviasi halaman III DIPA dengan bobot 15% dengan nilai 94,29 yang juga berdampak terhadap penyerapan anggaran dengan bobot 20% dengan nilai 98,49.

Nilai deviasi halaman III DIPA diperoleh dari penyerapan atas perencanaan pencairan anggaran masing-masing jenis belanja. Jenis belanja yang belum berhasil mencapai target adalah belanja barang dengan deviasi Rp 232.756.835,- (17,90%) terhadap penyerapan yang direncanakan.

Indikator penyerapan anggaran diperoleh dari penyerapan anggaran terhadap ketiga jenis belanja. Ketiga jenis belanja tersebut telah mencapai target dengan realisasi 100% akan tetapi karena dalam penilaian memperhitungkan berdasarkan NKPA tertimbang per jenis belanja barang sehingga diperoleh nilai 98.49.

Ketidakberhasilan kedua indikator antara penyerapan anggaran dan deviasi halaman III DIPA dipengaruhi oleh keterlambatan proses pembayaran pengadaan barang sebagai akibat perubahan kebijakan mekanisme integrasi pembayaran dengan pengadaan barang dan jasa yang sedang dikembangkan pada tahun 2025, keterlambatan barang datang serta kegiatan tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.

Sebagai perbaikan kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III 2025, direkomendasikan beberapa hal:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulan dan target pencapaian output secara cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut.
2. Melakukan monev realisasi anggaran secara berkala untuk menjaga agar deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%, penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dan apabila terdapat pagu minus pada pelaksanaannya.
3. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan perubahan kebijakan oleh kementerian lembaga terkait.
4. Melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dengan memastikan dokumen telah sesuai.
5. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.
6. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran dengan mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya.

7. Meningkatkan pengendalian dan monitoring secara ketat oleh PPK dan ketua tim kerja atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara mingguan terhadap target yang telah ditetapkan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahun 2025, namun komponen penilaiannya yang berasal dari IKPA dinilai setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian antara lain:

- Percepatan penyelesaian belanja modal pada triwulan I tahun 2025.
- Monitoring dan pengendalian rencana penyerapan anggaran secara berkala
- Penyediaan uang persediaan melalui mekanisme LS ke rekening pegawai untuk perjalanan dinas.

Kegiatan yang belum efektif dilaksanakan dan menjadi kendala dalam pencapaian kinerja antara lain:

- Adanya efisiensi anggaran sehingga terjadi perubahan nilai UP baik secara tunas atau KKP, kebijakan pembayaran persediaan menggunakan mekanisme digipay dan cms yang belum dilaksanakan pada setiap transaksi karena kendala sistem.
- Pembayaran pajak menggunakan mekanisme coretax.
- Adanya perubahan proses pengadaan yang beralih dari e-katalog versi 5 menjadi e-katalog versi 6 dan kebijakan pembayaran melalui aplikasi pengadaan sehingga dibutuhkan penyesuaian strategi
- Masih rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun dalam dokumen PoA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi deviasi terhadap RPD halaman III DIPA yang disusun

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW III Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW III Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW III 2025	Capaian Indikator Kinerja TW III Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	Rp 1.423.032.285	Rp 1.417.999.044	99.65	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan diakhir tahun. Jadi yang bisa analisis adalah capaian realisasi anggaran, di triwulan 3 ini realisasinya belum mencapai target dengan capaian 99.65%. Perlu dilakukan perbaikan perencanaan dalam penetapan rencana penarikan dananya, agar di akhir tahun nanti capaiannya dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp 3.420.530.350 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp 1.665.234.350 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp 1.755.296.000.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengatur kerangka kerja dan proses yang digunakan pemerintah untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasional dan sumber daya yang dimilikinya. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, SPIP mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini mencakup identifikasi dan analisis risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pada Renstra tahun 2025-2029, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal, manajemen risiko menjadi salah satu indikator kinerjanya.

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Dalam penerapannya dilakukan penilaian terhadap sejauh mana suatu organisasi mengimplementasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien. Tingkat maturitas risiko digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan implementasi manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Lima kategori tingkat maturitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dalam tabel berikut:

Kategori Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	0-16	1	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	17-32	2	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	33-48	3	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai diatur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	49-64	4	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.

Risk Enabled	65-80	5	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan.
--------------	-------	---	---

Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang dilakukan penilaiannya pada akhir tahun.

A. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Dengan Target Triwulan Yang Bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW III Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum ada target pada TW III 2025	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III
	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Dengan Target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya	3	0	Penilaian dilakukan diakhir tahun	 Perlu Upaya Keras

Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya merupakan indikator kinerja baru pada dokumen Renstra 2025-2029 untuk mengukur tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang mulai diukur menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025. Meskipun demikian, Manajemen Risiko telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2024 BBPOM di Palangka Raya adalah 2.938 dengan tingkat maturitas *Risk Aware*, di dalamnya masih menunjukkan terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

- Belum seluruh tim yang mengelola manajemen risiko mengikuti pelatihan manajemen risiko dan belum terdapat perencanaan pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai;
- Belum menyusun kriteria penentuan level kemungkinan dan dampak dan belum terdapat kertas kerja yang disertai dengan justifikasi penentuan level risiko;
- Masih terdapat tindakan mitigasi pada Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang sama dengan aktivitas pengendalian yang telah dilakukan (*existing control*);
- Belum memanfaatkan Rapat Evaluasi Kinerja maupun Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan reviu/pembahasan manajemen risiko yang dikaitkan dengan capaian kinerja;
- Belum menindaklanjuti masukan Auditor Internal sistem manajemen terintegrasi terkait manajemen risiko.

Terhadap beberapa kelemahan penerapan Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya tahun 2024, direkomendasikan beberapa perbaikan sebagai berikut:

- Menyusun rencana pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai secara berkesinambungan, serta memastikan seluruh tim yang mengelola manajemen risiko telah mendapatkan pelatihan terkait manajemen risiko
- Menyusun kriteria kemungkinan dan dampak dan kertas kerja yang disertai dengan justifikasi penentuan level risiko
- Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- Melakukan pembahasan manajemen risiko dikaitkan dengan capaian kinerja pada rapat evaluasi misalnya pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau rapat evaluasi kinerja
- Menindaklanjuti seluruh masukan Auditor Internal terkait manajemen risiko

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Atas rekomendasi perbaikan pada penilaian tahun 2024, beberapa hal yang telah ditindaklanjuti oleh BBPOM di Palangka Raya pada triwulan III adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi risiko pada masing-masing Indikator kinerja utama tahun 2025;
- Melakukan integrasi manajemen risiko dengan sasaran kinerja pegawai pada aplikasi SIMAKIN;
- Memberikan pelatihan untuk pegawai yang belum mengikuti pelatihan manajemen risiko
- Menyusun rencana pelatihan manajemen risiko bagi pegawai baru (PPPK);
- Membagi peran aktivitas pengendalian risiko bagi seluruh pegawai dan menuangkannya pada SKP.

Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas aktivitas pengendalian risiko dari daftar risiko yang sudah ada dan mengidentifikasi potensi risiko yang belum terpetakan sebagai bahan masukan pada identifikasi daftar risiko pada triwulan IV tahun 2025.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW III Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW III Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW III 2025	Capaian Indikator Kinerja TW III Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	Rp 366.831.649	Rp 365.025.630	99.51	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun. Jadi yang bisa analisis adalah capaian realisasi anggaran, di triwulan 3 ini realisasinya belum mencapai target dengan capaian 99.51%. Perlu dilakukan perbaikan perencanaan dalam penetapan rencana penarikan dananya, agar di akhir tahun nanti capaiannya dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp 604.448.400 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp 127.010.100 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp 477.438.300.

3.2 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang diindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Capaian Kinerja tidak dapat disimpulkan	Konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan untuk mencapai target	TW IV	-	1. Melaksanakan sampling di akhir bulan untuk target bulan berikutnya supaya bisa masuk ke laboratorium di awal bulan 2. Melakukan pengujian sampel dan melaporkan melalui SIPT sesuai dengan timeline yang ditetapkan	TW IV	Capaian indikator kinerja terkendali
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTDESO	1. Belum terdapat rencana pelaksanaan KIE PV 2. Belum dilaksanakannya KIE PV 3. Belum dilakukan Pemantauan pelaporan e-MESO oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Membuat perancangan dan pelaksanaan KIE PV serta melakukan pemantauan pelaporan e-MESO secara berkala oleh sarana kesehatan	TW IV	1. Menyusun rencana pelaksanaan KIE PV 2. Melaksanakan KIE PV pada Triwulan II 3. Membuat surat himbauan untuk pelaporan KTD/ESO dan apresiasi atas pelaporan oleh fasyankes yang sudah melaporkan secara rutin	1. Pemantauan Pelaporan e-MESO 2. Melakukan refreshment pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes dan melakukan pendampingan/desk pelaporan KTD/ESO kepada fasyankes di wil kerja BBPOM di Palangka Raya"	TW IV	1. Telah dilaksanakan KIE PV bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 48 sarana, tanggal 24 April 2024 2. Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD ESO sampai dengan bulan September : RSUD dr. Murdjani Sampit, RSUD dr Doris, RS Siloam Palangka Raya, RSUD Muara Teweh, RSUD Puruk Cahu 3. Telah disampaikan surat himbauan kepada Fasyankes yang telah mengikuti KIE untuk melakukan pelaporan KTD/ESO maupun KIPI di

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
								fasilitas masing-masing dan apresiasi kepada fasyankes yang telah melakukan pelaporan secara rutin
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Sampling pangan targeted dan PIRT dilakukan bersamaan oleh petugas yang sama	Sampling pangan targeted MD/ML dan sampel pangan PIRT dilakukan dalam waktu yang berbeda atau oleh petugas berbeda untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kategori sampling.	TW II	Perencanaan dalam pembagian tugas sampling TW 2 dilakukan oleh petugas yang berbeda.		TW II	Perencanaan dalam pembagian tugas sampling TW 2 dilakukan oleh petugas yang berbeda.
		Terdapat 13 sampel di sampling tidak sesuai renlak, terdiri 3 sampel MD/ML (biji/sayuran kering, syrup glukosa, Nori) dan 10 sampel PTT yang seharusnya disampling di bulan Juni namun karena keterbatasan ketersediaan di pasaran sehingga tidak dapat di sampling sehingga diganti dengan jenis sampel lainnya.	Dilakukan sampling terhadap pangan tertentu pada bulan-bulan berikutnya jika terdapat adanya kasus di masyarakat terkait isu keamanan pangan olahan untuk dapat memenuhi target yang telah dibuat hingga akhir tahun.	TW IV		Dilakukan penggantian sampling Pangan Tertentu dengan jenis pangan lainnya sehingga target output tetap tercapai	TW IV	Target jumlah sampel dapat tercapai sesuai perencanaan
		Pada laboratorium pengujian terdapat kendala pada parameter uji cemaran logam dikarenakan instrumen yang mengalami kerusakan dan memerlukan pergantian suku	Melakukan pengawalan proses pengadaan dan memastikan barang dan suku cadang dapat diterima tepat waktu.	TW IV		Pengujian segera dilaksanakan setelah suku cadang dan BHP telah diterima	TW IV	Sampel selesai uji dengan memenuhi parameter uji kritis.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		cadang. Selain itu terdapat beberapa reagen dan BHP seperti Kit ELISA dan SPE, masih dalam proses inden sehingga pengujian pangan olahan terkendala.						
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	1. Belum diperoleh angka capaian indikator kinerja	1. Mengikuti progress pembahasan DO	TW II	1. Mempersiapkan sarana prasarana untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan 2. Koordinasi dan konsultasi dengan roren dan unit pengampu			Capaian Indikator kinerja dapat dinilai
			2. Untuk setiap kasus keracunan MBG di wilayah: a. Agar proaktif penanganan kasus KLB MBG, tanpa menunggu status KLB dari dinas b. Segera lakukan pengambilan sample/investigasi dan pengujian	TW IV		Melakukan pengambilan sampel segera setelah mendapat informasi terjadi kasus keracunaan (KLB).	TW IV	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	penyesuaian target akibat adanya efisiensi anggaran	1. Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM Lokal dalam penerapan CPPOB IRT dan kesesuaian label pangan olahan 2. Retargeting sampel PIRT	1. TW IV 2. TW I	Retargeting sampling	1. pembinaan pelaku usaha PIRT dalam pembuatan label bersama lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) 2. pengembangan inovasi terkait pembuatan label yang benar menurut	TW IV	Sampling produk PIRT yang Berisiko terlaksana sesuai target pada Triwulan 2

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
						peraturan perundang-undangan		
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Persentase pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti rekomendasi masih rendah	Meningkatkan monev dan tahapan tindak lanjut sesuai dengan Kep BPOM No 295 tahun 2022	TW IV		Melakukan desk/konsultasi/monev CAPA secara berkala dengan pelaku usaha/penanggung jawab	TW IV	Capaian indikator kinerja tidak dapat disimpulkan (>110%)
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum melakukan pengawasan ke sarana produksi karena cuma ada 3 target direncanakan di TW2	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	TW II	Segera melakukan pengawasan ke saran produksi pada bulan April		TW II	Pemeriksaan sarana produksi sediaan famasi mulai dilakukan pada TW2 di bulan April
		Realisasi dari 1 sarana dan capaian tidak dapat disimpulkan	1. Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW 2. Mengusulkan revisi target IKU ke unit pengampu menjadi 92% supaya capaian masuk kriteria sangat baik	TW IV	Mengusulkan revisi target IKU ke unit pengampu menjadi 92%	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	TW IV	Capain kinerja masuk dalam kategori sangat baik
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana industri pangan olahan	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	TW II	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana produksi pangan olahan di Kab. Kotawaringin Timur pada bulan April 2025	Melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan di tiap TW hingga TW 3	TW III	Jumlah sarana produksi pangan olahan yang telah diperiksa sebanyak 23 sarana dengan rincian 8 sarana MD (5 MK, 3TMK) dan 15 sarana IRTP (8 MK, 7 TMK).
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan	Belum bisa dihitung capaian IK	Mengikuti progress pembahasan DO	TW II	Koordinasi dan konsultasi dengan roren dan unit pengampu		TW II	dikecualikan dari perhitungan kinerja TW I tahun 2025,

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target terlalu rendah karena terdapat satu komoditi sarana distirubusi yang targetnya belum masuk pada target awal tahun	Memperhatikan target dan realisasi supaya capaian tidak melebihi 110%	TW IV	Menyampaikan usulan perubahan target pada desk renstra tanggal 23-24 Juni 2025	1. Melakukan perencanaan inspeksi sesuai dengan breakdown renlak perbulan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi di masing-masing komoditi supaya capaian tidak melebihi 110% 2. Memperhatikan timeline SIPT dan kesesuaian tindak lanjut sarana dengan juknis/pedoman TL	TW IV	Target tercapai dan capaian realisasi tidak melebihi 110% (tidak dapat disimpulkan)
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan bersamaan dengan Intensifikasi Pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri	Perlunya menekankan kembali kepada petugas untuk segera melaporkan hasil pemeriksaan sarana pada SIPT, selain pada laporan bit.ly Inwas.	TW II	Penekanan terhadap petugas agar pelaporan hasil pemeriksaan tidak melebihi timeline			Telah dilakukan pemeriksaan dan pelaporan pada SIPT sarana disribusi pangan olahan sampai dengan akhir di TW 3 sebanyak 53 sarana dari target 83 sarana dengan hasil 9 sarana TMK.
		Belum adanya sosialisasi terkait pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan mengacu pada Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam melakukan tindak	Perlu dilakukan sosialisasi pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan dengan mengundang narasumber dari Direktorat	TW III	Melakukan Sosialisasi pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan.			Menigkatnya pemahaman petugas Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan, sehingga dapat menunjang capaian Kinerja

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		lanjut hasil pemeriksaan sarana maupun temuan produk.	Pengawasan Peredaran Produk Pangan Badan POM.					
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan		Konsisten dengan realisasi perencanaan untuk mencapai target	TW IV		Memperhatikan realisasi dan target yang ditetapkan supaya capaian baik/sangat baik	TW IV	Capaian kinerja terkedali dalam kriteria baik atau sangat baik
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar							
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT							
14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Indikator "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" merupakan lanjutan penilaian Indikator Kinerja terkait Standar Kemampuan Laboratorium pada periode renstra sebelumnya yaitu “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP”. Namun kedua indikator ini mempunyai cara perhitungan dan formula yang berbeda yang terletak	Diperlukan strategi untuk mencapai target indikator dengan menyusun perencanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengendalikan faktor-faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator.	TW I-TW IV	1. Pembuatan roadmap pemenuhan SKL tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW I 3. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW II 4. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW III	1. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW IV	TW IV	Nilai realisasi indikator pada TW III sebesar 75,5 telah mencapai target triwulan III sebesar 72 dengan capaian 104,86 % dan telah melampaui target tahunan sebesar 72,5 dengan Capaian 104,14 %

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		pada baseline perhitungan serta persentase komposisi penilaian yang dimana sebelumnya dihitung menggunakan rata-rata namun pada tahun 2025 perhitungan menggunakan proporsi penilaian yang berbeda pada masing-masing komponen. Nilai realisasi indikator “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP” pada tahun 2024 yaitu sebesar 88,57 % dengan capaian 102,49 % telah mencapai target tahun 2024 yang ditetapkan.						
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman							
16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pelaksanaan pengawasan dilakukan hanya pada 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang berada diwilayah kerja	- melakukan efisiensi perjadin luar kota dengan menggabungkan beberapa target kegiatan - meningkatkan pembinaan dan pengawasan produk pangan fortifikasi yang	TW I	Efisiensi perjadin luar kota dengan menggabungkan beberapa target kegiatan	-	-	pengawasan terlaksana sesuai juknis dengan metode Luring

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			beredar di Provinsi Kalimantan Tengah					
17	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Realisasi melampaui target dengan kriteria sangat baik	1. Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda Setting Nasional Tahun 2025. 2. Memperhatikan ragam kegiatan KIE dengan merujuk pada Top 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat, yaitu KIE Penyuluhan Langsung (41,4%), media social (13,9%), dan webinar/daring (9,5%)	TW IV	1. Menyusun perencanaan KIE sesuai dengan Juknis KIE tahun 2025 2. Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE triwulan I tahun 2025 (nilai: 89,83) 3. Sampai dengan bulan September tahun 2025, tingkat efektivitas KIE diukur melalui survei pada 503 responden yang terdiri dari 293 responden survei KIE Tatap Muka dan 210 responden KIE Media, dengan nilai indeks 93.06 (capaian 106,73%) 4. Melakukan pengukuran tingkat efektivitas KIE secara berkala 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIE secara berkala 6. Meningkatkan social media management melalui konten yang menarik dan selaras dengan Agenda Setting	1. Melakukan pengukuran tingkat efektivitas KIE Triwulan IV 2. Pelaksanaan KIE SAKA POM/Gen Z	TW IV	1. Nilai Efektifitas KIE s.d September 2025 : 93.06(106,73%) 2. Rencana Pelaksanaan KIE s.d Bulan September tahun 2025 terlaksana 3. Optimalisasi KIE melalui Media Sosial, kepatuhan terhadap agenda setting bulan September 2025 terlaksana

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
					2025 7. Melaksanakan KIE dan menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya, influencer, dan tema serta pelaksanaan kegiatan yang menarik. 8. Meningkatkan penggunaan identitas KIE BPOM kataBPOM dengan tagline “bukan kata orang pastikan kataBPOM”			
18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	TW IV	1. Memastikan pelaksanaan setiap tahap tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	TW IV	Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tercapai/melampaui
19	Jumlah Desa Pangan Aman	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	TW IV	1. Memastikan pelaksanaan setiap tahap tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	TW IV	Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tercapai/melampaui
20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	TW IV	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannnya 2. Melakukan pengawalan terhadap pasar yang telah dintervensi tahun	Memastikan pelaporan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan	TW IV	Realisasi mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tercapai/melampaui

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
					sebelumnya			
21	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	1. adanya carry over pendampingan UMKM Kosmetik dari tahun sebelumnya 2. perubahan tahapan pendampingan UMKM Pangan Olahan	Mengikuti Sosialisasi Juknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan	TW II	1. Melanjutkan pendampingan UMKM kosmetik yang carry over dari tahun sebelumnya 2. melaksanakan tahapan pendampingan yang terlompoti			1. Telah terlaksananya pendampingan UMKM kosmetik sesuai juknis 2. telah terlaksananya tahapan pendampingan sesuai juknis
		Upaya penerapan inovasi UMKM berdikari dengan pendampingan bersama mahasiswa magang dalam penyusunan dokumen CPPOB UMK	Penggunaan teknologi informasi untuk melakukan pendampingan pelaku usaha di kabupaten dan pemanfaatan inovasi Smart Laura sebagai layanan publik	TW IV		Pelaksanaan kegiatan: a. Bimtek CPPOB tahap 2 b. Desk coaching e-sertifikasi c. Desk coaching e-registrasi	TW IV	Tarcapainya target kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi dan Inovasi yang ada di BBPOM Palangka raya
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1. Belum adanya Informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang bernilai A1 untuk di Tindak Lanjuti 2. Tindak Lanjut Informasi terkait pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan gagal saat dilakukan Operasi penindakan 3. Capaian indikator penyidikan TW 1 terkait penanganan perkara melebihi target TW 1	1. Evaluasi Hasil kegiatan/operasi intelijen kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin 2. Koordinasi dan kolaborasi dengan APH dan pihak2 lain, dalam menentukan cara bertindak yang lebih terukur, waspada, dan sesuai prosedur untuk menjamin keberhasilan operasi serta keselamatan personel di lapangan terutama ketika informasi	TW IV	Koordinasi dan kolaborasi dengan Aparat penegak Hukum dan pihak lain dalam pengungkapan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	1. Evaluasi Hasil kegiatan/operasi intelijen kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin 2. Monev laporan Kemajuan Penyidikan rutin	TW IV	Keberhasilan : 1. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, telah tercapai 3 (tiga) perkara sesuai dengan target perkara yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut: - 1 (satu) perkara pada Triwulan I telah dilaksanakan Tahap II dan telah memperoleh putusan (vonis) pengadilan. - 1 (satu) perkara yang diperoleh pada Triwulan

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			menunjukkan bahwa target operasi merupakan seorang residivis, 3. Monev laporan Kemajuan Penyidikan					III telah sampai pada Tahap II dan saat ini menunggu proses peradilan. - 1 (satu) perkara yang diperoleh pada Triwulan III telah sampai pada tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan akan segera dilakukan Tahap I serta proses penyidikan lebih lanjut. 2. Telah dilakukan Evaluasi hasil operasi intelijen kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan setiap bulan secara rutin 3. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan kemajuan Penyidikan berkala setiap bulan secara rutin
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Kualitas hasil Patroli Siber oleh Tim Patber Lintas Fungsi tidak semuanya memenuhi standar yang ditetapkan	Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala pada hasil patroli siber guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di media daring.	TW IV	-	1. Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi hasil patroli siber secara rutin setiap akhir periode patroli siber bulan berjalan. 2. Mengarsipkan seluruh hasil Monev dan	TW IV	1. Telah dilakukan monev terhadap hasil patber sebelum dilakukan pelaporan ke Dit Siber BPOM melalui aplikasi : inawebcrawler.id 2. Seluruh hasil Monev laporan hasil patber

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
						dokumentasi tindak lanjut ke dalam sistem digital aplikasi internal yang dapat di akses seluruh anggota tim patroli siber		anggota tim patber bisa di akses dan dijadikan bahan perbaikan tim patroli siber
24	Indeks Pelayanan Publik UPT		1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 3. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik 4. Mengembangkan Inovasi Layanan Publik 5. Mengembangkan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan	TW IV	1. Melaksanakan Sosialisasi Standar Pelayanan Tahun 2025 pada berbagai media (SP dan Maklumat Layanan) pada area layanan publik, media sosial, media luar ruang, dan sub site BBPOM di Palangka Raya 2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayan publik melalui pembelajaran mandiri, pelatihan, mengikuti sosialisasi terkait pelayanan publik, coaching dan mentoring 3. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pelanggan prioritas/kelompok rentan 4. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Tele Public Service Smart	1. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Tele Public Service Smart Laura pada MMP pada MPP Kab. Pulang Pisau dan kabupaten potensial lainnya	TW IV	Keberhasilan s.d September : 1. Perbaikan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik terlaksana 2. Peningkatan SDM terkait Pelayanan Publik Bagi seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya (Bimtek Penyediaan Pelayanan Publik Bagi Kel Rentan) 3. Pengukuran SKM bulanan Bulan September 4. Telah selesai pelaksanaan SKM Tahun 2025 (terpusat) 5. Telah diperoleh hasil Monev PEKPPP Tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025: 4,96 dengan kategori " Pelayanan Prima "

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
					Laura pada MMP di Kab Barito Selatan 5. Melaksanakan pemberdayaan kelompok rentan melalui pembentukan kader, fasilitator UMKM dan KIE			
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai telah melaksanakan implementasi Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2026 dan telah menginput narasi dan lembar kerja LKE ZI pada link Inspektorat Utama	1. Implementasikan Road Map RB utk Tahun 2025 2. Implementasikan Road Map AOC utk Tahun 2025	TW IV	1. Penetapan road map dan penyusunan rencana kerja prioritas di tiap Pokja 2. Penetapan road map dan penyusunan rencana kerja prioritas oleh AoC	3. Survei dalam rangka menjangking minat pegawai terkait pokja yang diminati dan diharapkan mampu berkontribusi aktif mengimplementasikan ZI 4. Bimtek Implementasi Zona Integritas dengan narasumber Inspektorat Badan POM 5. Pengisian mandiri LKE ZI dan pemenuhan data dukungannya	TW IV	
26	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Laporan evaluasi internal masih belum sesuai dengan pedoman SAKIP 2. Penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut masih belum selaras antara simetris, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja 3. Belum semua SDM yang terlibat SAKIP mengikuti	1. Laporan Evaluasi internal TW I memperhatikan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2024 2. Memperbaiki kualitas pelaksanaan akuntabilitas Balai 3. Perencanaan pengembangan kompetensi SDM tim	TW III	1. Pengembangan kompetensi SDM tim SAKIP 2. Laporan Evaluasi internal TW I memperhatikan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2024 3. Penyusunan lakip interim tw I 2025 4. Finalisasi tindak lanjut	-		Seluruh rencana aksi telah selesai ditindaklanjuti pada triwulan III

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III tahun 2025								
No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		pelatihan implementasi SAKIP	SAKIP		evaluasi SAKIP 2024 5. Persiapan penilaian indikator AKIP 2025 melalui SAPA APIP			
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	blokir anggaran perjadin, belanja barang dan belanja modal dalam rangka efisiensi anggaran	efisiensi pemanfaatan anggaran efektif, perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan lokus, perubahan sistem kerja, perubahan sampling dan pengujian, digitalisasi	TW IV	perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan lokus, perubahan sistem kerja, digitalisasi	pengawasan RPD halaman III DIPA, pengawasan pencapaian target output dan pengawasan pengelolaan UP dan TUP	TW IV	rencana aksi yang dicanangkan selesai pada triwulan IV
28	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	Daftar risiko disusun sebelum penetapan PK 2025, cascading IKU pusat ke Balai dan IKU Direktif	Reviu daftar risiko pasca penyusunan MPH/SKP	TW IV	Reviu daftar risiko pasca penyusunan MPH/SKP	-	TW IV	telah dilakukan reviu daftar risiko pada revisi PK RAPK di triwulan III

3.3 Realisasi Anggaran

A. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.432872/2025 tanggal 02 Desember 2024 satuan kerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengelola anggaran sebesar Rp.22.128.308.000. (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) sampai dengan akhir triwulan 2 tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran melalui 7 (tujuh) kali Revisi DIPA, terdiri dari 3 Revisi kewenangan KPA, 1 Revisi Kewenangan Kanwil dan 3 Revisi Kewenangan DJA sebagai berikut :

- Revisi pertama kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian anggaran dengan rencana kegiatan di tahun 2025.
- Revisi kedua kewenangan DJA dalam rangka Revisi Efisiensi Belanja BPOM Tahun Anggaran 2025. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Sekretaris Utama BPOM no B-PR.05.03.2.02.25.82 hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 tanggal 04 Februari 2025. Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan Blokir anggaran mandiri senilai Rp Rp 8.093.017.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola menjadi Rp 14.035.291.000,-
- Revisi ketiga kewenangan KPA dalam rangka penambahan anggaran untuk pembayaran gaji PPNPN di tahun 2025.
- Revisi keempat Kewenangan DJA dalam rangka pemenuhan sesuai gaji PPNPN dan Realokasi anggaran Reagensia dari Sediaan farmasi ke Pangan Rp 50.000.000,- Revisi anggaran dalam KRO yang sama sehingga tidak mempengaruhi total pagu.
- Revisi kelima Kewenangan DJA dalam rangka relaksasi efisiensi anggaran tahun 2025, diusulkan buka blokir anggaran untuk 7 Rincian Output yang mendukung teknis kinerja pengawasan obat dan makanan dengan nilai relaksasi blokir senilai Rp 3.194.209.000,-
- Revisi keenam kewenangan kanwil dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan dana triwulan II dan revisi POK.
- Revisi ketujuh kewenangan KPA penyesuaian dalam rangka dan Penyesuaian Pagu Gaji PPNPN yang telah diangkat menjadi P3K.
- Revisi kedelapan kewenangan DJA dalam rangka Revisi pengurangan belanja Pegawai senilai Rp 546.605.000 dan Penambahan pagu Belanja Barang Keperluan Perkantoran CASN Rp 5.588.000,-.
- Revisi kesembilan kewenangan kanwil dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan dana triwulan III dan revisi POK.
- Revisi kesepuluh kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian kegiatan revisi POK.
- Revisi kesepuluh kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian kegiatan revisi POK.

Pada akhir triwulan 3 tahun 2025 pagu yang dikelola Rp. 21,587,291,000,- dengan blokir anggaran Rp 4.898.808.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 16.688.483.000,-

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Pagu Aktif	Realisasi Anggaran TW III	Persentase terhadap Pagu Awal	Persentase terhadap Pagu Aktif
1	51	4.984.129.000	-	4.984.129.000	3.777.855.161	76%	76%
2	52	10.699.694.000	3.513.340.000	7.186.354.000	4.898.741.399	46%	68%
3	53	5.903.468.000	1.385.468.000	4.518.000.000	4.517.997.470	77%	100%
TOTAL		21.587.291.000	4.898.808.000	16.688.483.000	13.194.594.030	61%	79%

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 adalah Rp 13.194.594.030,- yang berarti 61% dari pagu awal dan 79% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya, dengan realisasi pagu aktif paling rendah pada belanja barang 68% dan paling tinggi pada belanja modal yang telah direalisasikan 100%.

Strategi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran sebagai berikut:

- Memfokuskan anggaran pada kegiatan yang menghasilkan output secara langsung.
- Dalam rangka pengelolaan anggaran yang lebih efektif, penting untuk mengelompokkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki kesamaan lokasi secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan sumber daya lainnya yang mungkin timbul jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah.
- Memastikan target tercapai dengan pemantauan yang berkelanjutan terhadap hasil kerja output dan pengeluaran anggaran. Sehingga dapat mendeteksi lebih awal potensi masalah yang bisa menghambat pencapaian target.
- Dengan adanya anggaran yang direlaksasi maka dapat dilakukan upaya sharing anggaran kepada Rincian Output yang anggarannya masih diblokir, agar dapat memaksimalkan capaian output dan capaian realisasi anggaran.

B. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Output

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya didukung dengan 22 Rincian Output dan berikut hasil pengukuran realisasi output dibandingkan dengan realisasi anggaran triwulan III tahun 2025.

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	9	9	100,00%	64,29%	72.439.000	1.100.000	100.000	9,09%	0,14%
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	510	403	583	144,67%	114,31%	145.537.000	17.165.000	15.994.991	93,18%	10,99%
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	541	511	1165	227,98%	215,34%	193.733.000	61.645.000	54.920.820	89,09%	28,35%
4	<i>BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT*</i>	1	75,39%	75,39%	100,00%	75,39%	736.000.000	170.491.793	214.733.351	125,95%	29,18%
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25	19	25	131,58%	100,00%	78.895.000	7.497.100	6.316.258	84,25%	8,01%
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	1,00	100,00%	100,00%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00%	100,00%
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	8	100,00%	100,00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	1	72,70%	81,43%	112,01%	81,43%	1.707.506.000	1.195.630.828	1.245.611.776	104,18%	72,95%
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	3	2	3	150,00%	100,00%	358.335.000	258.201.000	200.428.748	77,63%	55,93%
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman*	8	70%	75%	107,14%	9,38%	344.372.000	26.380.000	24.337.940	92,26%	7,07%
11	QDB.002 Desa Pangan Aman*	3	70%	70%	100,00%	23,33%	501.455.000	33.609.389	9.553.389	28,42%	1,91%
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya*	1	1	1	100,00%	100,00%	137.071.000	23.735.000	19.984.703	84,20%	14,58%
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	48	106,67%	106,67%	41.950.000	4.294.280	4.294.280	100,00%	10,24%
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT*	13	86%	90,38%	105,09%	6,95%	43.762.000	6.700.000	6.500.000	97,01%	14,85%
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	324	332	102,47%	75,28%	447.082.000	313.070.800	185.802.150	59,35%	41,56%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	985	794	801	100,88%	81,32%	768.855.000	538.424.000	419.273.962	77,87%	54,53%
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	25	29	116,00%	111,54%	20.688.000	14.225.666	13.985.666	98,31%	67,60%
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	1	100,00%	100,00%	4.208.000	4.208.000	4.208.000	100,00%	100,00%
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	336	232	244	105,17%	72,62%	402.118.000	157.185.297	181.823.083	115,67%	45,22%
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	1	1	1	100,00%	100,00%	5.772.068.000	4.267.997.470	4.267.997.470	100,00%	73,94%
21	EBA.956 Layanan BMN*	1	74,97%	74,97%	100,00%	74,97%	8.000.000	1.997.100	1.797.100	89,99%	22,46%
22	EBA.994 Layanan Perkantoran*	1	74,97%	74,97%	100,00%	74,97%	10.094.234.000	6.045.960.947	6.067.115.393	100,35%	60,10%

C. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Kinerja

Balai Besar POM di Palangka Raya dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 memiliki 28 Indikator Kinerja berikut pencapaian Kinerja dan Anggaran di Triwulan III tahun 2025.

No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran			
		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III
a	b	c		d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	89,75	98,09	109,29	109,29	538.424.000	419.273.962	77,87
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	4.294.280	4.294.280	100,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	93,94	104,38	104,38	138.400.100	75.384.172	54,47
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100,00	100,00	17.598.000	18.119.699	102,96
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92,86	109,25	109,25	138.400.100	75.384.172	54,47
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	84	79,29	94,39	94,39	3.246.000	3.246.000	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran			
		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III
a	b	c		d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	100	108,70	108,70	5.489.833	5.369.833	97,81
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	86,96	108,70	108,70	5.489.833	5.369.833	97,81
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88	96,88	96,59	99,70	99,70	43.423.871	54.927.414	126,49
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91,32	107,44	107,44	72.685.149	88.248.042	121,41
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,4	92,4	97,68	105,71	105,71	5.907.500	4.779.500	80,91
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91	92,26	101,38	101,38	5.907.500	4.779.500	80,91
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	29.261.278	33.320.628	113,87

No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran			
		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III
a	b	c		d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	72	75,5	104,86	104,14	5.463.628.298	5.513.609.246	100,91
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	18.672.600	16.914.107	90,58
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100,00	100,00	4.208.000	4.208.000	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	87,19	93,06	106,73	106,73	69.142.100	61.237.078	88,57
		2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	70	75	107,14	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	26.380.000	24.337.940	92,26
		3	Jumlah desa pangan aman	3	70	70	100,00	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	33.609.389	9.553.389	28,42

No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran			
		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III
a	b	c		d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100,00	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	23.735.000	19.984.703	84,20
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,1	87	91,54	105,22	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	6.700.000	6.500.000	97,01
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	71	71,67	100,94	74,66	258.201.000	200.428.748	77,63
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	55,56	1.100.000	100.000	9,09

No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran			
		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III
a	b	c		d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
	efektif										
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	4,96	Belum ada target bulan ini	105,53	17.165.000	15.994.991	93,18
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,83	-	88,19	Belum ada target bulan ini	100,41	4.311.754.257	4.393.436.578	101,89
		2	Nilai AKIP UPT BPOM	83,87	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	366.831.649	365.025.630	99,51
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	1.423.032.285	1.417.999.044	99,65
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	366.831.649	365.025.630	99,51

D. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Dengan kata lain, efisiensi tercapai jika persentase capaian output sama atau lebih tinggi daripada persentase capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

1) Pengukuran Efisiensi Output

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	9,09%	11,00	10,00	75% (tidak efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	144,67%	93,18%	1,55	0,55	92% (efisien)
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	227,98%	89,09%	2,56	1,56	80% (tidak efisien)
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	125,95%	0,79	-0,21	Tidak Efisien
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	131,58%	84,25%	1,56	0,56	92% (efisien)
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	112,01%	104,18%	1,08	0,08	100% (efisien)
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	150,00%	77,63%	1,93	0,93	88% (efisien)
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	107,14%	92,26%	1,16	0,16	100% (efisien)
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	100,00%	28,42%	3,52	2,52	75% (tidak efisien)
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00%	84,20%	1,19	0,19	100% (efisien)
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	106,67%	100,00%	1,07	0,07	100% (efisien)

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	105,09%	97,01%	1,08	0,08	100% (efisien)
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	102,47%	59,35%	1,73	0,73	90% (efisien)
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,88%	77,87%	1,30	0,30	95% (efisien)
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	116,00%	98,31%	1,18	0,18	100% (efisien)
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	105,17%	115,67%	0,91	-0,09	Tidak Efisien
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
21	EBA.956 Layanan BMN	100,00%	89,99%	1,11	0,11	100% (efisien)
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	100,00%	100,35%	1,00	0,00	Tidak Efisien
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,81	88% (efisien)

Berdasarkan hasil pengukuran 22 (dua puluh dua) RO telah melaksanakan kegiatannya, 16 (enam belas) RO telah masuk dalam kriteria efisien dan 6 (enam) RO lainnya masuk dalam kriteria tidak efisien. Untuk pengukuran efisiensi output BBPOM Palangka raya di Triwulan III ini berdasarkan hasil rata-rata dari capaian efisiensi setiap RO didapat nilai **0,81 dan masuk dalam kriteria 88% efisien**, meningkat dari triwulan sebelumnya yang capaiannya tidak efisien. Secara umum penyebab suatu RO masuk dalam kriteria Tidak efisien adalah karena capaian anggaran yang digunakan lebih besar dari output yang dihasilkan atau karena capaian anggaran yang digunakan jauh lebih kecil untuk mencapai output, dari RO yang tidak efisien tersebut 3 (tiga) RO masuk kategori tidak efisien karena capaian

outputnya lebih besar dari capaian anggarannya. Serta 3 (tiga) RO masuk kriteria tidak efisien karena capaian output lebih rendah dari capaian anggarannya, diantaranya adalah :

- BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT
- QIC.004 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- EBA.994 Layanan Perkantoran

RO diatas capaian outputnya lebih dari 100 hanya saja capaian anggarannya lebih tinggi, hal ini menandakan perencanaan dalam penggunaan anggarannya belum sesuai untuk mencapai target output yang ditetapkan. Jadi untuk kedepannya diperlukan perencanaan target penyerapan anggaran yang lebih baik lagi.

2) Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = d/c$	$f = e - 1$	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,29	77,87	1,40	0,40	92% (efisien)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Belum ada target bulan ini	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104,38	54,47	1,92	0,92	88% (efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	102,96	0,97	-0,03	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,25	54,47	2,01	1,01	86% (tidak efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94,39	100,00	0,94	-0,06	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,70	97,81	1,11	0,11	100% (efisien)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,70	97,81	1,11	0,11	100% (efisien)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,70	126,49	0,79	-0,21	Tidak Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = d/c$	$f = e - 1$	g
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107,44	121,41	0,88	-0,12	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	105,71	80,91	1,31	0,31	95% (efisien)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	101,38	80,91	1,25	0,25	95% (efisien)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Belum ada target bulan ini	113,87	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	104,86	100,91	1,04	0,04	100% (efisien)
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Belum ada target bulan ini	90,58	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,73	88,57	1,21	0,21	95% (efisien)
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	107,14	92,26	1,16	0,16	100% (efisien)
19	Jumlah desa pangan aman	100,00	28,42	3,52	2,52	75% (tidak efisien)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	84,20	1,19	0,19	100% (efisien)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	105,22	97,01	1,08	0,08	100% (efisien)

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100,94	77,63	1,30	0,30	95% (efisien)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	9,09	11,00	10,00	75% (tidak efisien)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada target bulan ini	93,18	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	101,89	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	99,51	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	99,65	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	99,51	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi per Indikator Kinerja rentang tingkat efisiensi adalah dari -0,10 hingga 10 dari 28 Indikator kinerja yang ada di Balai Besar POM di Palangka Raya. 20 (Dua puluh) Indikator telah dapat diukur efisiensinya sedangkan 8 (delapan) lainnya belum dapat diukur karena capai kinerja baru diukur diakhir tahun. Untuk upaya efisiensi yang dilakukan per Indikator dibahas dalam Bab 3.1 masing-masing Indikator Kinerja.

3) Pengukuran Efisiensi per Sasaran Kegiatan

Pengukuran efisiensi per sasaran kegiatan dilakukan dengan merata-rata capaian efisiensi Indikator kinerja dalam sasaran kegiatannya, hasil pengukuran untuk efisiensi per sasaran kegiatan di BBPOM Palangka raya pada triwulan III ini sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Bulan Juni tahun 2025 dan Realisasi Anggaran triwulan II							
No	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
		Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja*	Total Realisasi Anggaran**	Capaian Realisasi anggaran***		
a	b	c	d	e	f	g=(d/f)-1	h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15 Indikator	104,48	6.323.020.388	93,37	0,12	100% (efisien)

2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	1 Indikator	100,00	4.208.000	100,00	0,00	100% (efisien)
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Indikator	103,47	115.113.110	73,36	0,41	92% (efisien)
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1 Indikator	105,22	6.500.000	97,01	0,08	100% (efisien)
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1 Indikator	100,94	200.428.748	77,63	0,30	95% (efisien)
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	1 Indikator	100,00	100.000	9,09	10,00	75% (tidak efisien)
7	Layanan Publik UPT yang prima	1 Indikator	Belum ada target	15.994.991	93,18	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	4 Indikator	Belum ada target	6.541.486.882	100,14	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

* Hasil dari rata-rata Capaian Indikator kinerja yang dapat dinilai

** Jumlah realisasi anggaran indikator kinerja dalam sasaran kegiatan

*** Hasil dari Capaian realisasi anggaran Indikator kinerja

Pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan 8 sasaran kegiatan. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 sampai 10 dan dari rata-rata per sasaran kegiatan ini capaian efisiensi untuk BBPOM Palangka raya di Triwulan III ini adalah **1,82 dan masuk dalam kriteria 75% tidak efisien**. Berikut analisa pemanfaatan sumber daya anggaran terhadap tingkat efisiensi per sasaran kegiatan:

- I. Sasaran kegiatan 1 “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” terdiri atas 15 Indikator kinerja, 12 Indikator kinerja telah dapat dinilai efisiensinya dan 3 indikator kinerja belum dapat dinilai. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ini capaian efisiensinya adalah 0.12 dan masuk dalam kriteria efisien, namun dari 12 indikator kinerja yang dapat diukur tingkat efisiensinya 5 indikator tidak efisien. Secara umum penyebab tidak efisien indikator kinerja tersebut adalah capaian realisasi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan capaian kinerjanya. Alokasi anggaran sasaran kegiatan ini adalah Rp 9.160.267.000,- dengan blokir anggaran RP 1.541.718.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola menjadi Rp 7.618.549.000,-.
- II. Sasaran kegiatan 2 “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi” pagu anggaran Rp 4.208.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan telah selesai dilaksanakan di triwulan 1 dengan capaian 100% sehingga hasil pengukuran

- efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dimana output yang dihasilkan sesuai dengan anggaran yang digunakan.
- III. Sasaran kegiatan 3 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 1.255.526.000. dengan Blokir anggaran Rp 1.054.344.000. sehingga pagu aktif yang dikelola untuk sasaran kegiatan ini Rp 201.182.000. terdiri atas 4 indikator kinerja dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,41 dimana Output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input anggaran yang digunakan. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 115.113.110,-.
- IV. Sasaran kegiatan 4 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pagu anggaran Rp 43.762.000,- dengan blokir anggaran Rp 36.162.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 7.600.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dengan capaian kinerja 105.22% dengan capaian realisasi anggaran 97,01% sehingga sasaran kegiatan ini telah efisien pelaksanaan kegiatannya.
- V. Sasaran kegiatan 5 “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 358.335.000 terdiri atas 1 Indikator Kinerja dengan capaian kinerja triwulan III ini 100,94% dan capaian realisasi anggaran 77,63% sehingga berdasarkan pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ini efisien yaitu capaian kinerja lebih besar dibandingkan capaian realisasi anggarannya.
- VI. Sasaran kegiatan 6 “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” pagu anggaran Rp 72.439.000,- dengan blokir anggaran Rp 71.339.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 1.100.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja telah sesuai target namun realisasi anggaran yang tidak mencapai target, dengan capaian hanya 9,09%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1 perencanaan dalam penetapan rencana penarikan dana yang menjadi target realisasi anggaran di triwulan IV ini perlu diperbaiki sehingga hal ini tidak terulang.
- VII. Sasaran kegiatan 7 “Layanan Publik UPT yang prima” pagu anggaran Rp 145.537.000,- dengan blokir anggaran Rp 127.812.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 17.725.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan untuk triwulan ini belum dapat dinilai capaiannya karena baru dilakukan penilaian Indikator di akhir tahun. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 15.994.991,-.
- VIII. Sasaran kegiatan 8 “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” pagu anggaran Rp 10.547.217.000,- dengan Blokir anggaran Rp 2.067.433.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola untuk sasaran kegiatan ini Rp 8.479.784.000,- terdiri atas 4 Indikator Kinerja dan belum dapat dinilai capaiannya karena baru dinilai di akhir tahun. untuk realisasi anggaran sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah Rp 6.541.486.882,-.

BAB

4



Penutup

- Kesimpulan
- Rekomendasi

BAB 4.

Penutup

A. Kesimpulan

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Renstra periode 2025-2029. Untuk mencapai tujuan strategis 2025-2029 ditetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh lima) indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pencapaian BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan III Tahun 2025. Dari 28 indikator kinerja, 20 indikator kinerja dapat diukur kinerjanya, dan 8 indikator kinerja diukur pada akhir tahun. Dua puluh indikator kinerja yang dapat diukur pada triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 109,29% dengan kriteria Sangat Baik.
2. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 104,38% dengan kriteria Sangat Baik.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT berhasil tercapai dengan capaian 100.00% dengan kriteria Baik.
4. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 109,25% dengan kriteria Sangat Baik.
5. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder berhasil tercapai dengan capaian 94,39% dengan kriteria Baik.
6. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 108,70% dengan kriteria Sangat Baik.
7. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 108,70% dengan kriteria Sangat Baik.
8. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 99,70% dengan kriteria Baik.
9. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 107,44% dengan kriteria Sangat Baik.
10. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 105,71% dengan kriteria Sangat Baik.

11. Indikator Kinerja Persentase Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar berhasil tercapai dengan capaian 101,01% dengan kriteria Sangat Baik.
12. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berhasil tercapai dengan capaian 104,86% dengan kriteria Sangat Baik
13. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
14. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 106,73% dengan kriteria Sangat Baik.
15. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan berhasil tercapai dengan capaian 107,14% dengan kriteria Sangat Baik.
16. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
17. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
18. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan berhasil tercapai dengan capaian 105,22% dengan kriteria Sangat Baik.
19. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT belum berhasil tercapai dengan capaian 100,94% dengan kriteria Sangat Baik.
20. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.

Delapan indikator kinerja yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
4. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT.
5. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
6. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM.
7. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.
8. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Palangka Raya pada triwulan III tahun 2025, dari 8 sasaran kegiatan, 6 sasaran kegiatan dapat diukur, dan 2 sasaran kegiatan diukur pada akhir tahun. Enam sasaran kegiatan yang dapat diukur adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Pertama, Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berhasil tercapai, dengan capaian 104,48% yang diukur dengan 15 indikator. 3 indikator diukur pada akhir tahun, 12 indikator dapat diukur. Dari 12 indikator yang dapat diukur, 9 indikator dapat dicapai dengan kriteria sangat baik, 3 indikator tercapai dengan kriteria Baik.
2. Sasaran Kegiatan Kedua, Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi berhasil tercapai dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.
3. Sasaran Kegiatan Ketiga, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 103,47% yang diukur dengan 4 indikator. Dari 4 indikator, 2 indikator tercapai dengan kriteria sangat baik, 2 indikator tercapai dengan kriteria baik.
4. Sasaran Kegiatan Keempat, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu berhasil tercapai dengan capaian 105,22% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
5. Sasaran Kegiatan Kelima, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT tidak berhasil tercapai dengan capaian 100,94% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
6. Sasaran Kegiatan Keenam, Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif berhasil tercapai dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.

Dua Sasaran Kegiatan yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Layanan Publik UPT yang prima.
2. Sasaran Kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Dari hasil pengukuran capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Palangka Raya adalah 103.67 dengan Predikat NKO Istimewa.

Pada akhir triwulan III tahun 2025 pagu yang dikelola Rp. 21.587.291.000,- dengan blokir anggaran Rp 4.898.808.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 16.688.483.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 adalah Rp 13.194.594.030,- yang berarti 61% dari pagu awal dan 79% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya, dengan realisasi pagu aktif paling rendah pada belanja barang 68% dan paling tinggi pada belanja modal yang telah direalisasikan 100%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi secara keseluruhan Tingkat Efisiensi BBPOM Palangka Raya adalah 1,82 dan masuk dalam kriteria 75% tidak efisien.yang berarti capaian kinerja yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan input anggaran.

B. Rekomendasi.

BBPOM di Palangka Raya telah menunjukkan kinerja yang istimewa pada Triwulan III tahun 2025, yang merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2025-2029. Dari 28 indikator kinerja yang ditetapkan, 20 di antaranya dapat diukur pada triwulan ini. Secara keseluruhan, 7 dari 8 sasaran kegiatan telah terukur, dengan 6 sasaran berhasil mencapai target dan 1 sasaran belum tercapai.

Untuk capaian kinerja yang perlu ditingkatkan adalah Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang capaiannya sudah masuk kategori Baik namun dibawah 100%.

Efisiensi Anggaran meskipun capaian kinerja secara keseluruhan sangat baik, tingkat efisiensi anggaran dinilai tidak efisien. Realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 61% dari pagu awal dan 79% dari pagu aktif, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan input anggaran. Adapun yang perlu dilakukan adalah membuat perencanaan yang lebih baik lagi dengan menyesuaikan penetapan target dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Secara keseluruhan, BBPOM di Palangka Raya menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dengan mayoritas sasaran dan indikator kinerja menunjukkan hasil yang positif. Namun, perbaikan dalam efisiensi anggaran dan strategi penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan perlu menjadi fokus untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

Balai Besar POM di Palangka Raya



Lampiran

- Lampiran



Lampiran

A. Perjanjian Kinerja tahun 2025


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI YUDHI HARTANTO

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya  ALI YUDHI HARTANTO	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  TARUNA IKRAR
--	--

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8
		03 - Jumlah desa pangan aman	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPQB pangan olahan	82.8 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 02 - Nilai AKIP UPT BPOM 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	87.83 83.87 5 3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 22.128.308.000 (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12.028.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.102.234.000

Palangka Raya, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Palangka Raya


ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

A. Perjanjian Kinerja tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI YUDHI HARTANTO

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Palangka Raya

ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	D1 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,4 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 Jumlah sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Jumlah desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	14.1 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.87 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,587,291,000 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12,026,074,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,561,217,000

Palangka Raya, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Palangka Raya



ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

B. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi bertsko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	768,855,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan bertsko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204,620,000
		04 - Persentase sampel KLS heracun pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,842,000
		05 - Persentase sampel PRT bertsko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204,620,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80	82	84	51,722,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10,344,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10,344,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	163,552,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	163,552,750
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	23,290,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dilaksanakan sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan diinspeksi sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,208,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.5	69.5	69.5	71	71	71	72	72	72	72.5	7,479,574,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	372,628,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	80	8	344,372,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501,455,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137,071,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OSA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	8.5	19	29.5	29.5	55	65	78	85.5	90.5	98.5	82.8	43,762,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	28	33	39	52	62	67	72	85	96	358,335,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72,439,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	145,537,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,83	9,001,834,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83,87	83,990,550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,867,427,650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134,881,300
Total															22,128,308,000

Palangka Raya, 12 February 2025

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya


ALI YULHA HARTANTO

C. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Revisi RAPK ke-1)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	768,855,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/RSO												26	41,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	704,620,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,842,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204,620,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80	82	84	51,722,360
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10,344,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10,344,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	163,552,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	163,552,750
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	23,290,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan dindikamperti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,208,000
3.	03 - Mengurangi Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.5	69.5	69.5	71	71	71	72	72	72	72.5	7,479,574,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			8719	8719	8719	8719	8719	8719	8719	8719	8719	8719	272,628,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	90	8	344,372,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501,455,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137,071,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan CBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOS pangan olahan	1	8.5	19	33.67	47	61	73	78	87	91	92	82.8	43,762,000
6.	06 - Terlaksananya Perindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	33.33	33.33	38	51	61	71	85	95	96	358,335,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72,439,000

			TARGET												
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	145,537,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,83	9,001,834,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83,87	83,990,550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,967,437,650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134,981,300
														Total	22,129,308,000

Palangka Raya, 12 June 2025

Kepala Balai Besar PCM di Palangka Raya


Adi Yudi Hartono

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Revisi RAPK ke-2)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	718,855,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESQ												28	41,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	216,978,900
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,837,800
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	216,978,900
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	84	84	84	84	84	6,117,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	92	92	92	92	92	7,285,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7,285,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	137,499,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	179,829,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	21,230,000
		T2 - Persentase label produk tembakau								91	91	91	91	91	21,230,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar													
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	42,329,250
		14 - Tatalaksana pemeriksaan Lab. Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.5	69.5	69.5	71	71	71	72	72	72	72.5	7,479,574,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	25,286,400
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,208,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			8718	8719	8718	8718	8719	8718	8719	8719	8718	8719	272,828,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	90	8	344,372,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501,455,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137,071,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	8.3	19	31.67	47	61	73	78	87	91	92	141	43,782,000
5.	06 - Terlaksananya Pemindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	33.33	33.33	38	51	61	71	85	95	96	358,335,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72,438,000

			TARGET												
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	145,537,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.83	5,960,126,550
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.87	562,111,700
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,420,530,350
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	604,448,400
														Total	21,587,291,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2028 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Palangka Raya, 29 August 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya


ALI YUDHI HARTANTO

E. Pengukuran Capaian Output triwulan III tahun 2025

Capaian Output dan Realisasi Anggaran Bulan September											
No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	9	9	100,00%	64,29%	72.439.000	1.100.000	100.000	9,09%	0,14%
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	510	403	583	144,67%	114,31%	145.537.000	17.165.000	15.994.991	93,18%	10,99%
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	541	511	1165	227,98%	215,34%	193.733.000	61.645.000	54.920.820	89,09%	28,35%
4	<i>BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT*</i>	1	75,39%	75,39%	100,00%	75,39%	736.000.000	170.491.793	214.733.351	125,95%	29,18%
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25	19	25	131,58%	100,00%	78.895.000	7.497.100	6.316.258	84,25%	8,01%

Capaian Output dan Realisasi Anggaran Bulan September											
No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	1,00	100,00%	100,00%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00%	100,00%
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	8	100,00%	100,00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	1	72,70%	81,43%	112,01%	81,43%	1.707.506.000	1.195.630.828	1.245.611.776	104,18%	72,95%
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	3	2	3	150,00%	100,00%	358.335.000	258.201.000	200.428.748	77,63%	55,93%
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman*	8	70%	75%	107,14%	9,38%	344.372.000	26.380.000	24.337.940	92,26%	7,07%

Capaian Output dan Realisasi Anggaran Bulan September											
No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
11	QDB.002 Desa Pangan Aman*	3	70%	70%	100,00%	23,33%	501.455.000	33.609.389	9.553.389	28,42%	1,91%
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya*	1	1	1	100,00%	100,00%	137.071.000	23.735.000	19.984.703	84,20%	14,58%
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	48	106,67%	106,67%	41.950.000	4.294.280	4.294.280	100,00%	10,24%
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT*	13	86%	90,38%	105,09%	6,95%	43.762.000	6.700.000	6.500.000	97,01%	14,85%
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	324	332	102,47%	75,28%	447.082.000	313.070.800	185.802.150	59,35%	41,56%
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai	985	794	801	100,88%	81,32%	768.855.000	538.424.000	419.273.962	77,87%	54,53%

Capaian Output dan Realisasi Anggaran Bulan September											
No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
	Standar oleh UPT										
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	25	29	116,00%	111,54%	20.688.000	14.225.666	13.985.666	98,31%	67,60%
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	1	100,00%	100,00%	4.208.000	4.208.000	4.208.000	100,00%	100,00%
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	336	232	244	105,17%	72,62%	402.118.000	157.185.297	181.823.083	115,67%	45,22%
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	1	1	1	100,00%	100,00%	5.772.068.000	4.267.997.470	4.267.997.470	100,00%	73,94%

Capaian Output dan Realisasi Anggaran Bulan September											
No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
21	EBA.956 Layanan BMN*	1	74,97%	74,97%	100,00%	74,97%	8.000.000	1.997.100	1.797.100	89,99%	22,46%
22	EBA.994 Layanan Perkantoran*	1	74,97%	74,97%	100,00%	74,97%	10.094.234.000	6.045.960.947	6.067.115.393	100,35%	60,10%

F. Pengukuran Capaian Kinerja triwulan III tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Bulan Agustus tahun 2025 dan Realisasi Anggaran triwulan III										
No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran		
		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III
a	b	c	d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	89,75	98,09	109,29	109,29	538.424.000	419.273.962	77,87
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	4.294.280	4.294.280	100,00
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	93,94	104,38	104,38	138.400.100	75.384.172	54,47
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100,00	100,00	17.598.000	18.119.699	102,96
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92,86	109,25	109,25	138.400.100	75.384.172	54,47
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	84	84	79,29	94,39	94,39	3.246.000	3.246.000	100,00

Capaian Indikator Kinerja Bulan Agustus tahun 2025 dan Realisasi Anggaran triwulan III											
No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran			
		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	
a	b	c		d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
			Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder								
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	100	108,70	108,70	5.489.833	5.369.833	97,81
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	86,96	108,70	108,70	5.489.833	5.369.833	97,81
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,88	96,88	96,59	99,70	99,70	43.423.871	54.927.414	126,49
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91,32	107,44	107,44	72.685.149	88.248.042	121,41
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi	92,4	92,4	97,68	105,71	105,71	5.907.500	4.779.500	80,91

Capaian Indikator Kinerja Bulan Agustus tahun 2025 dan Realisasi Anggaran triwulan III											
No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran			
		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	
a	b	c		d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
			sesuai ketentuan								
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91	92,26	101,38	101,38	5.907.500	4.779.500	80,91
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	29.261.278	33.320.628	113,87
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	72	75,5	104,86	104,14	5.463.628.298	5.513.609.246	100,91
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	18.672.600	16.914.107	90,58
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	100	100	100	100,00	100,00	4.208.000	4.208.000	100,00

Capaian Indikator Kinerja Bulan Agustus tahun 2025 dan Realisasi Anggaran triwulan III										
No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran		
		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III
a	b	c	d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
	pangan fortifikasi	ketentuan								
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	87,19	93,06	106,73	106,73	69.142.100	61.237.078	88,57
		2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	70	75	107,14	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	26.380.000	24.337.940	92,26
		3 Jumlah desa pangan aman	3	70	70	100,00	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	33.609.389	9.553.389	28,42
		4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100,00	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	23.735.000	19.984.703	84,20
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,1	87	91,54	105,22	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	6.700.000	6.500.000	97,01
5	Terlaksananya	1 Persentase Keberhasilan	96	71	71,67	100,94	74,66	258.201.000	200.428.748	77,63

Capaian Indikator Kinerja Bulan Agustus tahun 2025 dan Realisasi Anggaran triwulan III											
No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran			
		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III	
a	b	c	d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i	
	Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT								
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	55,56	1.100.000	100.000	9,09
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	4,96	Belum ada target bulan ini	105,53	17.165.000	15.994.991	93,18
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,83	-	88,19	Belum ada target bulan ini	100,41	4.311.754.257	4.393.436.578	101,89
		2	Nilai AKIP UPT BPOM	83,87	-	-	Belum ada	Penilaian dilakukan	366.831.649	365.025.630	99,51

Capaian Indikator Kinerja Bulan Agustus tahun 2025 dan Realisasi Anggaran triwulan III										
No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran		
		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Target Realisasi Anggaran Triwulan III	Realisasi Anggaran sd Triwulan III	Capaian triwulan III
a	b	c	d	e	f	g=f/e	h=f/d	i	j	k=j/i
						target bulan ini	diakhir tahun			
		3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	1.423.032.285	1.417.999.044	99,65
		4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	-	-	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	366.831.649	365.025.630	99,51

G. Pengukuran Capaian efisiensi Output triwulan III tahun 2025

Pengukuran Efisiensi per Output Triwulan III Tahun 2025						
No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	9,09%	11,00	10,00	75% (tidak efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	144,67%	93,18%	1,55	0,55	92% (efisien)
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	227,98%	89,09%	2,56	1,56	80% (tidak efisien)
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	125,95%	0,79	-0,21	Tidak Efisien
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	131,58%	84,25%	1,56	0,56	92% (efisien)
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	112,01%	104,18%	1,08	0,08	100% (efisien)
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	150,00%	77,63%	1,93	0,93	88% (efisien)
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	107,14%	92,26%	1,16	0,16	100% (efisien)
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	100,00%	28,42%	3,52	2,52	75% (tidak efisien)
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00%	84,20%	1,19	0,19	100% (efisien)
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	106,67%	100,00%	1,07	0,07	100% (efisien)
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan	105,09%	97,01%	1,08	0,08	100% (efisien)

Pengukuran Efisiensi per Output Triwulan III Tahun 2025						
No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
	standar oleh UPT					
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	102,47%	59,35%	1,73	0,73	90% (efisien)
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,88%	77,87%	1,30	0,30	95% (efisien)
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	116,00%	98,31%	1,18	0,18	100% (efisien)
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	105,17%	115,67%	0,91	-0,09	Tidak Efisien
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
21	EBA.956 Layanan BMN	100,00%	89,99%	1,11	0,11	100% (efisien)
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	100,00%	100,35%	1,00	0,00	Tidak Efisien
Capaian Efisiensi BBPOM di Palangka Raya					0,81	88% (efisien)

H. Pengukuran Capaian efisiensi Kinerja triwulan III tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,29	77,87	1,40	0,40	92% (efisien)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Belum ada target bulan ini	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104,38	54,47	1,92	0,92	88% (efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	102,96	0,97	-0,03	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,25	54,47	2,01	1,01	86% (tidak efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94,39	100,00	0,94	-0,06	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,70	97,81	1,11	0,11	100% (efisien)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,70	97,81	1,11	0,11	100% (efisien)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,70	126,49	0,79	-0,21	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107,44	121,41	0,88	-0,12	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	105,71	80,91	1,31	0,31	95% (efisien)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	101,38	80,91	1,25	0,25	95% (efisien)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Belum ada target bulan ini	113,87	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian	104,86	100,91	1,04	0,04	100%

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
	Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					(efisien)
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Belum ada target bulan ini	90,58	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,73	88,57	1,21	0,21	95% (efisien)
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	107,14	92,26	1,16	0,16	100% (efisien)
19	Jumlah desa pangan aman	100,00	28,42	3,52	2,52	75% (tidak efisien)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	84,20	1,19	0,19	100% (efisien)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	105,22	97,01	1,08	0,08	100% (efisien)
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100,94	77,63	1,30	0,30	95% (efisien)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	9,09	11,00	10,00	75% (tidak efisien)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada target bulan ini	93,18	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	101,89	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	99,51	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	99,65	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	99,51	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

I. RHPK Indikator Kinerja triwulan III tahun 2025

1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari		87,25	#DIV/0!	25.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!
Februari		87,25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Maret		87,25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
April		87,25	100.00	100.00	100.00	96.19	99.05
Mei		87,25	98.92	92.33	92.71	93.48	94.36
Juni		87,25	98.92	66.84	94.33	99.20	89.82
Juli		87,25	99.24	100.09	100.46	100.00	99.95
Agustus		89,75	98.40	97.89	98.13	96.91	97.83
September		89,75	98.37	97.74	97.74	98.51	98.09

2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Penilaian dilakukan diakhir tahun.

3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	35,00	85,00	48,57	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	39,00	85,00	76,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,09
Maret	39,00	85,00	93,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,69
April	38,00	85,00	98,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Mei	90,00	85,00	95,66	98,92	98,92	94,62	43,01	100,00	92,47
Juni		85,00	93,28	100,00	100,00	95,80	100,00	100,00	98,24
Juli		85,00	78,74	100,00	100,00	89,22	100,00	100,00	94,67
Agustus		90,00	77,44	100,00	100,00	92,28	100,00	100,00	94,72
September		90,00	73,36	100,00	100,00	92,73	100,00	100,00	93,94

4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan)					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP				REALISASI NILAI AKHIR (m=d+h+l)
	Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Cara Perhitungan C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%				
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100%))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)	
Januari				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
April	Puding Cake	4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%
Mei		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%
Juni		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%
Juli		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%
Agt		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%
Sept		4	4	100%	30%	1	1	100%	35%	1	1	100%	35%	100%

5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	85,00	100,00	0,00	0,00	100,00	34,29	#DIV/0!	83,57
Maret	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	93,43
April	85,00	100,00	100,00	37,14	100,00	34,29	100,00	80,86
Mei	85,00	77,14	100,00	54,29	100,00	34,29	100,00	79,71
Juni	85,00	97,14	100,00	97,14	100,00	34,29	100,00	92,29
Juli	85,00	97,14	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	92,86
Agustus	85,00	97,14	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	92,86
September	85,00	97,14	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	92,86

6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari	60,00	4,35	0,00	4,35
Februari	62,00	10,64	0,00	10,64
Maret	64,00	18,37	0,00	18,37
April	66,00	18,97	0,00	18,97
Mei	70,00	32,84	0,00	32,84
Juni	72,00	44,44	100,00	72,22
Juli	74,00	51,92	100,00	75,96

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Agustus	84,00	55,56	100,00	77,78
September	84,00	58,57	100,00	79,29

7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
April	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Mei	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Juni	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Juli	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Agustus	92,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
September	92,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00

8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	80,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	80,00	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	66,67

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Maret	80,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
April	80,00	7,00	7,00	100,00	5,00	7,00	71,43	6,00	7,00	85,71	85,71
Mei	80,00	12,00	12,00	100,00	8,00	12,00	66,67	11,00	12,00	91,67	86,11
Juni	80,00	18,00	18,00	100,00	12,00	18,00	66,67	17,00	18,00	94,44	87,04
Juli	80,00	21,00	23,00	91,30	17,00	23,00	73,91	22,00	23,00	95,65	86,96
Agustus	80,00	21,00	23,00	91,30	17,00	23,00	73,91	22,00	23,00	95,65	86,96
September	80,00	21,00	23,00	91,30	17,00	23,00	73,913	22,00	23,00	95,65	86,96

9) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Januari	73,88	95,83	100,00	#DIV/0!	87,50	94,44
Februari	73,88	95,83	100,00	#DIV/0!	87,50	94,44
Maret	73,88	95,45	100,00	100,00	91,67	96,78
April	73,88	90,70	93,75	100,00	101,25	96,43
Mei	73,88	94,87	93,75	100,00	104,71	98,33
Juni	73,88	97,77	93,75	100,00	97,16	97,17
Juli	73,88	98,31	93,75	100,00	94,23	96,57
Agustus	96,88	96,26	93,75	100,00	95,00	96,25
September	96,88	96,59	94,44	100,00	95,31	96,59

10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	80	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	80	2	2	20,00	2	2	70,00	1	2	5,00	95,00
Maret	80	7	7	20,00	5	7	50,00	6	7	8,57	78,57
April	80	13	13	20,00	10	13	53,85	12	13	9,23	83,08
Mei	80	19	19	20,00	16	19	58,95	18	19	9,47	88,42
Juni	80	25	25	20,00	22	25	61,60	21	25	8,40	90,00
Juli	80	33	31	21,29	28	31	63,23	27	31	8,71	93,23
Agustus	80	43	37	20,00	38	43	61,86	37	43	8,60	90,47
September	80	51	43	20,00	45	51	61,76	43	45	9,56	91,32

11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	98,00
Februari	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,21	98,24
Maret	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,07	99,21
April	88,00	100,00	100,00	99,03	100,00	97,77	99,36
Mei	88,00	117,14	100,00	98,62	99,07	98,33	102,63
Juni	88,00	102,98	100,00	98,71	99,12	98,80	99,92
Juli	88,00	100,00	100,00	99,17	100,00	93,61	98,56
Agustus	92,40	100,00	100,00	99,25	100,00	92,49	98,35
September	92,40	100,00	100,00	99,28	100,00	89,15	97,68

12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
Januari		-	-	-
Februari		-	-	-
Maret		-	-	-
April		-	-	-
Mei		-	-	-
Juni		-	-	-
Juli		-	-	-
Agustus		100.00	78.83	89.42
September		100.00	82.58	91.29

13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Penilaian dilakukan diakhir tahun

14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM					
Unit Kerja		: BBPOM di Palangkaraya			
Triwulan/Tahun		: 3/2025			
Tanggal Penilaian		: 23 September 2025			
Nama Tim Penilai		: 1. Yustina, S.Si., M.Si. 2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.			
Hasil Penilaian		:			
No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	78.4	75.5	72	104.8
2.	Standar Peralatan	78.6			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	90			
4.	Standar Metode Terverifikasi	25.4			

15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Penilaian dilakukan diakhir tahun

16) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Januari	0	0	1	0,00
Februari	0	0	1	0,00
Maret	100	1	1	100,00
April	100	1	1	100,00
Mei	100	1	1	100,00
Juni	100	1	1	100,00
Juli	100	1	1	100,00
Agustus	100	1	1	100,00
September	100	1	1	100,00

17) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT



18) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi
Januari	0						0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00
April	35	25,00	12,5				37,50
Mei	35	25,00	25,00				50,00
Juni	35	25,00	25,00				50,00
Juli	70	25,00	25,00	25,00			75,00
Agustus	70	25,00	25,00	25,00			75,00
September	70	25,00	25,00	25,00			75,00

19) Jumlah desa pangan aman

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Januari	0	0,00					0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00
April	50	25,00	25,00				50,00
Mei	60	25,00	25,00	10,00			60,00
Juni	70	25,00	25,00	20,00			70,00
Juli	70	25,00	25,00	20,00			70,00
Agustus	70	25,00	25,00	20,00			70,00
September	70	25,00	25,00	20,00			70,00

20) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
Januari	0	0,00					0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00
April	25	25,00					25,00
Mei	60	25,00	25,00	10,00			60,00
Juni	70	25,00	25,00	20,00	10,00		80,00
Juli	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
Agustus	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
September	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00

21) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan
Januari	1	30.00	20.00	10.00	4.62	13
Februari	8.5	60.00	40.00	20.00	9.23	13
Maret	19	100.00	60.00	30.00	14.62	13
April	29.5	200.00	60.00	40.00	23.08	13
Mei	47	550.00	100.00	50.00	53.85	13
Juni	61	595.00	100.00	60.00	58.08	13
Juli	73	685.00	100.00	90.00	67.31	13
Agustus	78	870.00	120.00	90.00	83.08	13
September	87	930.00	160.00	100.00	91.54	13

22) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Februari	3	0	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	18,33
Maret	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
April	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
Mei	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
Juni	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
Juli	3	0	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	1	0	1	38,33
Agustus	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,85	1	0	1	61,67
September	3	0	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	2	0	2	71,67

23) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Lampiran

Nota Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan

Nomor : PR.09.02.63.10.25.640

Tanggal : 08 Oktober 2025

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai Besar POM di	Fungsi																	
		Patroli Siber									Profiling Siber								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1.	Aceh																		
2.	Bandar Lampung																		
3.	Bandung																		
4.	Banjarbaru																		
5.	Denpasar																		
6.	Gorontalo																		
7.	Jakarta																		
8.	Jayapura																		
9.	Kupang																		
10.	Makassar																		
11.	Manado																		
12.	Mataram																		
13.	Medan																		
14.	Padang																		
15.	Palangkaraya																		
16.	Palembang																		
17.	Pekanbaru																		
18.	Pontianak																		
19.	Samarinda																		
20.	Semarang																		
21.	Serang																		
22.	Surabaya																		
23.	Yogyakarta																		

Keterangan:

■ Tepat Waktu

■ Lewat Waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24) Indeks Pelayanan Publik UPT

Penilaian dilakukan diakhir tahun

25) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

26) Nilai AKIP UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

27) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

28) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahu

Laporan KINERJA

Balai Besar POM di Palangka Raya



**Interim
Triwulan III
2025**

